EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, dan kasih sayang-Nya maka Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini telah selesai dilaksanakan. Evaluasi RPJMD dilakukan dengan maksud untuk mengukur capaian kinerja hasil pembangunan Tahun 2019 dan pelaksanaan program RPJMD terhadap RKPD dan APBD Tahun 2019 dan 2020.

Evaluasi ini dilakukan mengingat pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 telah memasuki tahun kedua, dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 memenuhi waktu untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi ini juga dilakukan kerena ditengah-tengah pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 terbit peraturan perundangan yang sangat terkait erat dengan dokumen RPJMD ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan nasional dan perencanaan daerah, dimana target makro, proyek prioritas nasional serta kebijakan-kebijakan lain yang harus didukung oleh perencanaan di daerah.

Di samping hal tersebut, terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan Pemerintah menerbitkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini kemudian diikuti dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan turunannya. Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan beberapa kebijakan melalui beberapa Keputusan Gubernur dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Kebijakan-kebijakan tersebut, terutama berkaitan dengan dilakukannya pergeseran anggaran melalui refocusing dan realokasi anggaran Tahun 2020, tentu sangat berpengaruh terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Atas dasar berbagai kejadian tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023, untuk:

1. Mengetahui perkembangan kondisi perekonomian daerah, menyangkut perekonomian dan pengelolaan keuangan, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku;
2. Menganalisis kesesuaian dan konsistensi kebijakan daerah, baik terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD maupun RPJMN serta capaian hasil pelaksanaan RPJMD sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dan target kinerja Tahun 2018 - 2023 melalui Penyusunan Dokumen RPJMD yang baru Tahun 2018 – 2023.

Secara umum, penyusunan Buku Evaluasi Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 berjalan dengan baik. Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati kami selaku penyusun membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat,

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BAPPEDA

Dr. Ir. H. M. Taufiq Budi Santoso, M. Soc. Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR TABEL ... v
DAFTAR GAMBAR ... vi
BAB I PENDAHULUAN ... I-1
1.1 LATAR BELAKANG ... I-1
1.2 DASAR HUKUM ... I-5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ... I-6
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN ... I-8
BAB II RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023 ... II-1
2.1 ISU STRATEGIS ... II-1
2.2 VISI DAN MISI ... II-7
2.3 TUJUAN DAN SASARAN ... II-10
2.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN ... II-19
BAB III PERKEMBANGAN KEADAAN DAN TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL ... III-1
3.1 PERKEMBANGAN KEADAAN NASIONAL ... III-1
3.1.1 Pademi COVID-19 ... III-1
3.1.2 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Indikator Makro ... III-3
3.2 PERKEMBANGAN KEADAAN JAWA BARAT ... III-4
3.2.1 Kondisi Pandemi COVID-19 di Jawa Barat ... III-4
3.2.2 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Indikator Makro Jawa Barat ... III-14
3.3 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL ... III-24
3.3.1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ... III-24
3.3.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah ... III-25
3.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ... III-26
BAB IV KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH ... IV-1
4.1 KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD KE RKPD DAN APBD TAHUN 2019 ... IV-1

4.2 KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD KE RKPD DAN APBD TAHUN 2020 .... IV-2
4.3 KINERJA DAN KEBIJAKAN KEUANGAN MASA LALU IV-4
4.3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2019 .... IV-4
4.3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020 .... IV-7
BAB V CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 .... V-1
5.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAN IKU DAERAH V-1
5.2 CAPAIAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH . V-6
5.2.1 Tingkat *Impact* V-6
5.2.2 Tingkat *Outcome* V-21
5.3 DUKUNGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL V-30
5.4 KENDALA DALAM EVALUASI CAPAIAN KINERJA V-31
BAB VI PENUTUP VI-1
6.1 KESIMPULAN VI-1
6.2 REKOMENDASI VI-4
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 ..... II-11
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 ..... II-13
Tabel 3.1 Protokol Kesehatan di Provinsi Jawa Barat III-7
Tabel 3.2 Dampak COVID-19 Pada Komponen PDRB Provinsi Jawa Barat III-14
Tabel 3.3 Pekerja Yang Dirumahkan dan PHK Dampak Covid-19 di Jawa Barat III-15
Tabel 3.4 Pekerja yang Dirumahkan dan PHK Dampak Covid-19 di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota III-16
Tabel 3.5 Sebaran Debitur dan *Outsanding* Restrukrisasi di Jawa Barat III-23
Tabel 3.6 Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project)* di Jawa Barat Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 ..... III-27
Tabel 3.7 Target Pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 – 2024 Dalam RPJMN III-28
Tabel 3.8 Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa Barat Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 ..... III-29
Tabel 3.9 Persandingan Sasaran RPJMN Dengan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat III-33
Tabel 3.10 Persandingan Prioritas Nasional (PN) Dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat (PP) III-35
Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan 2020 ..... IV-16
Tabel 5.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ..... V-1
Tabel 5.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ..... V-4
Tabel 5.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (*Impact*) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ..... V-7
Tabel 5.4 Jumlah dan Persentase Indikator IKU Perangkat Daerah Berdasarkan Kriteria Pencapaian Tahun 2019 ..... V-19
Tabel 5.5 Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah Tahun 2019 ..... V-25
Tabel 5.6 Jumlah dan Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Berdasarkan Kriteria Pencapaian Tahun 2019 ..... V-28
Tabel 5.7 Capaian Indikator Makro Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2019 ..... V-30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Persentase Pekerja/Buruh yang Dirumahkan dampak COVID-19 Per Sektor Usaha (%) III-17
Gambar 3.2 Persentase Pekerja/Buruh yang di PHK dampak COVID-19 Per Sektor Usaha (%) III-18
Gambar 3.3 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2020 .... III-20
Gambar 3.4 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Berdasarkan Jenis Hotel di Provinsi Jawa Barat.. III-21
Gambar 3.5 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat Tahun 2019 – 2020.. III-22
Gambar 3.6 Kondisi Penyaluran KUR Jawa Barat Tahun 2018 – 2019 .... III-23
Gambar 3.7 Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024........ III-27
Gambar 4.1 Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD dan APBD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 .... IV-1
Gambar 4.2 Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD dan APBD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 .... IV-3
Gambar 4.3 Beberapa Peraturan yang Diterbitkan Sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014... IV-8
Gambar 4.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 .... IV-9
Gambar 5.1 Rekap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) V-4
Gambar 5.2 Rekap Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.. V-7
Gambar 5.3 Rekap Capaian Indikator Kinerja Program (*Outcome*) Pemerintah Deaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 .... V-23
Gambar 5. 4 Rekap Capaian Anggaran Program (Outcome) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019... V-24
Gambar 5.5 Rekap Capaian Indikator Program/IKK Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019... V-26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tersebut, tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindaklanjut yang tepat.

Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada Pasal 276 yang mengamanatkan bahwa kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerahnya. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah provinsi yang dipimpinnya serta melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kabupaten/kota.

Tatacara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, pelaksanaan evaluasi dilakukan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Pada tahun ini, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 telah memasuki tahun kedua. Setelah RPJMD Provinsi Jawa Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 pada tanggal 4 Maret 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tersebut.

Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah tersebut, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah di Jawa Barat serta terdapat beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Jawa Barat. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap Prioritas Nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan

dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Adapun Peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya :

1. Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit dalam memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan, yang berkaitan dengan perkembangan keadaan daerah yaitu terjadinya Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal bulan Maret 2020. Terjadinya pandemi ini, baik di tataran nasional maupun internasional, sangat mempengaruhi pembangunan dan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi dunia terganggu, (*Foreign Direct Investment*/*FDI*) mengalami penurunan 30-40 persen, perdagangan dunia turun 13 sampai 32 persen, perjalanan wisata dunia turun 40,10 persen). Kondisi ini tentu saja mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun sangat dalam serta tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (*PHEIC*)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona* Virus Disease (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Jawa Barat menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Jawa Barat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Kebijakan refocusing dan realokasi anggararan di Tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergerseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Jawa Barat dari 9 (sembilan) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini ditegaskan kembali dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan Tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19, dimana ada 2 (dua) agenda penting yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung tahapan tahun kedua

pencapaian visi misi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin melalui inovasi dan kolaborasi.

Kebijakan nasional dan perkembangan keadaan menjadi aspek penting dalam evaluasi RPJMD ini. Hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini sangat menentukan tindaklanjut perencanaan pembangunan Jawa Barat kedepannya termasuk kemungkinan dilakukannya Perubahan RPJMD. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 342 bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 32); dan
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 37).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Evaluasi terhadap hasil RPJMD yang dilakukan ini merupakan evaluasi paruh waktu karena dilaksanakan pada tengah periode RPJMD Tahun 2018-2023. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD. Evaluasi paruh waktu memberikan

keuntungan tersendiri karena hasilnya dapat ditindaklanjuti di sisa periode RPJMD sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkat implementasi dari RPJMD tersebut.

Maksud dari pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional. Sedangkan maksud pelaksanaan evaluasi adalah :

1. Mengetahui sejauhmana realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Memastikan adanya konsistensi antara perencanaan 5 (lima tahunan dengan perencanaan tahunan serta pelaksanaan pembangunan (konsistensi program) RPJMD dengan RKPD danm APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
3. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan mempengaruhi kebijakan umum APBD dan PPAS. Hal ini terutama terkait dengan Pasal 54 , 55 dan 56 , yaitu Belanja Daerah dikelompokan berdasarkan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer;
4. Melakukan telaahan terhadap Permendagri No 90 Tahun 2019, dimana terdapat perubahan yang mendasar atas pengaturan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daera serta adanya sub kegiatan setelah program dan kegiatan, yang pada peraturan sebelumnya tidak ada;
5. Mengukur sejauh mana pandemi Covid -19 yang mengakibatkan dilakukannya refocusing dan realosi anggaran pada Tahun 2020 mempengaruhi terhadap capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 teutama penilaian atas target dan realiasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kenerja Kunci (IKK) RPJMD; penilaian atas target dan realiasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kenerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah; penilaian antara realisasi dengan target capaian kinerja dan anggaran program RPJMD;
6. Menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi untuk pelaksanaan RPJMD selanjutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Evaluasi terhadap hasil RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyajian

BAB II RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

2.1 Isu Strategis
2.2 Visi dan Misi
2.3 Tujuan dan Sasaran
2.4 Prioritas Pembangunan

BAB III PERKEMBANGAN KEADAAN DAN TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

3.1 Perkembangan Keadaan Internasional dan Nasional
3.2 Perkembangan Keadaan Jawa Barat
3.3 Telaahan Kebijakan Nasional

BAB IV KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

4.1 Konsistensi Pelaksanaan Program RPJMD Ke RKPD dan APBD Tahun 2019
4.2 Konsistensi Pelaksanaan Program RPJMD Ke RKPD dan APBD Tahun 2020
4.3 Kinerja dan Kebijakan Keuangan Masa Lalu

BAB V CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

5.1 Capaian Indikator Makro dan IKU Daerah
5.2 Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.3 Dukungan Capaian Pembangunan Jawa Barat terhadap Pembangunan Nasional
5.4 Kendala Dalam Evaluasi Capaian Kinerja

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan
6.2 Rekomendasi

BAB II
RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

2.1 ISU STRATEGIS

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan sumber daya manusia antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Jawa Barat yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi capaian Angka Partisipasi Kasar periode 2012-2017, sedangkan nilai APM menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun pada seluruh jenjang pendidikan. Angka Partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Jawa Barat yaitu pada kelompok usia 19-24 tahun atau pada jenjang perguruan tinggi. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat ini belum meratanya ketersediaan guru terutama guru di daerah terpencil, serta nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah.

Selain hal tersebut diatas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dan kualitas dan relevansi, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya, belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja

sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada saat ini menunjukan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, dengan capaian sebesar 80,72 poin pada Tahun 2017, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan 1 dari 4 anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami *stunting*.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baru mencapai 29,99 persen.

2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2012 penduduk miskin Jawa Barat sebesar 10,09 persen, sedangkan Maret 2018 sebesar 7,45 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,38 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan sebesar 10,25

persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,47 persen pada Maret 2018. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana berdasarkan data BPS tercatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Februari 2012 sebesar 9, 84 persen menjadi 8,16 persen pada bulan Februari 2018 dan selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan pengangguran sebesar 1,68 persen. Meskipun terjadi penurunan secara persentase namun secara absolut jumlah pengangguran masih tinggi yaitu sebesar 1,86 juta orang pada Februari 2018 hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman idiologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama.

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun disisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi sosial dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan.

Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat.

Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu.

Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Jawa Barat masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; belum berkembangnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai *hospitality* di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, *branding* dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas

pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regerasi petani dan rendahnya akses permodalan.

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan, hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut.

Pada sektor pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat yang masih berada dibawah rata-rata nasional dan ketidakstabilan harga. Hal ini menyebabkan masalah antara lain masih tingginya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, masih rendahnya keragaman konsumsi pangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degragdasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur, bahan baku industri mayoritas impor, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

2.2 VISI DAN MISI

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

**"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi"**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

   Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat.

   Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

   Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

   Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

   Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat.

   Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

   Dalam tata kelola pemerintahan, '*Good Governance'* atau 'Tata Kelola yang Baik' harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

   Di Jawa Barat, *Good Governance* direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, target pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan jelas dan terukur.

Penetapan tujuan dan sasaran misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan. Indikator makro Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Proyeksi					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,69	71,06	71,42-71,91	71,91 – 72,52	72,52-73,13	73,13- 73,74	73,74-74,35	73,74-74,35
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,50	1,48	1,45	1,43	1,41	1,41
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,25	6,66-6,90	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	4,30-4,54
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	8,0-7,9	7,9-7,7	7,7-7,5	7,5-7,3	7,3-7,1	7,3-7,1
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,35	5,64	5,4 - 5,8	5,5 – 5,9	5,6 – 6,0	5,7 – 6,1	5,8 – 6,2	5,8 – 6,2
6.	Indeks Gini	Poin	0,393	0,405	0,38-0,39	0,37-0,38	0,37-0,38	0,36-0,37	0,36-0,37	0,36-0,37

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Penentuan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 melibatkan *stakeholder* terkait antara lain para pakar ekonomi dari akademisi, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN Jawa Barat dan asosiasi pelaku usaha lainnya dengan mempertimbangkan teori ekonomi dan data historis capaian ekonomi Jawa Barat berdasarkan data BPS.

Dalam proyeksi laju pertumbuhan ekonomi 5 (lima) tahun kedepan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta beberapa asumsi yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah menggambarkan *size* market yang besar sehingga meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya tarik investasi.
2. Ekonomi kreatif yang tumbuh kembang mengangkat potensi lokal dan pariwisata Jawa Barat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang menjanjikan.
3. Keunggulan sumber daya alam yang tidak dimiliki daerah lain dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Program-program pemerintah daerah terutama dalam bentuk pendampingan kolaborasi dengan pelaku pembangunan lainnya akan menstimulus pertumbuhan inklusif.
5. Penyelesaian dan beroperasinya sejumlah proyek infrastruktur antara lain BIJB, Tol Bocimi, Tol Cisemdawu, Cikampek *elevated* dan Pelabuhan Patimban

Tabel 2.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Visi:Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi										
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban										
1.1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial		Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,5	68,7	68,6 - 69	69,1 - 69,5	69,6 - 70	70,1 - 70,5	70,6 - 71	70,6 - 71
	1.1.1. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,5	68,7	68,6 - 69	69,1 - 69,5	69,6 - 70	70,1 - 70,5	70,6 - 71	70,6 - 71
		b. Indeks Demokrasi (Poin)	68,78	73,91	68,79 - 70,78	70,79 - 71,78	71, 79 - 72,78	72,79 - 73,78	73,79 - 74,78	73,79 - 74,78
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif										
2.1. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat		Indeks Kebahagiaan (Poin)	69,58	70-71	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76
	2.1.1. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a Indeks Kebahagiaan (Poin)	69,58	70-71	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76
	2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a Usia Harapan Hidup (tahun)	72,47	72,76	73,67 – 74,87	74,87 – 76,07	76,07– 77,27	77,27 – 78,47	78,47 – 79,67	78,47 – 79,67

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		2.1.3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	70,04	70,14	70,34	71	72	72,3	73,25	73,25
				b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	89,18	89,52	89,32	89,82	90,5	91	92	92
		2.1.4.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a.	Rata–Rata lama sekolah (tahun)	8,14	8,18	8.28	8.39	8.49	8.60	8.70	8.70
				b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	12,88	13.15	13.39	13.64	13.89	14.14	14.14
		2.1.5.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	46,33	49,00	53,63	56,31	59,13	62,09	65,19	65,19
2.2.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah			a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	N/A	N/A	16,63	18,65	20,72	21,83	22,16	22,16
		2.2.1	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	N/A	N/A	16,63	18,65	20,72	21,83	22,16	22,16
		2.2.2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	69,58	69,61	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah										
3.1. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		a. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	40,90	40,90-41,00	41-43	44-46	47-49	50-52	53-55	53-55
	3.1.1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a. Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.155	1.231	1.300	1.340	1.386	1.447	1.503	1.503
	3.1.2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	40,90	40,90-41,00	41 - 43	44 - 46	47 - 49	50 - 52	53 - 55	53 - 55
	3.1.3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a. Indeks Desa Membangun (Poin)	0,64	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69
	3.1.4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a. Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan)	0	0	0	1	1	2	2	6
3.2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	49,98	50,20	50,42	50,64	50,64

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	3.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	49,98	50,20	50,42	50,64	50,64
		b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	2,02	2,38	2,80	3,92	5,87	7,11	7,72	7,72
	3.2.2. Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	a. Indeks Penggunaan Air (Poin)	N/A	N/A	1,1923	1,1910	1,1834	1,1822	1,1811	1,1811
	3.2.3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a. Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	166	166	165	164	163	162	161	161
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.										
4.1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi		a. Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Triliun Rupiah)	1.788,38	1.962,23	2.288,75	2.471,85	2.669,60	2.883,16	3.113,82	3.113,82
	4.1.1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	85,2	81,6	82,4	83,2	84	84,8	85,6	85,6
		b. Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	108,39	110,90	113,11	115,36	117,65	120,00	122,38	122,38
	4.1.2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber	a. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	2,71	2,85	2,30-3,00	3,01-3,15	3,16-3,30	3,31-3,45	3,46-3,50	3,46-3,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	pertumbuhan ekonomi inklusif									
	4.1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	a. Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	5,35	6,49	2,63	2,70	2,77	2,85	2,94	2,94
		b. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	4,55	4,19	3	3	4	4	5	5
	4.1.4. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	449,37	473,00	495,40	520,17	546,18	573,48	602,15	602,15
		b. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	18,06	20,1	21	22	23	24	25	25
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota										
5.1. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*		a. Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB	BB	BB	A	A	A	A	A
	5.1.1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	b. Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB	BB	BB	A	A	A	A	A
	5.1.2. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam	a. Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (%)	N/A	N/A	50	60	70	80	90	90

2.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada Tahun 2018–2023. Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Prioritas Pembangunan Daerah diatas akan menghasilkan transformasi pembangunan berupa pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu dan anak juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

BAB III
PERKEMBANGAN KEADAAN DAN TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

3.1 PERKEMBANGAN KEADAAN NASIONAL

3.1.1 Pademi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu munculnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, yang kemudian disebut dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Virus tersebut petama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 14 Juli 2020, tercatat sebanyak 78.572 terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah yang sembuh adalah 37.636 dan meninggal sebanyak 3.710 orang (sumber: Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat).

Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
m. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (*social distancing*) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (*travel ban*), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini

berujung pada penurunan *output* global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak Covid-19, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang telah diterbitkan, maka pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan penyesuaian/perubahan target-target pembangunan dalam RPJMN pada Rancangan Awal RKP Tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional untuk Tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan Tahun 2021.

3.1.2 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Indikator Makro

Berdasarkan data terkini yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia triwulan I Tahun 2020 terhadap triwulan I Tahun 2019 tumbuh sebesar 2,97 persen (y-on-y), melambat dibanding capaian triwulan I Tahun 2019 yang sebesar 5,07 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,74 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I Tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,15 persen poin.

Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2019 sebesar 5,01 persen turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan

kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen. Penurunan TPT di Indonesia ini masih belum mendapat pengaruh pandemic COVID-19 yang kasusnya ditemui di Indonesia pada 2 Maret 2020. Untuk itu, TPT per Februari 2020 masih menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang dari Februari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama Jasa Pendidikan (0,24 persen poin), Konstruksi (0,19 persen poin), dan Jasa Kesehatan (0,13 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Pertanian (0,42 persen poin), Perdagangan (0,29 persen poin), dan Jasa Lainnya (0,21 persen poin).

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11 persen dibanding jumlah kunjungan pada Maret 2019. Selain itu, jika dibandingkan dengan Februari 2020, jumlah kunjungan wisman pada Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 45,50 persen. Secara kumulatif (Januari–Maret 2020), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 2,61 juta kunjungan atau turun 30,62 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama Tahun 2019 yang berjumlah 3,76 juta kunjungan.

Indikator di sektor pariwisata yang terdampak COVID-19 yaitu Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel. TPK hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Maret 2020 mencapai rata-rata 32,24 persen atau turun 20,64 poin dibandingkan dengan TPK Maret 2019 yang tercatat sebesar 52,88 persen. Selain itu, jika dibanding TPK Februari 2020, TPK hotel klasifikasi bintang pada Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 16,98 poin. Sementara itu, indikator rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama Maret 2020 tercatat sebesar 1,83 hari, terjadi kenaikan sebesar 0,02 poin jika dibandingkan keadaan Maret 2019.

3.2 PERKEMBANGAN KEADAAN JAWA BARAT

3.2.1 Kondisi Pandemi COVID-19 di Jawa Barat

Berdasarkan data dari Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat pada 15 Juli 2020 pagi tercatat jumlah penderita terkonfirmasi positif COVID-19 adalah 5.235. Dari jumlah tersebut, yang sembuh sebanyak 1.924 orang dan

meninggal 186 orang. Selain itu terdapat Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 56.202 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sejumlah 11.322 orang.

Berbagai upaya di bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan beberapa kendala antara lain minimnya fasilitas kesehatan yang tentunya akan memperlambat penanganan wabah. Sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas di beberapa wilayah Jawa Barat masih dinilai kurang. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit (TT) menurut *World Health Organization* (WHO) adalah 1 (satu) TT untuk 1000 penduduk. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sekurangnya 45.780 Tempat Tidur Rumah sakit di Jawa Barat. Sementara itu dari 369 Rumah Sakit yang ada di Jawa Barat hanya memiliki total 37.296 tempat tidur. Dengan demikian masih terdapat kekurangan sebanyak 1.088 TT. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terdapat 1.088 unit Puskesmas di Jawa Barat dimana 292 unit (26,84 persen) merupakan Puskesmas Rawat Inap, dan 796 unit (73,16) merupakan Puskesmas Non Rawat Inap.

Beberapa kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19, antara lain:

a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.
b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.
c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.
d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui beragam program pemulihan ekonomi yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang usaha, serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud dari implementasi "*new normal*" atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). Protokol kesehatan dilaksanakan sesuai dengan tingkatan (level) dan klasifikasi resiko kesehatan serta dampak pada perekonomian. Panduan AKB dikeluarkan untuk 30 bidang kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 5 (lima) level dengan pembeda warna sesuai tingkat penyebaran wabah. Level I ditandai warna hijau, level II ditandai warna biru, level III ditandai warna kuning, level IV ditandai warna merah, dan terakhir level V ditandai warna hitam. Panduan AKB di 30 bidang kegiatan dapat dilihat lebih lengkap pada tabel di bawah.

Tabel 3.1
Protokol Kesehatan di Provinsi Jawa Barat

No	Sektor	Klasifikasi Resiko Kesehatan dan Dampak Ekonomi	Aktivitas/Tempat		LEVEL I HIJAU	LEVEL II BIRU	LEVEL III KUNING	LEVEL IV MERAH	LEVEL V HITAM
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perjalanan	Low Risk - High Impact	Mobilitas		Membatasi antar Provinsi	Membatasi dalam Provinsi	Membatasi dalam Provinsi dan antar Provinsi	Membatasi dalam Kabupaten/Kota	Membatasi dalam Kelurahan/Desa
2	Kesehatan	High Risk - Low Impact	Isolasi/Karantina Kesehatan		Dianjurkan bagi masyarakat yang sakit	Orang resiko tinggi: lansia, orang dengan penyakit komorbid	Orang resiko tinggi: lansia, orang dengan penyakit komorbid	Kasus ODP/OTG/pelaku perjalanan/kontak erat mengisolasi mandiri	Kasus ODP/OTG/pelaku perjalanan/kontak erat mengisolasi mandiri
3		High Risk - Low Impact	Rumah Sakit	Jam operasional	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
				Jenis layanan	Semua layanan kesehatan buka	Sebagian poliklinik rawat jalan dibuka, rawat inap normal	Sebagian poliklinik rawat jalan dibuka, rawat inap normal	Khusus melayani pasien gawat darurat, rawat inap diutamakan untuk PDP COVID-19	Ditutup untuk umum (pasien dijemput ke rumah), khusus melayani pasien gawat darurat
4		High Risk - Low Impact	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Jam operasional	Normal	Normal	Normal	Normal	Ditutup
				Jumlah pengunjung	Normal	75% dari kapasitas layanan pasien	50% dari kapasitas layanan pasien	25% dari kapasitas layanan pasien	Ditutup
				Jenis layanan	Semua layanan kesehatan buka	Semua layanan kesehatan buka	Semua layanan kesehatan buka	Semua layanan kesehatan buka	Ditutup
5	Jasa	Low Risk - High Impact	Perkantoran	Jam operasional	Normal	Normal	Normal	Normal	Ditutup
				Jumlah pegawai	Seluruh pegawai bekerja dengan menjaga jarak	25% Pegawai WFH dengan jadwal piket	50% pegawai WFH dengan jadwal piket	75% Pegawai WFH dengan jadwal piket	100% Pegawai WFH

No	Sektor	Klasifikasi Resiko Kesehatan dan Dampak Ekonomi	Aktivitas/Tempat		LEVEL I HIJAU	LEVEL II BIRU	LEVEL III KUNING	LEVEL IV MERAH	LEVEL V HITAM
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6		Low Risk - High Impact	Hotel	Jenis layanan	50% Fasilitas Layanan Hotel	50% Fasilitas Layanan Hotel	Hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar	Hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar	Hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar
7		Low Risk - High Impact	Perban kan	Jam operasional	Normal	Pembatasan jam operasional (08.00 - 14.00) dan melayani transaksi online	Pembatasan jam operasional (08.00 - 12.00) dan melayani transaksi online	Ditutup dan melayani transaksi online	Ditutup dan melayani transaksi online
				Jumlah pegawai	25% Pegawai Work From Home (WFH) dengan jadwal piket	50% pegawai WFH dengan jadwal piket	75% Pegawai WFH dengan jadwal piket	100% Pegawai WFH	100% Pegawai WFH
				Jumlah pengunjung	Pembatasan pengunjung 70% dari kapasitas	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas	Pembatasan pengunjung 30% dari kapasitas	Ditutup	Ditutup
8		High Risk - High Impact	Lokasi Wisata	Jam operasional	06.00 - 16.00 WIB	06.00 - 16.00 WIB	Ditutup	Ditutup	Ditutup
				Jumlah pengunjung	50% Kapasitas	30% Kapasitas			
9	Manufaktur	Low Risk - High Impact	Industri	Jam operasional	Normal	Beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift	Beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift	Beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift	Ditutup
				Jumlah pekerja	Proporsional *Physical Distancing*	Jumlah pekerja yang masuk tidak lebih dari 75% kapasitas gedung	Jumlah pekerja yang masuk tidak lebih dari 50% kapasitas gedung	Jumlah pekerja yang masuk tidak lebih dari 25% kapasitas gedung	
10	Perdagangan	Low Risk - Low Impact	Warung makan / Restora	Jam operasional	07.00 s.d 18.00 WIB	07.00 s.d 18.00 WIB	07.00 s.d 18.00 WIB	07.00 s.d 16.00 WIB	Ditutup
				Jumlah pengunjung	50% dari Okupansi Meja	50% dari Okupansi Meja	Hanya Take Away	Hanya Take Away	

No	Sektor	Klasifikasi Resiko Kesehatan dan Dampak Ekonomi	Aktivitas/Tempat		LEVEL I HIJAU	LEVEL II BIRU	LEVEL III KUNING	LEVEL IV MERAH	LEVEL V HITAM
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			n / Café						
11		High Risk - High Impact	Mall	Jam operasional	10.00 - 20.00 WIB	10.00 - 20.00 WIB	10.00 - 18.00 WIB	Ditutup	Ditutup
				Jumlah pengunjung	50% dari kapasitas Pengunjung	50% dari kapasitas Pengunjung	50% dari kapasitas Pengunjung	Ditutup	Ditutup
12		High Risk - High Impact	Supermarket Bahan Makanan Pokok	Jam operasional	08.00 - 20.00 WIB	08.00 - 20.00 WIB	08.00 - 18.00 WIB	08.00 - 18.00 WIB	Ditutup
				Jumlah pengunjung	75% Kapasitas Pengunjung	75% Kapasitas Pengunjung	50% Kapasitas Pengunjung	50% Kapasitas Pengunjung	Ditutup
13		High Risk - High Impact	Minimarket	Jam operasional	08.00 - 20.00 WIB	Pembatasan jam operasional (08.00 - 18.00)	Pembatasan jam operasional (08.00 - 15.00)	Pembatasan jam operasional (08.00 - 14.00)	Ditutup
				Jumlah pengunjung	75% Kapasitas Pengunjung	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas	Pembatasan pengunjung 30% dari kapasitas	Pembatasan pengunjung 20% dari kapasitas	Ditutup
14		High Risk - High Impact	Pasar Tradisional	Jam operasional	Normal	Pembatasan jam operasional (05.00 - 12.00)	Pembatasan jam operasional (05.00 - 11.00)	Pembatasan jam operasional (05.00 - 10.00)	Ditutup
				Jumlah pengunjung	Pembatasan pengunjung 80% dari kapasitas	Pembatasan pengunjung 70% dari kapasitas	Pembatasan pengunjung 50% dari kapasitas	Pembatasan pengunjung 30% dari kapasitas	
15	Pendidikan	High Risk - Low Impact	Sekolah	Jam operasional	Normal	Ditutup	Ditutup	Ditutup	Ditutup
				Metode belajar	Pembatasan siswa 50% dari kapasitas kelas dan	Melaksanakan pembelajaran secara online	Melaksanakan pembelajaran secara online	Melaksanakan pembelajaran secara online	Melaksanakan pembelajaran secara online

No	Sektor	Klasifikasi Resiko Kesehatan dan Dampak Ekonomi	Aktivitas/Tempat		LEVEL I HIJAU	LEVEL II BIRU	LEVEL III KUNING	LEVEL IV MERAH	LEVEL V HITAM
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					pemberlakukan shift belajar				
16	Area Publik	High Risk - Low Impact	Taman	07.00 - 15.00 WIB	Normal	Ditutup	Ditutup	Ditutup	Ditutup
				Pembatasan Kerumunan	Normal				
17		High Risk - Low Impact	Perpustakaan	Jam operasional	Normal	Ditutup	Ditutup	Ditutup	Ditutup
				Jumlah pengunjung	Normal				
18		High Risk - High Impact	Terminal / Stasiun / Bandara	Jam operasional	Normal	Pembatasan jam operasional	Pembatasan jam operasional	Ditutup	Ditutup
				Jumlah pengunjung	Normal	Pembatasan Pengunjung 70% dari kapasitas	Pembatasan Pengunjung 50% dari kapasitas		
19		High Risk - Low Impact	Tempat Ibadah (Masjid Raya, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng)		Pembatasan jumlah jamaah maksimum 75 % dari kapasitas tempat ibadah	Pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% dari kapasitas tempat ibadah	Pembatasan jumlah jamaah maksimum 30% dari kapasitas tempat ibadah	Ditutup	Ditutup
20		High Risk - Low Impact	Penyelenggaraan Acara	Administrasi	Penyelenggara acara wajib mendapatkan izin dari pihak berwenang disertai kesiapan protokol kesehatan	Penyelenggara acara wajib mendapatkan izin dari pihak berwenang disertai kesiapan protokol kesehatan	Penyelenggara acara wajib mendapatkan izin dari pihak berwenang disertai kesiapan protokol kesehatan	Dilarang	Dilarang
21	Pertanian	Low Risk - High Impact	Sawah		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

No	Sektor	Klasifikasi Resiko Kesehatan dan Dampak Ekonomi	Aktivitas/Tempat		LEVEL I HIJAU	LEVEL II BIRU	LEVEL III KUNING	LEVEL IV MERAH	LEVEL V HITAM
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	Perikanan	Low Risk - High Impact	Kolam/Danau/Sungai/Laut		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
23	Peternakan	Low Risk - High Impact	Kandang		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
24	Perkebunan	Low Risk - High Impact	Kebun		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
25	Kehutanan	Low Risk - High Impact	Hutan		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
29	Konstruksi	Low Risk - High Impact	Pembangunan dan Renovasi Perumahan, Jalan, Jembatan	Jam Operasioal	Normal	Normal	8 Jam Kerja	6 Jam Kerja	Ditutup
				Jumlah Pekerja	Normal	Normal	50% dari Jumlah Pekerja	50% dari Jumlah Pekerja	Ditutup
				Zonasi (Level Kecamatan)	Normal	Kecamatan Zona Merah dan Hitam ditutup	Kecamatan Zona Merah dan Hitam ditutup	Ditutup	Ditutup
30	Transportasi	Low Risk - High Impact	Transportasi Publik	Jam Operasioal	Normal	Normal	Normal	Normal	Dilarang
				Jumlah Penumpang	Normal	Normal	Pembatasan jumlah penumpang 50%.	Pembatasan jumlah penumpang 50%.	Dilarang
31	Penanaman Modal		Promosi Investasi	Jam operasional	Normal	Pembatasan waktu pelaksanaan	Pembatasan waktu pelaksanaan	Promosi investasi secara virtual dan online	Promosi investasi secara virtual dan online
				Jumlah Peserta	Jumlah peserta normal dengan menjaga jarak	Jumlah peserta yang mengikuti dibarasi 75 % dari kapasitas tempat promosi	Jumlah peserta yang mengikuti dibarasi 50 % dari kapasitas tempat promosi		
			Fasilitasi	Jam operasional	Normal	Pembatasan waktu fasilitasi	Pembatasan waktu fasilitasi	Fasilitasi investor secara virtual	Fasilitasi investor secara virtual

No	Sektor	Klasifikasi Resiko Kesehatan dan Dampak Ekonomi	Aktivitas/Tempat		LEVEL I HIJAU	LEVEL II BIRU	LEVEL III KUNING	LEVEL IV MERAH	LEVEL V HITAM
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Investor	Jumlah Investor	Jumlah investor normal dengan menjaga jarak	Jumlah investor yang difasilitasi dibarasi 75 %	Jumlah investor yang difasiltasi dibarasi 50 %		
			Pembinaan Perusahaan PMA PMDN	Jam operasional	Normal	Pembatasan waktu pelaksanaan	Pembatasan waktu pelaksanaan	Pembinaan perusahaan PMA PMDN secara virtual dan online	Pembinaan perusahaan PMA PMDN secara virtual dan online
				Jumlah Peserta	Jumlah peserta normal dengan menjaga jarak	Jumlah peserta yang mengikuti dibarasi 75 % dari kapasitas tempat pelaksanaan	Jumlah peserta yang mengikuti dibarasi 50 % dari kapasitas tempat pelaksanaan		
			Pemantauan Perusahaan PMA PMDN	Jam operasional	Normal	Pembatasan waktu pelaksanaan	Pembatasan waktu pelaksanaan	Pemantauan perusahaan PMA PMDN secara virtual dan online	Pemantauan perusahaan PMA PMDN secara virtual dan online
				Jumlah Peserta	Jumlah peserta normal dengan menjaga jarak	Jumlah peserta yang mengikuti dibarasi 75 % dari kapasitas tempat pelaksanaan	Jumlah peserta yang mengikuti dibarasi 50 % dari kapasitas tempat pelaksanaan		
			Pengawasan Perusahaan PMA PMDN	Jam operasional	Normal	Pembatasan waktu pelaksanaan	Pembatasan waktu pelaksanaan	Pengawasan perusahaan PMA PMDN secara virtual dan online	Pengawasan perusahaan PMA PMDN secara virtual dan online
				Jumlah Peserta	Jumlah peserta normal dengan menjaga jarak	Jumlah peserta yang mengikuti dibarasi 75 % dari kapasitas tempat pelaksanaan	Jumlah peserta yang mengikuti dibarasi 50 % dari kapasitas tempat pelaksanaan		
32	Pelayanan Perizinan		*Front Office*	Jam operasional	Normal melalui tatap muka	Pembatasan waktu pelayanan tatap muka	Pelayanan tatap muka ditutup, pelayanan secara online	Pelayanan tatap muka ditutup, pelayanan secara online	Pelayanan tatap muka ditutup, pelayanan secara online
				Jumlah pengunjung	Jumlah pengunjung normal dengan menjaga jarak	Jumlah pengunjung dibatasi 50 %			
			Konsultasi dan	Jam operasional	Normal dengan tatap muka	Pembatasan waktu pelayanan tatap muka	Pelayanan tatap muka ditutup, pelayanan melalui call cemter	Pelayanan tatap muka ditutup,	Pelayanan tatap muka ditutup, pelayanan melalui call cemter

No	Sektor	Klasifikasi Resiko Kesehatan dan Dampak Ekonomi	Aktivitas/Tempat		LEVEL I HIJAU	LEVEL II BIRU	LEVEL III KUNING	LEVEL IV MERAH	LEVEL V HITAM
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
			Pengaduan	Jumlah Masyarakt	Jumlah masyarakat normal dengan menjaga jarak	Jumlah masayarakat dibatasi 50 %		pelayanan melalui call cemter	
			Visitasi Lapangan	Jam operasional	Normal dilakukan ke lapangan	Normal dilakukan ke lapangan	Visitasi lapangan secara virtual	Visitasi lapangan secara virtual	Visitasi lapangan secara virtual
				Jumlah Petugas	Jumlah petugas visitasi normal dengan menjaga jarak	Jumlah Petugas dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat			

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020; Divisi PRE GTPP COVID-19 Jawa Barat, 2020

3.2.2 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Indikator Makro Jawa Barat

Berdasarkan data BPS, perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada triwulan I Tahun 2020 terhadap triwulan I Tahun 2019 tumbuh 2,73 persen (y-on-y) melambat dibanding capaian triwulan I Tahun 2019 sebesar 5,39 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 24,89 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 4,33 persen.

Ekonomi Jawa Barat triwulan I Tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya menurun sebesar 0,95 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,43 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 59,51 persen.

Lebih lanjut mengenai dampak COVID-19 terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat berdasarkan pengeluaran yang dikaji oleh Bank Indonesia, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Dampak COVID-19 Pada Komponen PDRB Provinsi Jawa Barat

JENIS PENGELUARAN	URAIAN
Konsumsi Rumah Tangga (C)	Kondisi Maret 2020, Konsumsi RT menurun: • IKK* 109,1 turun dari 118 pada Februari 2020 • IEK** 124,2, turun dari 134,6 pada Februari 2020 • konsumsi listrik pada triwulan I 2020 (Januari-Februari) sebesar -29,05% (y-o-y)
Konsumsi Pemerintah (G)	• Terjadi penurunan karena realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 4,48 T, pendapatan terkoreksi 4 T dan Silpa terkoreksi 2,6 T • Penurunan realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja modal
Investasi (I)	• Investasi pada Tahun 2020 diperkirakan menurun akibat terganggunya *confident investor* • Investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2020 diperkirakan menurun sebanyak 20%, dikarenakan sebagian besar negara investor asing utama Jawa Barat terdampak oleh COVID-19
Ekspor – Impor (E-Im)	• Triwulan I 2020, net ekspor Jawa Barat surplus USD3,35 miliar, Tetapi tumbuh negatif -1,08% (y-o-y) • Impor non migas Jawa Barat juga tercatat tumbuh negatif -16,27% (y-o-y)

Sumber: Bank Indonesia, 2020
Ket: *IKK Indkes Keyakinan Konsumen; **IEK Indeks Ekspektasi Konsumen

Berdasarkan data BPS dalam setahun terakhir pengangguran di Provinsi Jawa Barat meningkat 28,35 ribu orang, namun TPT mengalami penurunan sebesar 0,04 persen poin menjadi 7,69 persen pada Februari 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 22,46 juta orang, bertambah 0,47 juta orang dari keadaan Februari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar (0,78 persen poin), Jasa Pendidikan (0,36 persen poin), dan *Real Estate* (0,31 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Jasa Lainnya (1,15 persen poin); Perdagangan (0,81 persen poin); serta Jasa Perusahaan (0,16 persen poin).

Kebijakan pencegahan dan percepatan penangan Covid-19 dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan mobilitas dan aktivitas, *Work From Home (WFH)*, sekolah dari rumah, dan sebagainya, telah berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang besar. Gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. Selain itu, ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya.

Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan data sampai dengan akhir April 2020 terdapat sejumlah 1.674 perusahaan yang terkena dampak yang menyebabkan pekerja dirumahkan atau di-PHK sebanyak 69.260 pekerja. Berikut data yang menunjukkan besaran pekerja yang dirumahkan dan di-PHK.

Tabel 3.3
Pekerja Yang Dirumahkan dan PHK Dampak Covid-19 di Jawa Barat

NO.	Penyampaian laporan (sampai dengan)	Jumlah Perusahaan yang terdampak	Jumlah Pekerja	Jumla Perusahaan yang Merumahkan		Jumlah Perusahaan yang mem-PHK		Jumlah Pekerja yang dirumahkan dan di-PHK
				Perusahaan	Pekerja	Perusahaan	Pekerja	
1	5-Apr-20	1.476	53.465	88	14.053	238	5.047	**19.100**
2	10-Apr-20	1.476	53.465	314	26.330	331	7.583	**33.913**
3	15-Apr-20	1.510	61.084	592	38.681	349	11.260	**49.941**
4	20-Apr-20	1.525	66.104	606	43.647	351	11.314	**54.961**
5	25-Apr-20	1.605	73.991	666	50.187	375	12.661	**62.848**
6	30-Apr-20	1.674	80.403	717	55.508	395	13.752	**69.260**

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Bappeda

CATATAN:

1. Jumlah perusahan yang terdampak sampai dengan tanggal 30 April 2020 sejumlah 1.674 perusahaan, namun yang sudah melengkapi data By Name By Address sebanyak 1.095 perusahaan.
2. Dari jumlah Pekerja yang dirumahkan dan di-PHK sebanyak 69.260, yang memiliki data lengkap by name by address tenaga kerjanya baru mencapai 55.915 pekerja

Data menunjukkan pekerja yang paling banyak dirumahkan berada di Wilayah IV yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi sebanyak 16.782 pekerja, dan di Wilayah I yang meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Sukabumi sebanyak 16.556 pekerja. Sementara PHK terbanyak terjadi di wilayah II yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi sebanyak 7.576 pekerja. Lebih rinci mengenai pekerja yang dirumahkan atau di PHK akibat pandemi Covid-19 berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.4
Pekerja yang Dirumahkan dan PHK Dampak Covid-19 di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

KABUPATEN KOTA	DAMPAK COVID 19					
	PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN STATUS PEKERJANYA	JUMLAH PEKERJA YANG DILAPORKAN	RINCIAN			
			DIRUMAHKAN		PHK	
			PERUSAHAAN	PEKERJA	PERUSAHAAN	PEKERJA
Wilayah I	291	19.368	248	16.556	49	2.812
Kabupaten Bogor	59	5.382	39	5.012	22	370
Kabupaten Cianjur	47	2.958	47	2.947	1	11
Kabupaten Sukabumi	13	5.156	7	3.482	6	1.674
Kota Bogor	40	3.405	38	3.282	5	123
Kota Depok	124	2.190	116	1.817	8	373
Kota Sukabumi	8	277	1	16	7	261
Wilayah II	90	21.363	40	13.787	55	7.576
Kabupaten Bekasi	19	306	10	155	10	151
Kabupaten Karawang	21	1.889	7	1.140	18	749
Kabupaten Subang	20	11.246	12	5.570	8	5.676
Kabupaten Purwakarta	24	7.826	8	6.864	16	962
Kota Bekasi	6	96	3	58	3	38
Wilayah III	84	5.128	62	3.805	23	1.323
Kabupaten Cirebon	25	782	21	464	4	318
Kabupaten Indramayu	21	493	16	278	5	215
Kabupaten Kuningan	6	220	5	218	1	2
Kabupaten Majalengka	14	3.075	13	2.579	2	496
Kota Cirebon	18	558	7	266	11	292
Wilayah IV	353	18.693	94	16.782	260	1.911
Kabupaten Bandung	38	7.528	29	6.919	10	609
Kabupaten Bandung Barat	238	1.136	7	277	231	859
Kabupaten Sumedang	7	1.651	6	1.613	1	38
Kota Bandung	54	2.046	39	1.924	15	122
Kota Cimahi	16	6.332	13	6.049	3	283
Wilayah V	277	4.708	273	4.578	8	130

KABUPATEN KOTA	DAMPAK COVID 19					
	PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN STATUS PEKERJANYA	JUMLAH PEKERJA YANG DILAPORKAN	RINCIAN			
			DIRUMAHKAN		PHK	
			PERUSAHAAN	PEKERJA	PERUSAHAAN	PEKERJA
Kabupaten Ciamis	34	1.176	34	1.175	1	1
Kabupaten Garut	26	1.294	24	1.218	2	76
Kabupaten Pangandaran	178	1.238	175	1.207	3	31
Kabupaten Tasikmalaya	15	133	15	133	-	-
Kota Banjar	9	137	7	115	2	22
Kota Tasikmalaya	15	730	18	730	-	-
TOTAL JABAR	**1.095**	**69.260**	**717**	**55.508**	**395**	**13.752**

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Bappeda

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar perusahaan lebih memilih opsi merumahkan pekerjanya dibandingkan untuk melakukan PHK. Jumlah perusahaan terbanyak yang merumahkan pekerjanya berada di wilayah IV Priangan Barat dengan jumlah pekerja sebanyak 16.782 dari 18.693 pekerja yang dilaporkan. Sedangkan perusahaan yang banyak melakukan PHK pekerjanya berada di wilayah II, sebanyak 7.576 pekerja dari 21.363 pekerja yang dilaporkan.

Perkembangan data ketenagakerjaan pada tanggal 15 Juni 2020 dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat menginformasikan sebanyak 1.970 perusahaan yang terdampak akibat COVID-19, dengan total pekerja/buruh yang terdampak sebanyak 111.791 orang. Grafik di bawah menunjukkan persentase pekerja/buruh yang dirumahkan sebagai dampak COVID-19 per sektor usaha.

Gambar 3.1
Persentase Pekerja/Buruh yang Dirumahkan dampak COVID-19 Per Sektor Usaha (%)
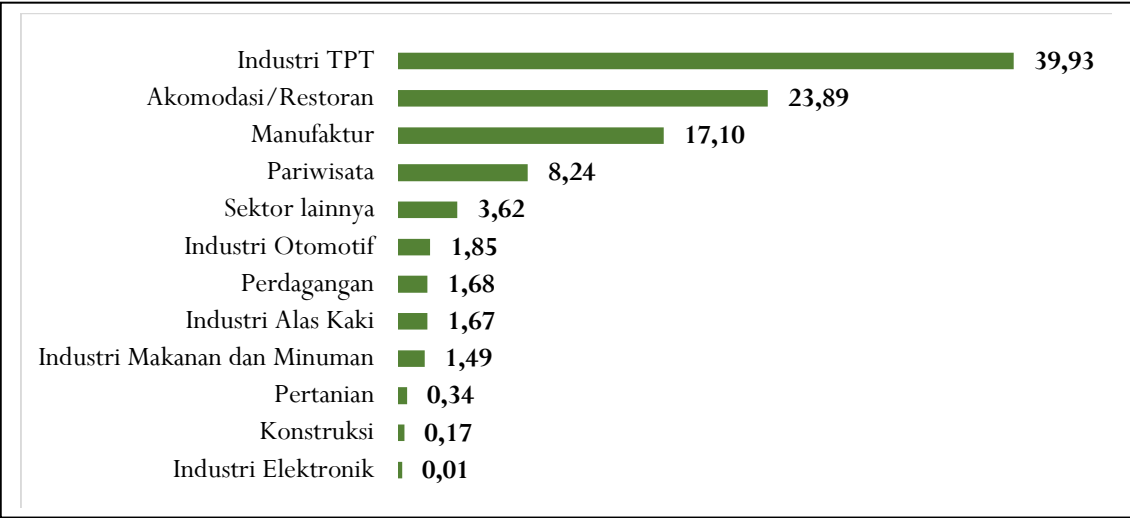
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 15 Juni 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi COVID-19 adalah sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan persentase sebesar 39,93 persen, kemudian sektor akomodasi/restoran sebesar 23,89 persen dan sektor usaha manufaktur sebesar 17,10 persen. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah sektor industri elektronik dan sebesar kontruksi dengan persentase masing-masing sebesar 0,01 persen dan 0,17 persen. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan yang terdampak COVID-19 dan mengadaptasi kebijakan merumahkan pekerja/buruh adalah sebanyak 974 perusahaan dengan total 79.477 pekerja buruh yang terdampak.

Gambar 3.2
Persentase Pekerja/Buruh yang di PHK dampak COVID-19
Per Sektor Usaha (%)
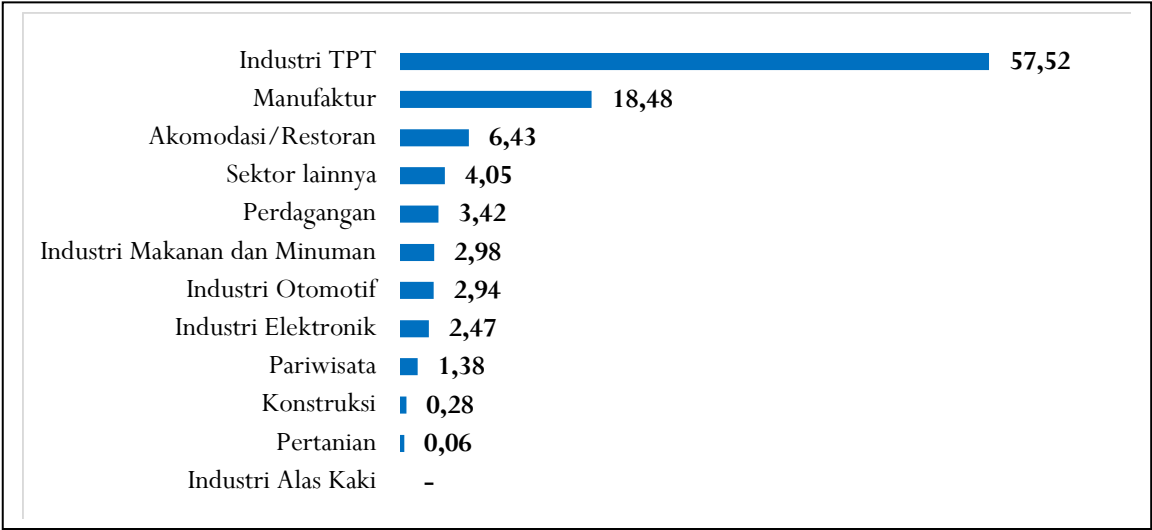
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 15 Juni 2020

Kebijakan lain selain merumahkan pekerja/buruh sebagai akibat dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh. Dari total sebanyak 1.968 perusahaan terdampak, sebanyak 454 perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerja/buruh dengan total 18.966 pekerja/buruh mengalami PHK. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui informasi mengenai persentase pekerja/buruh yang terkena PHK per sektor usaha. Industri tekstil dan produk tekstil memiliki persentase paling besar dalam jumlah pekerja/buruh yang di-PHK akibat dampak COVID-19 sebanyak 57,52 persen disusul dengan sektor manufaktur dengan persentase sebesar 18,48 persen dan sektor akomodasi/restoran sebesar 6,43 persen. Sektor konstruksi, pertanian, dan industri alas kaki memiliki

persentase yang sangat kecil dalam pemberlakuan PHK terhadap pekerja/buruh dengan persentase kurang dari 1 persen.

Dampak dari COVID-19 juga mempengaruhi penganggaran APBD Tahun 2020 yang sudah mengalami perubahan keempat. Kebijakan anggaran untuk stimulus penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk *refocusing* APBD Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

1. Bantuan tunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sebesar Rp150.000/KK/Bulan selama 4 bulan dengan total anggaran Rp971 miliar.
2. Program Padat Karya dengan total anggaran Rp11,75 triliun, yang terdiri dari: a. Dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa; b. Kegiatan di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat; dan c. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
3. Bantuan pangan nontunai berupa bantuan sembako kepada masyarakat miskin dan rentan miskin senilai Rp350.000/KK/bulan selama 4 bulan dengan total anggaran Rp2,31 triliun.
4. Menurunkan beban masyarakat miskin dan rentan miskin dengan total anggaran Rp1,32 triliun, yang diperuntukkan bagi: a. Percepatan biaya pendidikan menengah universal; b. PBI JKN Kesehatan; dan c. Bantuan sosial.
5. Bantuan kepada keluarga ODP, PDP, dan terinfeksi COVID-19. Penyediaan untuk 27.000 KK dengan total anggaran Rp8,75 miliar.

Dampak COVID-19 juga mempengaruhi sektor lain di Jawa Barat, diantaranya sektor pariwisata dan UMKM yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Sektor Pariwisata

Dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata karena penutupan destinasi wisata berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan Provinsi Jawa Barat pada bulan Mei 2020, sebagai berikut:

- Penutupan 411 destinasi wisata dengan jumlah tenaga kerja terdampak 5.179 orang.
- Penutupan 1.076 hotel dengan jumlah tenaga kerja terdampak 12.143 orang.
- Usaha ekonomi kreatif yang berhenti berproduksi sebanyak 626 unit, dengan jumlah tenaga kerja terdampak 14.991 orang.
- Usaha biro perjalanan yang berhenti aktivitasnya sebanyak 251 unit dengan jumlah tenaga kerja terdampak 1.107 orang.
- Jumlah tenaga seni dan budaya yang terdampak 15.034 orang.

- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat Maret 2020 mencapai 28,73 persen, turun 17,74 poin dibandingkan TPK Februari 2020 yang mencapai 46,47 persen. TPK hotel bintang dan nonbintang keduanya mengalami penurunan. TPK hotel bintang pada Maret 2020 sebesar 34,55 persen, turun 15,60 poin dibandingkan TPK Februari 2020 yang mencapai 50,15 persen. TPK tertinggi menurut kelas hotel bintang tercatat pada hotel bintang 2 sebesar 41,30 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 sebesar 21,56 persen. TPK hotel nonbintang mencapai 17,89 persen, turun 12,98 poin dibandingkan Februari 2020 yang mencapai 30,87 persen. TPK tertinggi untuk hotel nonbintang terjadi pada hotel dengan kelompok kamar >40 sebesar 19,71 persen. Sedangkan TPK hotel nonbintang yang terendah sebesar 7,19 persen terjadi pada hotel dengan kelompok kamar <10.
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada bulan Mei mulai menunjukkan perkembangan positif menjadi 13,35 persen naik sebesar 5,33 poin dari bulan April 2020 (mtm) namun jika dibandingkan dengan bulan Mei 2019 (yoy) masih menunjukkan penurunan sebesar 23,12 poin.

Gambar 3.3
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2020
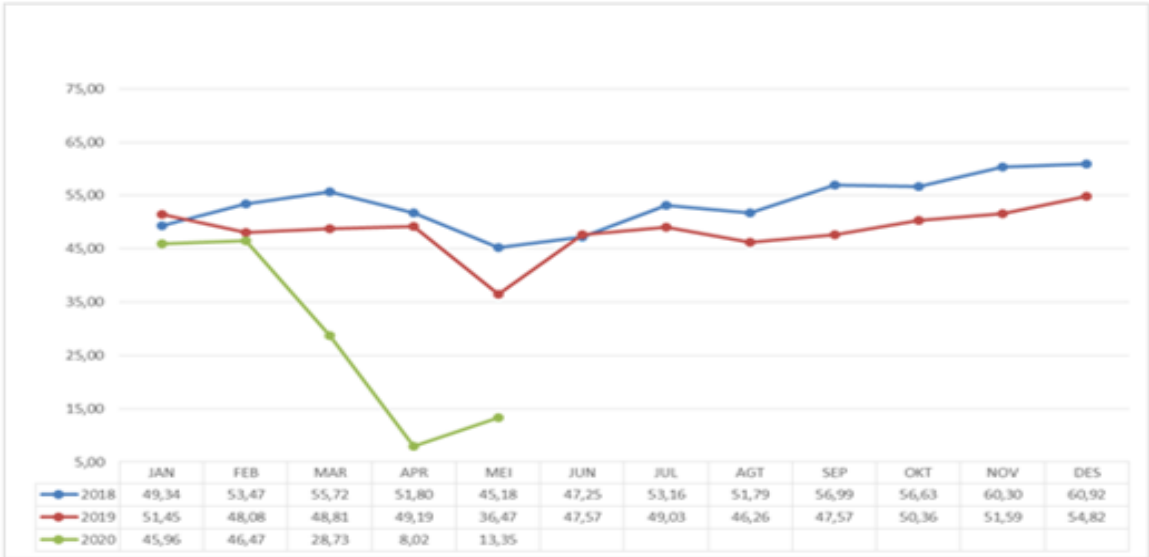
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Update data 1 Juli 2020

Gambar 3.4
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Berdasarkan Jenis Hotel di Provinsi Jawa Barat

	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20
Non Bintang	35,90	28,26	32,90	34,13	36,35	36,51	34,33	32,73	34,40	35,35	30,87	17,89	5,13	13,97
Total	49,19	36,47	42,57	49,03	46,26	47,57	50,36	51,59	54,82	45,96	46,47	28,73	8,02	13,40
Bintang	53,17	38,79	53,13	54,69	49,58	50,60	56,07	58,95	62,40	47,06	50,15	34,55	10,77	12,92
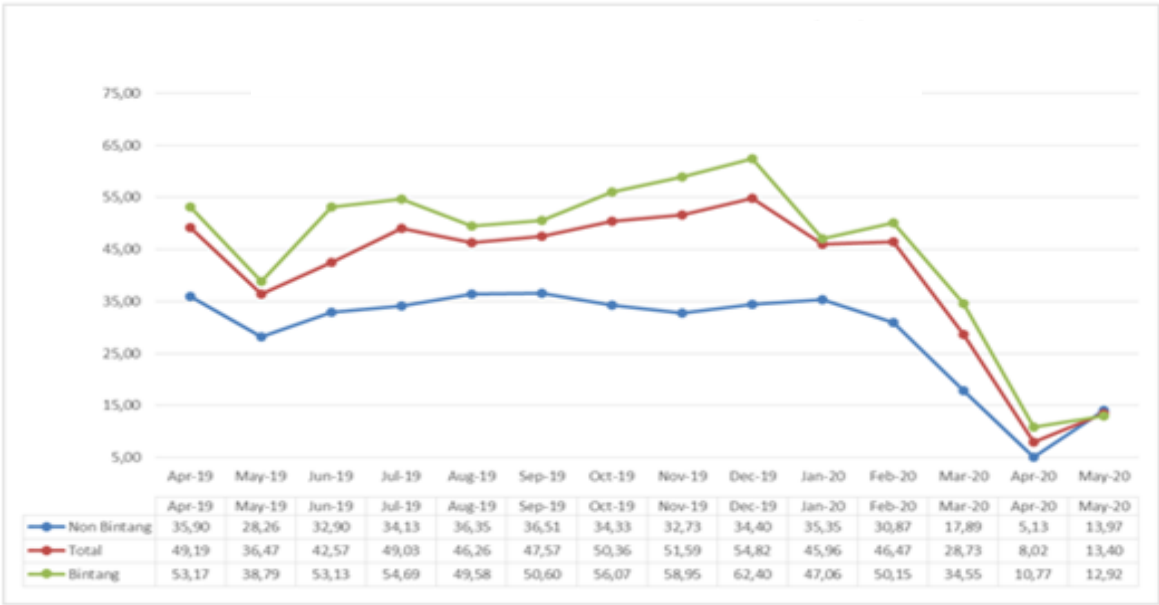
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Update data 1 Juli 2020

- Rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang Maret 2020 tercatat 1,83 hari dan di hotel nonbintang selama 1,18 hari. Tamu asing menginap di hotel bintang rata-rata selama 3,70 hari dan di hotel nonbintang selama 2,03 hari, sedangkan tamu asal Indonesia menginap rata-rata selama 1,78 hari di hotel bintang dan 1,18 hari di hotel nonbintang.
- Tamu mancanegara yang datang melalui Bandara Husein Sastranegara Maret 2020 sebanyak 5.784 orang turun 53,65 persen dibanding Februari 2020 yang tercatat 12.451 orang. Bandara Bandara Kertajati yang mulai Februari 2020 mencatat kedatangan wisman, Maret 2020 dihentikan sementara. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap semua sendi kehidupan terlebih Sektor Pariwisata. Sementara wisman melalui Pelabuhan Muarajati, seluruhnya *crew* kapal sejumlah 96 orang, turun 22,58 persen.
- Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Barat masih dalam tren negatif pada bulan Mei 2020 hanya 79 orang. Turun -15,05 persendari bulan April 2020 (mtm) dan -99,03 persen dari bulan Mei 2019 (yoy).

Gambar 3.5
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat
Tahun 2019 – 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Update data 1 Juli 2020

b. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami pertumbuhan kredit sebesar 10,34 persen (y-o-y) pada Februari 2020, pertumbuhan terjadi pada kredit UMKM sektor industri pengolahan dan konstruksi. Banyak UMKM di Jawa Barat yang merugi dan tutup disebabkan oleh penyebaran COVID-19. UMKM yang terdampak COVID-19 sekitar 80 persen. Adapun 20 persen UMKM yang terdampak adalah yang menggunakan *platform online*. UMKM yang paling terdampak diantaranya *fashion*, kerajinan tangan, jasa transportasi *online*, hingga kuliner (Ketua Asosiasi UMKM pada kumparan.com, 22 Maret 2020).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat mengajukan restrukturisasi kredit/keringanan dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun untuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh bank/*leasing*) sebagaimana diatur oleh PO OJK No.11/POJK.03/2020 mencapai hampir 77 persen dari total UMKM di Jawa Barat (sektor-sektor terkait pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan) (BI, 2020).

Risiko kredit UMKM tercermin dari *nonperforming loan* (NPL) atau kredit macet. Pada April 2020 NPL UMKM di Jawa Barat adalah 4,20 persen. Risiko NPL meningkat seiring dengan kebijakan pembatasan aktivitas usaha oleh pemerintah selama periode PSBB.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan beberapa stimulus kebijakan, dimana hasil dari penerapan kebijakan tersebut diantaranya adalah 2.054.331 debitur terdampak COVID-19 di Jawa Barat telah mendapatkan restrukturisasi dengan *outstanding* sebesar Rp102,02 Triliun. Dari total tersebut, 88 pesen (1,81 Juta debitur) diantaranya adalah debitur UMKM dengan nilai *outstanding* Rp54,15 Triliun. Berikut sebaran debitur dan *outstanding* restrukturisasi di Jawa Barat.

Tabel 3.5
Sebaran Debitur dan *Outsanding* Restrukrisasi di Jawa Barat

No	Lembaga Jasa Keuangan	Debitur	Outstanding
I. Perbankan Jawa Barat		1.521.276	87.995,21
1	Bank Umum/Syariah KP Jawa Barat	3.230	1.030,04
2	Bank Umum/Syariah KP di Luar Jawa Barat	1.415.530	85.827,96
3	BPR/BPRS di Jawa Barat	102.516	1.137,21
II. Lembaga Pembiayaan Jawa Barat*)		533.055	14.023,70
Total (I+II)		**2.054.331**	**102.018,92**

Sumber: OJK Kantor Regional II Jawa Barat, diolah (15 Juni 2020)

Sementara data penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada bulan Juni 2020 (berdasarkan data SIKP sampai dengan tanggal 27 Juni 2020) adalah sebesar Rp472,78 Milyar, masih mengikuti tren penurunan sejak bulan Februari dan Maret 2020 dan terendah jika dibandingkan dengan penyaluran pada bulan Juni di Tahun 2018 dan 2019.

Gambar 3.6
Kondisi Penyaluran KUR Jawa Barat Tahun 2018 – 2019
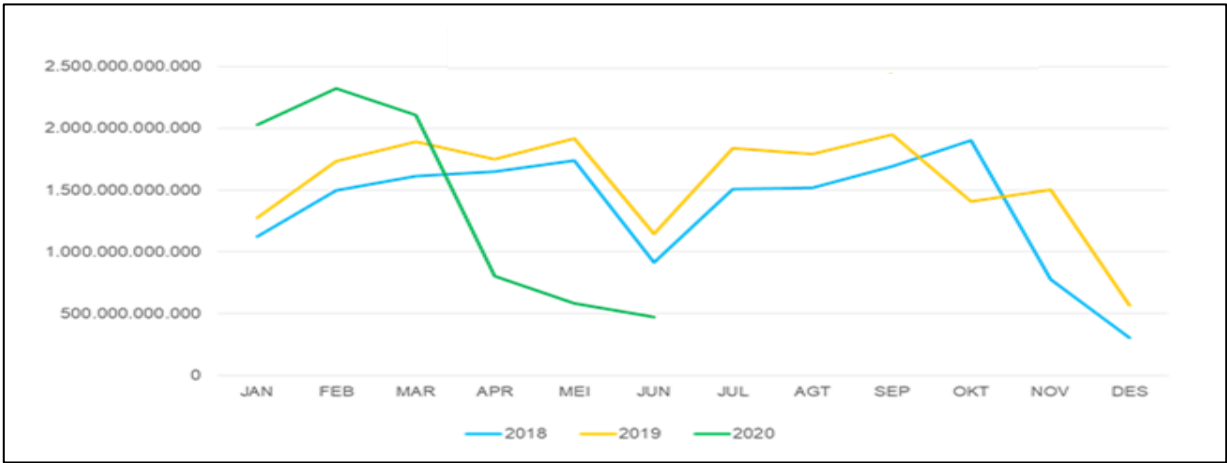
Sumber: OJK Kantor Regional II Jawa Barat, diolah (15 Juni 2020)

Selain tren penurunan, penyaluran KUR ini dapat menjadi salah satu indikator lesunya sektor riil di segmen UMKM, hal ini dapat diakibatkan juga oleh keterbatasan-keterbatasan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul pada sisi debitur maupun bank/lembaga penyalur KUR akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

3.3 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

Pada subbab ini disajikan telaahan beberapa kebijakan nasional yang pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan. Kebijakan nasional yang dimaksud dibatasi pada hal-hal terkait perencanaan, dan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana diketahui, setelah Perda RPJMD Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada Maret 2019, terdapat beberapa kebijakan nasional yang diterbitkan oleh Pemerintah. Untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta dalam rangka menjalankan amanat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional tersebut.

3.3.1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Beberapa kebijakan Pemerintah mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Terdapat beberapa perbedaan atau perubahan fundamental terkait struktur atau komponen APBD baik Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah. Belanja tidak lagi terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) namun Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Transfer.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah.

   Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebab belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

   Peraturan ini disusun untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dengan mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung SIPD. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

   Beberapa hal mendasar yang diatur dalam peraturan Menteri ini yaitu adanya sub kegiatan setelah program dan kegiatan. Selain itu, dimuat pengaturan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3.3.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah

Kebijakan Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu ditelaah, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20I9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

   Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

   Peraturan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

   Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini memuat pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20I9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Gambar 3.7
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024
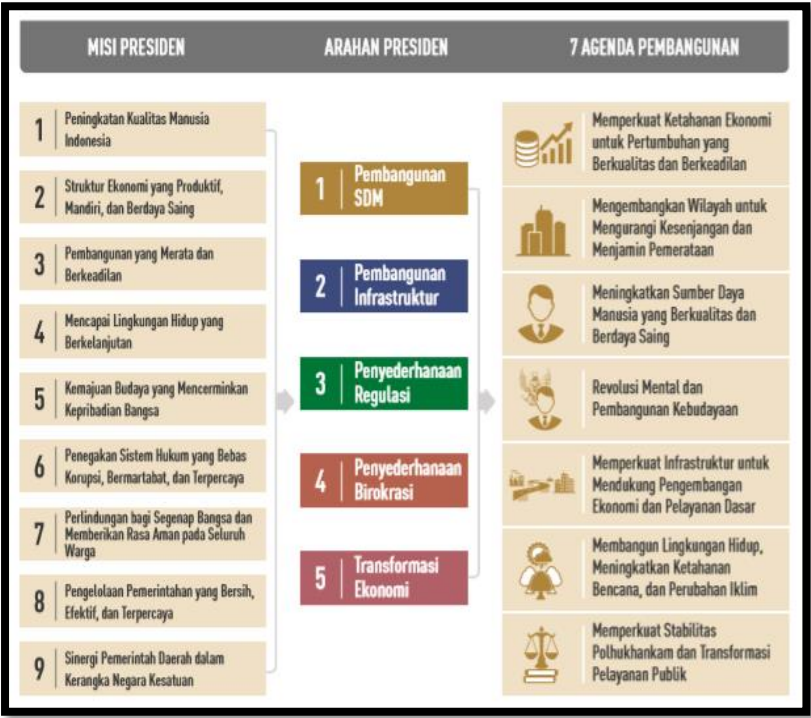
Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (*major project*). Adapun *major project* yang belokasi di Provinsi Jawa Barat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project)* di Jawa Barat Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Lokasi	Indikasi Pendanaan	Pelaksana
1	Pembangunan Science Techno Park	1. Peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi	2 Provinsi (Jawa Barat: ITB, UI, IPB;	Rp 0,8 Triliun (APBN)	Kementerian Ristek/BRIN, Kementerian

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Lokasi	Indikasi Pendanaan	Pelaksana
	(Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	2. Peningkatan kapasitas STP sebagai simpul triple-helix dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial 3. Peningkatan produk inovasi nasional	dan DIY: UGM)		Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri (ITB, IPB, UI dan UGM), Kementerian Perindustrian, Swasta
2	Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis	1. Pengembangan sistem pemantauan kualitas air yang terintegrasi 566 telemetri. 2. Peningkatan kualitas air menjadi kelas II. 3. Penurunan erosi di wilayah DAS Kritis dengan penghijauan lahan kritis sebesar 150.000 Ha. 4. Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utar		Rp 30,9 Triliun (APBN)	KemenPUPR dan Pemerintah Daerah

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3.7
Target Pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 – 2024
Dalam RPJMN

Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,64	5,40	5,40	5,50	5,70	5,90	6,00
Tingkat Kemiskinan (%)	7,45	6,91	6,31	6,07	5,70	5,24	4,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,17	7,99	7,70	7,50	7,40	7,00	6,70
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	497,02	527,29	588,95	642,36	701,87	786,74	869,23

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa-Bali dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan. Adapun prioritas pembangunan wilayah tersebut di Jawa Barat terletak pada lokasi sebagai berikut:

Tabel 3.8
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa Barat Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan		**Koridor Pemerataan**	
1	Kota Depok	1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bogor	2	Kabupaten Garut
3	Kota Bogor	3	Kabupaten Tasikmalaya
4	Kota Bekasi	4	Kota Tasikmalaya
5	Kabupaten Bekasi	5	Kabupaten Ciamis
6	Kabupaten Karawang	6	Kota Banjar
7	Kabupaten Purwakarta	7	Kabupaten Kuningan
8	Kabupaten Bandung Barat	8	Kabupaten Sukabumi
9	Kota Cimahi	9	Kota Sukabumi*
10	Kota Bandung	10	Kabupaten Pangandaran
11	Kabupaten Sumedang		
12	Kabupaten Majalengka		
13	Kabupaten Cirebon		
14	Kota Cirebon*		

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Agenda pembangunan atau yang di perencanaan tahunan (RKP) menjadi dengan Prioritas Nasional (PN) dilaksanakan dengan dukungan dari seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap PN. Disisi lain, Pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sehubungan dengan evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan telaahan terhadap RPJMN. Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program

strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Berikut ini diuraikan hasil persandingan sasaran RPJMN Tahun 20202-2024 dengan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun periodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Jawa Barat sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran nasional 1: Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif, dan Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat.
2. Sasaran nasional 2: Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, dan Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian.
3. Sasaran nasional 3: Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu: Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri; Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan.
4. Sasaran nasional 4: Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, dan Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel.

5. Sasaran nasional 5: Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk memiliki keterikaitan dengan sasaran pembangunan Jawa Barat: Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat.
6. Sasaran nasional 6: Terpenuhinya layanan dasar memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan, dan Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan.
7. Sasaran nasional 7: Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, dan Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional.
8. Sasaran nasional 8: Terwujudnya pengentasan kemiskinan memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu: Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat, dan Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri.
9. Sasaran nasional 9: Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing didukung oleh sasaran pembangunan Jawa Barat: Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan.
10. Sasaran nasional 10: Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya didukung oleh sasaran RPJMD Jawa Barat: Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal.
11. Sasaran nasional 11: Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan didukung oleh sasaran RPJMD Jawa Barat: Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal.
12. Sasaran nasional 12: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial didukung oleh sasaran RPJMD Jawa Barat yakni Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.
13. Sasaran nasional 13: Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat didukung oleh sasaran RPJMD Jawa Barat yakni Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.
14. Sasaran nasional 14: Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu: Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam

kerangka demokrasi, dan Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

15. Sasaran nasional 15: Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif didukung oleh sasaran RPJMD Jawa Barat yakni Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan.
16. Sasaran nasional 16: Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu: Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik, dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat.
17. Sasaran nasional 17: Meningkatnya konektivitas wilayah didukung oleh sasaran RPJMD Jawa Barat: Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian.
18. Sasaran nasional 18: Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan didukung oleh sasaran RPJMD Jawa Barat: Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian.
19. Sasaran nasional 19: Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien didukung oleh sasaran RPJMD Jawa Barat yakni Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok.
20. Sasaran nasional 20: Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Jawa Barat: Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel.
21. Sasaran nasional 21: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Jawa Barat: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat.
22. Sasaran nasional 22: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu: Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat.

23. Sasaran nasional 23: Pembangunan Rendah Karbon memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Jawa Barat: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
24. Sasaran nasional 24: Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Jawa Barat, yaitu: Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial; Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Tabel 3.9
Persandingan Sasaran RPJMN Dengan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat

Sasaran RPJMN		**Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat**	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		S10	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
		S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
S6	Terpenuhinya layanan dasar	S3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
		S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat	
		S6	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri
S9	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S7	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
		S4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S10	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	S10	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat	
	dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi		
S21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S22	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S23	Pembangunan Rendah Karbon	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S24	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	S8	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel
		S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Sumber: hasil analisis, 2020

Selain menelaah keterkaitan sasaran, pada bagian ini dilakukan penelaahan juga terhadap prioritas pembangunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (PN) dan prioritas Provinsi Jawa Barat (PP), maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Jawa Barat yang termuat dalam RPJMD memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN yang termuat dalam RPJMN.

Tabel 3.10
Persandingan Prioritas Nasional (PN) Dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat (PP)

Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3	Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
		PP4	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP7	Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
		PP8	Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP1	Akses pendidikan untuk semua
		PP2	Desentralisasi pelayanan kesehatan
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP5	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara

Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP6	Infrastruktur konektivitas wilayah
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP6	Infrastruktur konektivitas wilayah
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP9	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Sumber: hasil analisis, 2020

BAB IV
KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

4.1 KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD KE RKPD DAN APBD TAHUN 2019

Berdasarkan hasil pengolahan data program pada dokumen RPJMD, RKPD dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Jumlah program dalam RPJMD, RKPD, dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, sebagai berikut:
   1) RPJMD : 211 program
   2) RKPD : 211 program
   3) APBD : 211 program

b. Penjabaran program dan pagu pada RPJMD ke RKPD dan APBD Tahun 2019, dijelaskan sebagai berikut:
   1) Seluruh program di RPJMD konsisten dijabarkan ke RKPD dan APBD Tahun 2019.
   2) Tidak Terdapat program baru di RKPD maupun APBD Tahun 2019.

Gambaran konsistensi pelaksanaan program di RPJMD ke RKPD dan APBD Tahun 2020 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD dan APBD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
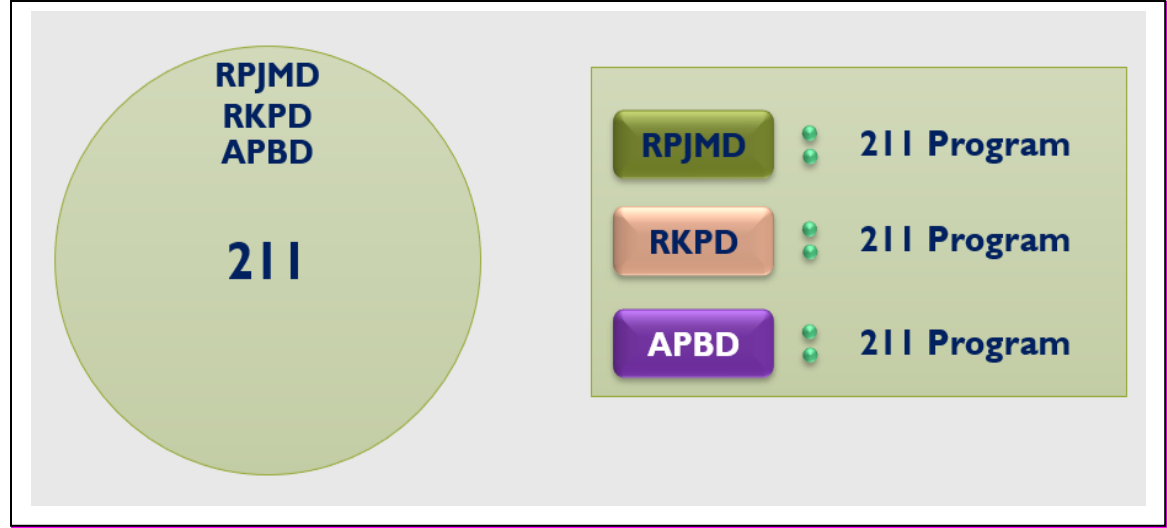
Sumber: hasil analisis, 2020

4.2 KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RPJMD KE RKPD DAN APBD TAHUN 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data program pada dokumen RPJMD, RKPD dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Jumlah program dalam RPJMD, RKPD, dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, sebagai berikut:
   4) RPJMD : 830 program
   5) RKPD : 821 program
   6) APBD : 820 program

b. Penjabaran program dan pagu pada RPJMD ke RKPD dan APBD Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:
   1) Jumlah program di RPJMD yang konsisten dijabarkan ke RKPD dan APBD yaitu 817 program atau 98,43 persen.
   2) Terdapat 10 program RPJMD (1,20 persen) yang tidak dilaksanakan di RKPD dan APBD pada Tahun 2020.
   3) Dari 821 program di RKPD, yang konsisten dijabarkan ke APBD Tahun 2020 sebanyak 819 program atau 99,76 persem.
   4) Terdapat 2 (dua) program baru yang muncul di RKPD Tahun 2020 namun tidak direncanakan di RPJMD tahun berkenaan. Dari 2 (dua) program ini, ke 2 (dua) program tersebut tidak dianggarkan dalam APBD.
   5) Terdapat 1 (satu) program baru di APBD diluar RKPD Tahun 2020.

c. Program di RPJMD Tahun 2020 yang tidak dilaksanakan di RKPD maupun APBD, yaitu:
   1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
   2) Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
   3) Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup.
   4) Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika.
   5) Program Perlindungan Hutan Daerah Kiarapayung Dinas Kehutanan.
   6) Program Pengembangan *Smart* ASN di BPSDM.
   7) Program Pengembangan Kompetensi Pemerintahan di BPSDM.

8) Program data dan Informasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPSDM.
9) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah di Sekretariat Daerah.
10) Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah di Sekretariat Daerah.

d. Program baru di RKPD yang tidak ada di RPJMD Tahun 2020, yaitu:
   1) Program penyelenggaraan statistik sektoral di Dinas Komunikasi dan Informatika
   2) Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dari 2 (dua) program baru di RKPD tersebut, semuanya dianggarkan di APBD Tahun 2020. Gambaran konsistensi pelaksanaan program di RPJMD ke RKPD dan APBD Tahun 2020 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.2
Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD dan APBD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
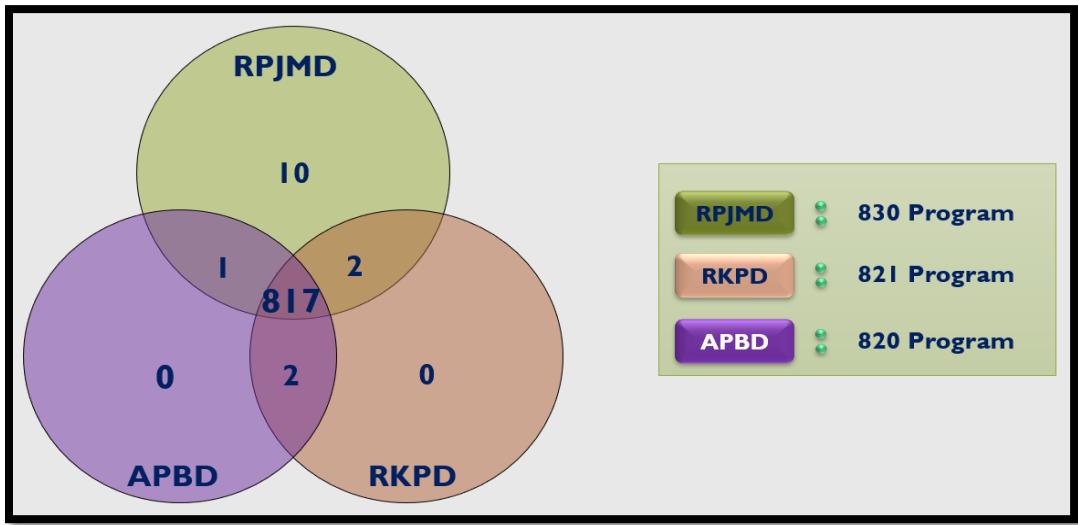
Sumber: hasil analisis, 2020

4.3 KINERJA DAN KEBIJAKAN KEUANGAN MASA LALU

4.3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2019

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2019 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Balai Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Sedangkan untuk meningkatkan dana perimbangan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; serta
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
   a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
   b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
   c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
   d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thrue*, Gerai Samsat dan *Samsat Mobile,* layanan SMS, pengembangan Samsat Outlet, dan Samsat Gendong serta e-Samsat;
   e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
   f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
   g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
   h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
   i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
   b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
   c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
   d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

Adapun kebijakan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta fungsi penunjang urusan sejumlah 8 (delapan) urusan;
2. Pendukungan terhadap program *Sustainable Development Goals (SDGs);*
3. Pendukungan terhadap RKP Tahun 2019;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan pendidikan;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rincian perhitungan fungsi kesehatan yaitu 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, dan pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.

6. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
7. Penyelenggaraan Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
8. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat dan Pajak Rokok;
9. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
10. Pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi; dan
11. Revitalisasi Cabang Dinas dan Satuan Pelayanan baru dan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.

4.3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Pada akhir Tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah walaupun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. yang kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021.

Gambar 4.3
Beberapa Peraturan yang Diterbitkan Sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
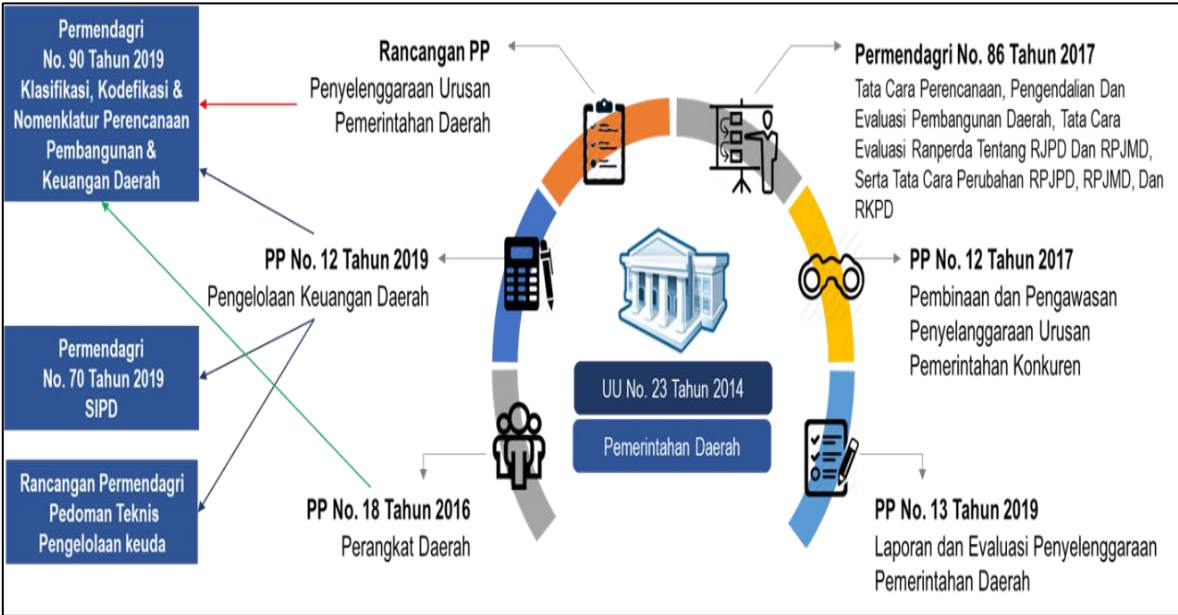
Provinsi Jawa Barat untuk perencanaan Tahun 2021 di dalam penyusunan APBD harus sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 4.4
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah
- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer
- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah
- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan

BELANJA

Belanja Operasi
- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal
- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer
- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan
- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan
- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir Tahun 2019, ada peritsiwa yang tidak diduga sebelumnya yaitu merebaknya kasus pandemi Covid-19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi Covid-19 ini.

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *Work From Home* (*WFH*) yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro.

Pandemi Covid-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan I Tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro pada perencanaan awal di RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat, diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap

penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur, dan memiliki kepastian, serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Balai Penghasil.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
   a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
   b. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
   c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
   d. Melaksanakan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan antara lain *drive thrue*, Gerai Samsat dan Samsat *Mobile,* layanan SMS, mengembangkan Samsat Outlet, dan Samsat Gendong serta Samsat J'Bret (Samsat Jawa Barat Ngabret).
   e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008.
   f. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
   g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya yaitu mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.

h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
   b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
   c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensik
   d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
   c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2020 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan proporsi Belanja Tidak Langsung maksimal 70,00 persen dari total Belanja Daerah.
2. Pemenuhan proporsi Belanja Langsung minimal 30,00 persen dari total Belanja Daerah.

3. Pelaksanaan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2019-2023, meliputi: (1) Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya; (2) Desentralisasi pelayanan kesehatan; (3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi; (4) Pengembangan destinasi dan infrastrukur pariwisata; (5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; (6) Insfrastruktur konektivitas wilayah; (7) Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa); (8) Subsidi gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); dan (9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.
4. Pemenuhan sasaran pembangunan serta target pada Tahun 2020, dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
6. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2020.
7. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/*SDGs).
8. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
9. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan

berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.

10. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Belanja daerah, dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan belanja daerah Tahun 2019. Pada Tahun 2020 belanja daerah sudah mencakup pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 13 bulan dan Tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok serta *acres*. Selain itu dianggarkan pula untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik).
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dan lain-lain.
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.
5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan obligasi daerah.

Pandemi Covid-19 telah memberi pengaruh yang besar bagi memburuknya aspek kesehatan, sosial dan ekonomi serta berdampak pada aspek-aspek lainnya. Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas penduduk selama pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020.

Begitu juga dengan Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca Pandemi Covid-19.

Dengan kebijakan keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat selama Tahun 2019 dan Tahun berjalan 2020, maka pada tabel di bawah ini disajikan realisasi keuangan daerah Tahun 2019 dan proyeksi/target Tahun 2020 setelah dilakukan pergeseran keempat dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Tabel 4.1
Realisasi dan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan 2020

KODE			URAIAN	Realisasi APBD 2019	APBD 2020	APBD 2020 (pergeseran ke-4)	Rancangan Perubahan Tahun 2020
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4			**PENDAPATAN**				
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**21.244.266.598.018**	**25.223.220.670.289**	**21.011.660.866.902**	**21.545.070.751.954**
4	1	1	Pajak Daerah	19.626.352.311.765	23.653.633.651.000	19.681.192.162.750	20.214.602.047.802
4	1	2	Retribusi Daerah	56.222.370.756	53.188.482.372	39.885.514.638	39.885.514.638
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	386.442.976.038	424.813.601.679	401.088.087.984	401.088.087.984
4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	1.175.248.939.459	1.091.584.935.238	889.495.101.530	889.495.101.530
4	**2**		**DANA PERIMBANGAN**	**14.715.372.046.649**	**16.336.732.772.500**	**15.960.322.398.000**	**15.960.322.398.000**
4	2	1	Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	1.483.785.231.865	1.612.237.954.500	1.805.890.251.000	1.805.890.251.000
4	2	2	Dana Alokasi Umum	3.212.647.404.000	3.306.552.702.000	2.994.344.725.000	2.994.344.725.000
4	2	3	Dana Alokasi Khusus	10.018.939.410.784	11.417.942.116.000	11.160.087.422.000	11.160.087.422.000
4	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**78.256.117.794**	**23.199.422.384**	**28.021.000.000**	**28.021.000.000**
4	3	1	Pendapatan Hibah	23.188.473.794	23.199.422.384	23.378.800.000	23.378.800.000
4	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	42.579.794.000		4.642.200.000	4.642.200.000
4	3		Bantuan Keuangan dari Prov/kab/kota/lainnya	12.487.850.000			

KODE			URAIAN	Realisasi APBD 2019	APBD 2020	APBD 2020 (pergeseran ke-4)	Rancangan Perubahan Tahun 2020
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			JUMLAH PENDAPATAN	**36.037.894.762.461**	**41.583.152.865.173**	**37.000.004.264.902**	**37.533.414.149.954**
5			**BELANJA**				
5	**1**		**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**28.033.579.142.382**	**34.171.929.075.666**	**34.507.909.036.355**	**34.632.508.884.830**
5	1	1	Belanja Pegawai	5.605.436.893.218	6.876.838.045.762	6.685.014.787.353	6.624.887.843.032
5	1	3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5	1	4	Belanja Subsidi	19.384.264.000	20.000.000.000	-	-
5	1	5	Belanja Hibah	8.736.051.702.117	9.974.331.583.299	10.022.532.802.704	10.022.532.802.704
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	277.421.000.000	253.750.000.000	253.750.000.000	142.250.000.000
5	1	7	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.901.869.013.400	9.241.965.155.700	8.103.305.546.425	8.598.386.442.649
5	1	8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	5.493.416.269.647	7.780.044.290.905	4.936.811.730.042	5.052.901.156.614
5	1	9	Belanja Tidak Terduga	-	25.000.000.000	4.506.494.169.831	4.191.550.639.831
5	**2**		**BELANJA LANGSUNG**	**7.799.506.984.135**	**11.823.332.151.937**	**7.004.203.590.977**	**7.590.206.173.447**
5	2	1	Belanja Pegawai	283.317.579.553	392.183.317.888		
5	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	4.985.841.862.221	6.747.248.523.295		
5	2	3	Belanja Modal	2.530.347.542.361	4.683.900.310.754		
			JUMLAH BELANJA	**35.833.086.126.517**	**45.995.261.227.603**	**41.512.112.627.332**	**42.222.715.058.277**
			DEFISIT	**204.808.635.944**	**(4.412.108.362.430)**	**(4.512.108.362.430)**	**(4.689.300.908.323)**

KODE			URAIAN	Realisasi APBD 2019	APBD 2020	APBD 2020 (pergeseran ke-4)	Rancangan Perubahan Tahun 2020
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.161.292.271.179**	**4.512.108.362.430**	**4.512.108.362.430**	**4.689.300.908.323**
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	3.060.677.232.835	4.512.108.362.430	4.512.108.362.430	3.289.300.908.323
6	1	4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	1.400.000.000.000
6	1	8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	100.615.038.344	-	-	-
6	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**76.799.998.800**	**100.000.000.000**	**-**	**-**
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
6	2	2	Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	76.799.998.800	100.000.000.000	-	-
6	2	5	Dana Bergulir	-	-	-	-
			PEMBIAYAAN NETTO	**3.084.492.272.379**	**4.412.108.362.430**	**4.512.108.362.430**	**4.689.300.908.323**
			Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	3.289.300.908.323	-	-	-

Sumber:Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

BAB V
CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

5.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAN IKU DAERAH

Indikator Makro dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 5.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,42-71,91	72,03	100,85
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,5	1,30	113,33
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,66-6,90	6,82	101,16
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,0-7,9	7,99	100,13
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,4-5,8	5,07	87,41
6	Indeks Gini	Poin	0,38-0,39	0,398	97,95

Sumber:
1. Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Bappeda
2. LKPJ Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Bappeda

Capaian indikator makro RPJMD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 menunjukkan 66,67 persen melampaui target (>100 persen) dan sisanya belum mencapai target. Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Kualitas hidup manusia di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2019, IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 72,03. Angka ini meningkat 0,739 poin dibandingkan dengan Tahun 2018 yang sebesar 71,30 Saat ini sudah diatas IPM Nasional yang sebesar 71,92. Kondisi ini

menunjukkan bahwa capaian IPM Tahun 2019 Jawa Barat diatas atau melampaui target di RPJMD dan RKPD Tahun 2019.

Sejak Tahun 2016 IPM Jawa Barat berada pada status "tinggi", dan saat ini menempati peringkat ke-10 secara nasional. Dibawah DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Banten, dan Sumatera Barat. Pertumbuhan IPM Jawa Barat Tahun 2019 sebesar 1,02 persen dibanding Tahun 2018. Peningkatan IPM Tahun 2019 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM.

b. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 mencapai 5,07 persen, melambat dibanding Tahun 2018 sebesar 5,66 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa *Real Estate* sebesar 9,54 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 6,97 persen. Capaian tersebut dibawah dari angka yang ditargetkan di RPJMD maupun RKPD Tahun 2019 yaitu 5,4-5,8 persen.

c. Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat turun menjadi 7,99 persen pada Agustus 2019 dari 8,17 pada tahun sebelumnya. Angka ini berada pada target TPT pada dokumen RPJMD maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang berkisar 8,0-7,9. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 23,80 juta orang, naik 1,17 juta orang dibanding Agustus 2018. Sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang juga meningkat sebesar 2,15 persen poin dari 62,92 persen pada Agustus 2018.

   Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 14,53 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah sebesar 4,26 persen terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke Bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 14,53 persen pada jenjang pendidikan SMK. Dengan demikian, TPT tersebut cukup terkendali sebab berada dibawah target pada dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2019.

d. Gambaran ketimpangan pendapatan di Jawa Barat diwakili oleh indikator indeks gini. Berdasarkan data September 2019, indeks gini Jawa Barat mencapai 0,398. Angka ini mencapai target indeks gini di RPJMD dan RKPD Tahun 2019 yakni sebesar 0,38-0,39.

   Nilai Gini Ratio mengalami penurunan yakni dari 0,402 menjadi 0,398. Jika dilihat berdasarkan wilayah, nilai Gini Ratio di perkotaan mengalami penurunan menjadi

0,408 dari 0,410 pada periode sebelumnya begitu pula di perdesaan mengalami penurunan dari 0,319 menjadi 0,318.

e. Persentase penduduk miskin di Jawa Barat Tahun 2019 sebesar 6,821 persen atau sebanyak 3,38 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, maka persentase penduduk miskin Jawa Barat Tahun 2019 turun signifikan dari 7,25 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,54 juta jiwa. Capaian Persentase penduduk miskin Jawa Barat Tahun 2019 melampaui target di RPJMD dan RKPD Tahun 2019 sebesar 6,66–6,90 persen.

Selain capaian indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Barat, berikut ini juga disajikan realisasi Indiator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, dari 29 IKU terdapat 16 indikator (55,17 persen) yang melampaui target, 2 (dua) indikator (6,90 persen) yang mencapai target, 7 (tujuh) indikator (24,14 persen) yang belum tercapai, dan 4 (empat) indikator (13,79 persen) yang tidak ada tersedia data realisasinya sampai laporan ini disusun.

Gambar 5.1
Rekap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
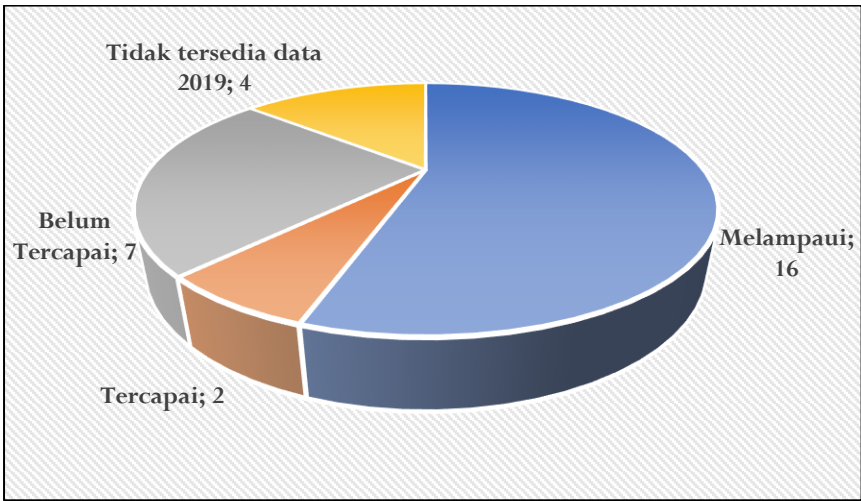
Bila dilihat pada tabel di bawah, walaupun masih terdapat 7 (tujuh) indikator yang belum mencapai targetnya, namun hampir seluruhnya memiliki tingkat capaian diatas 92 persen bahkan ada yang hampir mencapai 100 persen. Dengan demikian, bila menggunakan standar predikat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka capaiannya masuk predikat **Sangat Tinggi** (91 persen ≤ 100 persen). Lebih rinci mengenai target, realisasi dan tingkat capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,67 – 74,87	72,85	98,89	IKU Pemerintah Daerah
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,34	70,20 (2018)		IKU Pemerintah Daerah
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,82	89,26	99,38	IKU Pemerintah Daerah
4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,28	8,37	101,09	IKU Pemerintah Daerah
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,15	12,48	94,90	IKU Pemerintah Daerah
6	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	165	152,13	107,80	IKU Pemerintah Daerah

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
7	Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)	Triliun Rupiah	2.288,75	2.125,16	92,85	IKU Pemerintah Daerah
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	poin	82,4	89,00	108,01	IKU Pemerintah Daerah
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	poin	113,11	112,36	99,34	IKU Pemerintah Daerah
10	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,30-3,00	6,84	297,39	IKU Pemerintah Daerah
11	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,63	4,04	153,61	IKU Pemerintah Daerah
12	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3	7,51	250,33	IKU Pemerintah Daerah
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	495,4	535,72	108,14	IKU Pemerintah Daerah
14	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	21	21,10	100,48	IKU Pemerintah Daerah
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	100,00	IKU Pemerintah Daerah
16	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	50	61,22	122,44	IKU Pemerintah Daerah
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,6 - 69	68,5	99,85	Indikator Makro
18	Indeks Demokrasi	Poin	68,79 - 70,78	65,50 (2018)		Indikator Makro
19	Indeks Kebahagiaan	Poin	70-71	69,58 (2017)		Indikator Makro
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	53,63	49 (2018)		IKU Pemerintah Daerah
21	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	16,63	17,43	104,81	IKU Pemerintah Daerah
22	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	70-71	77,50	109,15	IKU Pemerintah Daerah
23	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	41-43	46,13	107,28	IKU Pemerintah Daerah
24	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ Kapita	1.300	1320	101,54	IKU Pemerintah Daerah
25	Indeks Desa Membangun	Poin	0,65	0,67	103,08	IKU Pemerintah Daerah
26	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	0	100,00	IKU Pemerintah Daerah

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	49,76	52,12	104,74	IKU Pemerintah Daerah
28	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,8	3,85	137,50	IKU Pemerintah Daerah
29	Indeks Penggunaan Air	Poin	1,1923	1,1920	99,97	IKU Pemerintah Daerah

Sumber:
1. Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Bappeda
2. LKPJ Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Bappeda

Keterangan:

Melampaui
Tercapai
Belum Tercapai
Tidak tersedia data

5.2 CAPAIAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.2.1 Tingkat *Impact*

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu IKK tingkat dampak (*impact*) dan IKK tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat dampak (*impact*) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Barat tidak hanya diindikasikan oleh IKU pemerintah daerah, namun juga sangat ditentukan oleh pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang menjadi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/*Outcome* di Bab VIII RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi IKK yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (*impact*) Tahun 2019 berdasarkan tingkat capaiannya. Dari 211 IKK tingkat *impact* Tahun 2019, yang memiliki capaian kinerja **Melampaui** sebanyak 97

indikator atau 45,97 persen, **Tercapai** sebanyak 42 indikator atau 19,91 persen, **Belum Tercapa**i sebesar 57 indikator atau 27,01 persen, dan Tidak Tersedia Data sebanyak 15 indikator atau 7,11 persen.

Gambar 5.2
Rekap Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
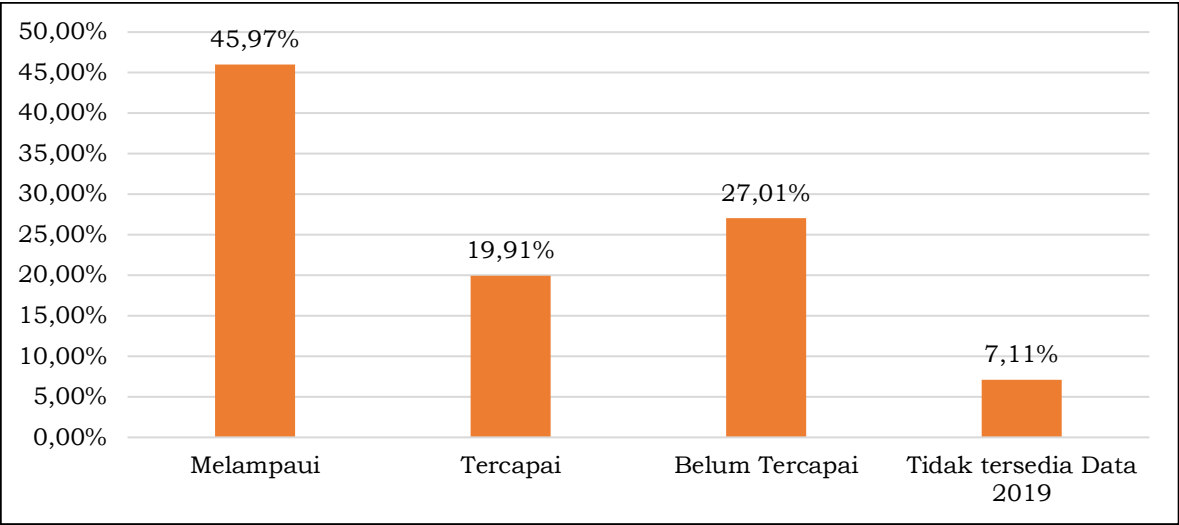
Sumber: hasil pengolahan data, 2020

Capaian IKK tingkat *impact* Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 menunjukkan masih perlu upaya dan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya target Indikator makro, IKU Pemda, dan IKU perangkat daerah dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara rinci realisasi dan tingkat capaian masing-masing IKK tingkat *impact* disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.3
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (*Impact*) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,42-71,91	72,03	100,85	Indikator Makro
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,5	1,30	113,33	Indikator Makro
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,66-6,90	6,91	99,86	Indikator Makro
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,0-7,9	7,99	100,13	Indikator Makro
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,4-5,8	5,07	87,41	Indikator Makro
6	Indeks Gini	Poin	0,38-0,39	0,398	97,95	Indikator Makro

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
7	Angka Harapan Hidup	tahun	73,67 – 74,87	72,85	98,89	IKU Pemerintah Daerah
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,34	70,20 (2018)		IKU Pemerintah Daerah
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,82	89,26	99,38	IKU Pemerintah Daerah
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,28	8,37	101,09	IKU Pemerintah Daerah
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,15	12,48	94,90	IKU Pemerintah Daerah
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	165	152,13	107,80	IKU Pemerintah Daerah
13	Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)	Triliun Rupiah	2.288,75	2.125,16	92,85	IKU Pemerintah Daerah
14	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	poin	82,4	89,00	108,01	IKU Pemerintah Daerah
15	Nilai Tukar Petani (NTP)	poin	113,11	112,36	99,34	IKU Pemerintah Daerah
16	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,30-3,00	6,84	297,39	IKU Pemerintah Daerah
17	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,63	4,04	153,61	IKU Pemerintah Daerah
18	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3	7,51	250,33	IKU Pemerintah Daerah
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	495,4	535,72	108,14	IKU Pemerintah Daerah
20	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	21	21,10	100,48	IKU Pemerintah Daerah
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	100,00	IKU Pemerintah Daerah
22	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	50	61,22	122,44	IKU Pemerintah Daerah
23	Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Indeks	3,51-4 (Baik)			IKU Dinas Pendidikan
24	APM SMA/SMK/SMLB	Persen	66,65	65,00	97,52	IKU Dinas Pendidikan
25	Rata-Rata Nilai ujian Nasional SMA/SMK	Nilai	58.50 (SMA IPA), 56.80 (SMA IPS), 59.30 (SMK)			IKU Dinas Pendidikan
26	Ratio Kematian Ibu	per 100.000 KH	86	78,30	91,05	IKU Dinas Kesehatan
27	Ratio Kematian Bayi	per 1000 KH	5,2	3,28	63,08	IKU Dinas Kesehatan
28	Prevalensi Stunting	Persen	27,2	26,21	96,36	IKU Dinas Kesehatan
29	Persentase Penyehatan Lingkungan Terhadap Akses Jamban Sehat	Persen	75	72,39	96,52	IKU Dinas Kesehatan
30	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS >60%	Persen	40,7	40,70	100,00	IKU Dinas Kesehatan
31	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	90	81,80	90,89	IKU Dinas Kesehatan
32	Prevalensi Hipertensi	Persen	39	39,60	101,54	IKU Dinas Kesehatan
33	Persentase Warga Negara Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100,00	100,00	IKU Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
34	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persen	94,76	95,89	101,19	IKU Dinas Kesehatan
35	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	Persen	90	90,00	100,00	IKU Dinas Kesehatan
36	Persentase Penduduk Yang Mendapat Jaminan Kesehatan Menuju *Universal Health Coverage*	Persen	85	84,46	99,36	IKU Dinas Kesehatan
37	Persentase aksesibilitas menuju V-9upervi potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Persen	2,49	1,35	54,22	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
38	Tingkat kemantapan jalan	Persen	91,48	91,90	100,46	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
39	Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Persen	79,25	72,10	90,98	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
40	Indeks Penggunaan Air (IPA)	Poin	1,1923	1,19	99,97	IKU Dinas Sumber Daya Air
41	Persentase Peningkatan kapasitas V-9upervi sumber daya air	Persen	0,31	0,29	93,55	IKU Dinas Sumber Daya Air
42	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	52,31	52,20	99,79	IKU Dinas Sumber Daya Air
43	Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air	Persen	50,00	50,00	100,00	IKU Dinas Sumber Daya Air
44	Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang ditangani	Persen	5,00	5,00	100,00	IKU Dinas Sumber Daya Air
45	Rasio permukiman layak	Rasio	0,9952	1,00	100,00	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
46	Cakupan akses infrastruktur dasar permukiman	Persen	74	74,57	100,77	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
47	Tingkat kualitas V-9upervi permukiman	Persen	6,86	6,39	93,15	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
48	Tingkat ketersediaan rumah layak	Persen	91,63	91,70	100,08	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
49	Pemenuhan unsur penyelenggaraan bangunan gedung	Persen	100	100,00	100,00	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
50	Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	21,77	19,59	89,99	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
51	Persentase luasan genangan permukiman yang tertangani	Persen	85	29,20	34,35	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
52	Laju Penegakan Perda dan Perkada	Pesen	5	33,87	677,40	IKU Satpol PP
53	Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Pesen	70	70	100,00	IKU Satpol PP
54	Persentase Anggota Linmas untuk Perlinduangan Masyarakat	Pesen	75	91	121,33	IKU Satpol PP
55	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS Yang Kompenten	Pesen	70	70	100,00	IKU Satpol PP

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
56	persentase PMKS yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya	Persen	59,81	72,44	121,12	IKU Dinas Sosial
57	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Persen	40	50,82	127,05	IKU Dinas Sosial
58	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63,56	65,07	102,38	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
59	Persentase Pencari Kerja Yang Bersertifikat	Persen	0,25	0,17	68,26	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
60	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Persen	61,9	35,37	57,13	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
61	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan	Persen	5	18,08	361,58	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
62	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	20	16,77	83,83	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
63	Persentase realisasi MoU yang dilaksanakan	Persen	85	100,00	117,65	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
64	Persentase kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Persen	81	85,18	105,16	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
65	Tingkat Keberhasilan penangananan kasus KED terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100,00	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
66	Cakupan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Persen	22	88,89	404,05	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
67	Cakupan perempuan di legislatif	Persen	24	100,00	416,67	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
68	Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender	Persen	29	88,89	306,52	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
69	Cakupan kabupaten kota yang mendapat pembinaan di bidang V-10uperviseV-10, ekonomi, dan V-10upervise di Jawa Barat	Persen	40	100,00	250,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Keluarga Berencana
70	Cakupan kabupaten kota yang mendapat peningkatan kualitas perempuan hidup di Jawa Barat	Persen	40	100,00	250,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
71	Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate)	Jiwa	2,34	2,45	104,70	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
72	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	42,47	42,73	100,61	IKU Dinas Lingkungan Hidup
73	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	79,31	79,40	100,11	IKU Dinas Lingkungan Hidup
74	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	0,62	0,78	125,81	IKU Dinas Lingkungan Hidup
75	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	81,12	82,50	101,70	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
76	Persentase Desa Mandiri	Persen	2,58	1,84	71,32	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
77	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan TMMD/BBGRM/BSMSS	Jumlah	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah Kodam III Siliwangi	TMMD : 12 Kab, BBGRM 1 Kab & BSMSS 23 Kab/Kota wilayah Kodam III Siliwangi		IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
78	Jumlah Desa Literasi yang dibina	Desa	100	100	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
79	Jumlah KPD	KPD	653	654	100,15	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
80	Jenis inovasi dan TTG yang dihasilkan dari 27 Kabupaten/Kota.	Jenis	8	27	337,50	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
81	Tingkat ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara	Persen	37	48,90	132,16	IKU Dinas Perhubungan
82	Tingkat ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan jalan	Persen	37,67	52,53	139,45	IKU Dinas Perhubungan
83	Tingkat ketersediaan Prasarana Perhubungan Udara	Persen	59,72	58,01	97,14	IKU Dinas Perhubungan
84	Tingkat ketersediaan prasarana dan fasilitas	Persen	36,09	36,16	100,19	IKU Dinas Perhubungan

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
	keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP					
85	Tingkat Pelayanan transportasi Kereta Api perkotaan di Jawa Barat	Persen	81,48	85,19	104,55	IKU Dinas Perhubungan
86	Tingkat ketersediaan Jaringan Transportasi Massal berbasis Rel	Persen	16	20,40	127,50	IKU Dinas Perhubungan
87	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3	3,12	104,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
88	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	90,4			IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
89	Persentase penyelesaian sengketa informasi	Persen	80	93,00	116,25	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
90	Indeks Keamaanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	III	Level II+ sd IV+		IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
91	Tingkat kematangan pengelolaan dan layanan V-12upervise sektoral	Persen	77	77,99	101,29	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
92	Laju Peningkatan UMKM yang mengakses kredit	Persen	20	12,13	60,65	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
93	Persentase Koperasi berkualitas	Persen	30	26,30	87,67	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
94	Laju Peningkatan Koperasi yang mengakses kredit	Persen	20	100,00	500,00	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
95	Persentase UMKM yang Naik Kelas	Persen	17	18,00	105,88	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
96	Laju pertumbuhan investasi PMA-PMDN	Persen	3	14,90	496,67	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
97	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	107,00 – 115,06	137,50	128,50	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
98	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Poin	78	81,62	104,64	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
99	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	45,33	46,7 (2018)		IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
100	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	52	52,00	100,00	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
101	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional:					IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. PEPARNAS		-	-	100,00	
	b. PEPARPENAS	Peringkat	1	5		
102	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional:	Peringkat				IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. PON		-	-	100,00	
	b. PEPARNAS		-	-	100,00	
	c. POPNAS		1	1	100,00	
	d. POPWILNAS		N/A	N/A	100,00	
103	Indeks membaca masyarakat	Poin	68,5	68,33	99,75	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
104	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Poin	62,92	62,76	99,75	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
105	Tingkat Kebiasaan Membaca Masyarakat	Poin	68,02	67,68	99,50	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
106	Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Poin	74,58	74,39	99,75	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
107	Persentase PD yang memenuhi standar baku kearsipan	Persen	52	2,9	5,58	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
108	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	52	2,9	5,58	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
109	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Persen	31	31	100,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
110	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	Persen	31	31	100,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
111	NTUP Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Poin	122,69	126,71	103,28	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
112	Produksi Perikanan	Ton	1.444.000	1.519.411,78	105,22	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
113	Persentase peningkatan konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat	Persen	1,10	4,16	378,18	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
114	Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola	Persen	13,54	14,03	103,62	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
115	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	50	51,17	102,34	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
116	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen	16,42	58,21	354,51	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
117	Laju seni budaya yang dilestarikan	Jumlah	3,79	3,79	100,00	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
118	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	1.830.000	3.645.433	199,20	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
119	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	49.000.000	64.610.832	131,86	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
120	Skor PPH tingkat Ketersediaan	Point	89,8	90,40	100,67	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
121	Tingkat Konsumsi Pangan:					IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- energi	kkal/kap/hr	2150	2.218,00	103,16	
	- protein	gr/kap/hr	57	64,80	113,68	
122	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan yang sesuai SNI	Persen	84	98,46	117,21	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
123	Skor PPH Ketersediaan	Point	89,8	90,40	100,67	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
124	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	Point	126,07	125,01	99,16	IKU Dinas Ketahanan

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Pangan dan Peternakan
125	Produksi komoditas peternakan (ton):					IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- Daging	ton	1.043.467,00	1.065.014,00	102,06	
	- Telur	ton	243.517,00	262.989,00	108,00	
	- Susu	ton	326.698,00	351.885,00	107,71	
126	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ton	12.454.406,00	13.465.327,32	108,12	IKU Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
127	NTUP -R	Poin	>100	109,42	100,00	IKU Dinas Perkebunan
128	Laju peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	Persen	0,1	10	10000,00	IKU Dinas Perkebunan
129	Persentase tutupan hutan	Persen	32,87	33,67	102,43	IKU Dinas Kehutanan
130	Tingkat kerusakan hutan	Persen	0,9	0,88	97,78	IKU Dinas Kehutanan
131	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	10	5	50,00	IKU Dinas Kehutanan
132	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	1	108,15	10815,00	IKU Dinas Kehutanan
133	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Persen	10	-5,75	-57,50	IKU Dinas Kehutanan
134	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0	0	100,00	IKU Dinas Kehutanan
135	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	GWh	58,367	63,381	108,59	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
136	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Persen	1,63	1,84	112,88	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
137	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Persen	40	40,87	102,18	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
138	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Persen	2	2	100,00	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
139	Kontriibusi Indutri Jawa Barat terhadap Nasional	Persen	40,64	28,34	69,73	IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan
140	PDRB Industri Non Migas	Triliun Rupiah	821,95	884,12	107,56	IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan
141	Laju Pertumbuhan Perdagangan Jawa Barat	Persen	3	7,51	250,33	IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan
142	Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	Persen	2	-1,38	-69,00	IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan
143	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Triliun Rupiah	293,81	323,64	110,15	IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan
144	Persentase Kebijakan yang Efektif	Persen	90,5	100	110,50	IKU Sekretariat Daerah
145	Persentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan	Persen	90,5	100,00	110,50	IKU Sekretariat Daerah
146	Persentase Usulan Daerah Persiapan Otonom yang disetujui DPRD Provinsi	Persen	N/A	0,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
147	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	75	100,00	133,33	IKU Sekretariat Daerah
148	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Persen	75	78,91	105,21	IKU Sekretariat Daerah
149	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti	Persen	90	100	111,11	IKU Sekretariat Daerah
150	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	skor/nilai	3,34	3,34	100,00	IKU Sekretariat Daerah
151	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	Persen	90	100	111,11	IKU Sekretariat Daerah
152	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum	Persen	100	100,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah
153	Level Kematangan/ Maturitas PBJ	Level	2	2,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah
154	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi,V-15upervise, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	90	81,78	90,87	IKU Sekretariat Daerah
155	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100	124,24	124,24	IKU Sekretariat Daerah
156	Nilai Penguatan Organisasi	Nilai	2,08	1,85	88,94	IKU Sekretariat Daerah
157	Nilai Penataan Organisasi	Nilai	2,22	1,85	83,33	IKU Sekretariat Daerah
158	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,1	3,82	93,17	IKU Sekretariat Daerah
159	Nilai Penataan Tata Laksana	Nilai	3,62	3,00	82,87	IKU Sekretariat Daerah
160	Kategori akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	100,00	IKU Sekretariat Daerah
161	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3,69	3,25	88,08	IKU Sekretariat Daerah
162	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikas i	Informatif	Informatif	100,00	IKU Sekretariat Daerah
163	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Kualifikas i	Baik	Baik	100,00	IKU Sekretariat Daerah
164	Persentase Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah	Persen	100	100,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah
165	Tingkat dukungan dan fasilitasi	Persen	100	68,64	68,64	IKU Sekretariat DPRD
166	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	3	3,20	106,67	IKU Sekretariat DPRD
167	Persentase Koordinasi jejaring kerja dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan	Persen	100	100	100,00	IKU Badan Penghubung

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
	pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat					
168	Persentase fasilitasi promosi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan potensi pembangunan Jawa Barat	Persen	100	100	100,00	IKU Badan Penghubung
169	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	Persen	80	93,69	117,11	IKU Bappeda
170	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	N/A (Dalam Proses pemeriksaan Audit BPK RI)		IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
171	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Persen	80	N/A (Dalam Proses pemeriksaan Audit BPK RI)		IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
172	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi	Persen	80	N/A (Dalam Proses pemeriksaan Audit BPK RI)		IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
173	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	56,66	58,95	104,04	IKU Badan Pendapatan Daerah
174	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Persen	64,5	76,00	117,83	IKU Badan Kepegawaian Daerah
175	Indeks Sistem Merit	Skor	294	277,00	94,22	IKU Badan Kepegawaian Daerah
176	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	Poin	3259			IKU Inspektorat
177	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional	Kab/Kota	4			IKU Inspektorat
178	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	A	A	100,00	IKU Inspektorat
179	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya adalah ≥ BB	Pemerintah Daerah	5	4,00	80,00	IKU Inspektorat
180	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	100,00	IKU Inspektorat
181	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP	Kab/Kota	25	24,00	96,00	IKU Inspektorat
182	Nilai evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	75			IKU Inspektorat
183	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3	3,00	100,00	IKU Inspektorat
184	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Persen	100	100,00	100,00	IKU Inspektorat
185	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3,00	100,00	IKU Inspektorat
186	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah Yang dihasilkan	Persen	20	20,00	100,00	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
187	Presentase hasil kelitbangan yang diterapkan oleh perangkat daerah	Persen	20	20,00	100,00	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
188	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	20	37,10	185,50	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
189	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	0,4	0,42	105,00	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
190	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Poin	70,78	65,5	92,54	IKU Kesbangpol
191	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	Poin	70,78	65,5	92,54	IKU Kesbangpol
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,6 – 69	68,5	99,85	IKU Pemerintah Daerah
2	Indeks Demokrasi	Poin	68,79 -70,78	65,50 (2018)		IKU Pemerintah Daerah
3	Indeks Kebahagiaan	Poin	70-71	69,58 (2017)		IKU Pemerintah Daerah
4	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	53,63	49 (2018)		IKU Pemerintah Daerah
5	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	16,63	17,43	104,81	IKU Pemerintah Daerah
6	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	70-71	77,50	109,15	IKU Pemerintah Daerah
7	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	41-43	46,13	107,28	IKU Pemerintah Daerah
8	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ Kapita	1.300	1320	101,54	IKU Pemerintah Daerah
9	Indeks Desa Membangun	Poin	0,65	0,67	103,08	IKU Pemerintah Daerah
10	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	0	100,00	IKU Pemerintah Daerah
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	49,76	52,12	104,74	IKU Pemerintah Daerah
12	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,8	3,85	137,50	IKU Pemerintah Daerah
13	Indeks Penggunaan Air	Poin	1,1923	1,1920	99,97	IKU Pemerintah Daerah

Sumber: - Perangkat daerah, 2020
- Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019, Bappeda

Keterangan:
Melampaui
Tercapai
Belum Tercapai
Tidak tersedia data

Bila dirinci berdasarkan IKU perangkat daerah, maka 44,32 persen IKU perangkat daerah telah **Melampaui** target dan 21,59 persen yang **Tercapai** targetnya. Namun masih terdapat 26,70 persen IKU perangkat daerah yang **Belum Tercapai** targetnya, serta masih terdapat 7,39 persen IKU perangkat daerah yang tidak tersedia data realisasinya. Informasi lain yang diperoleh dari tabel di bawah yaitu terdapat beberapa perangkat daerah yang seluruh IKU perangkat daerahnya (100

persen) dapat Melampaui target yang ditetapkan, yaitu: Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, IKU Bappeda, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perangkat daerah yang mampu mencapai seluruh target sesuai yang direncanakan yaitu Badan Penghubung. Sementara beberapa perangkat daerah yang belum dapat mencapai targetnya ≥ 50 persen yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Kehutanan, Sekretariat DPRD, dan Badan Kepegawaian Daerah. Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak melaporkan realisasi IKU perangkat daerah sesuai dengan yang termuat di RPJMD.

Tabel 5.4
Jumlah dan Persentase Indikator IKU Perangkat Daerah Berdasarkan Kriteria Pencapaian Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah IKU Perangkat Daerah	Melampaui		Tercapai		Belum Tercapai		Tidak Tersedia Data	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	IKU Dinas Pendidikan	3	0	0,00	0	0,00	1	33,33	2	66,67
2	IKU Dinas Kesehatan	11	2	18,18	3	27,27	6	54,55	0	0,00
3	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	3	1	33,33	0	0,00	2	66,67	0	0,00
4	IKU Dinas Sumber Daya Air	5	0	0,00	2	40,00	3	60,00	0	0,00
5	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman	7	2	28,57	2	28,57	3	42,86	0	0,00
6	IKU Satpol PP	4	2	50,00	2	50,00	0	0,00	0	0,00
7	IKU Dinas Sosial	2	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	3	50,00	0	0,00	3	50,00	0	0,00
9	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	8	7	87,50	1	12,50	0	0,00	0	0,00
10	IKU Dinas Lingkungan Hidup	3	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	2	40,00	1	20,00	2	40,00	0	0,00
13	IKU Dinas Perhubungan	6	5	83,33	0	0,00	1	16,67	0	0,00
14	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika	5	4	80,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00
15	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	4	2	50,00	0	0,00	2	50,00	0	0,00
16	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	3	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga	8	0	0,00	5	62,50	0	0,00	3	37,50
18	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8	0	0,00	2	25,00	6	75,00	0	0,00
19	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan	5	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4	3	75,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00
21	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	9	8	88,89	0	0,00	1	11,11	0	0,00
22	IKU Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

No.	Uraian	Jumlah IKU Perangkat Daerah	Melampaui		Tercapai		Belum Tercapai		Tidak Tersedia Data	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
23	IKU Dinas Perkebunan	2	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00
24	IKU Dinas Kehutanan	6	2	33,33	1	16,67	3	50,00	0	0,00
25	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4	3	75,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00
26	IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	3	60,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00
27	IKU Sekretariat Daerah	21	7	33,33	7	33,33	6	28,57	1	4,76
28	IKU Sekretariat DPRD	2	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00
29	IKU Badan Penghubung	2	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00
30	IKU Bappeda	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
32	IKU Badan Pendapatan Daerah	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	IKU Badan Kepegawaian Daerah	2	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00
34	IKU Inspektorat	10	0	0,00	5	50,00	2	20,00	3	30,00
35	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	1	33,33	2	66,67	0	0,00	0	0,00
36	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00
	Total	**176**	**78**	**44,32**	**38**	**21,59**	**47**	**26,70**	**13**	**7,39**

Sumber: hasil pengolahan data, 2020

5.2.2 Tingkat *Outcome*

Capaian IKU Perangkat Daerah sebagaimana telah dibahas di atas, sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja program. Indikator kinerja program juga menjadi Indikator Kinerja Kunci tingkat Hasil (*Outcome*) sebagaimana dimuat pada Bab 8 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Pada bagian akan diuraikan capaian indikator kinerja program/IKK tingkat *outcome* berdasarkan laporan masing-masing perangkat daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 24 perangkat daerah (63 persen) memiliki rata-rata tingkat capaian kinerja program ≤ 100 persen, sementara sisanya bervariasi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak melaporkan capaian indikator kinerja program Tahun 2019 sesuai dengan yang termuat dalam RPJMD. Lima perangkat daerah dengan rata-rata tingkat capaian kinerja tertinggi, yaitu: Dinas Sosial sebesar 879,59 persen, Dinas Kehutanan sebesar 870,99 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebesar 361,57 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 328,08 persen, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar 192,55 persen. Sementara 5 (lima) perangkat daerah dengan rata-rata tingkat capaian kinerja terendah, yaitu: Dinas Tanaman Pangan dan Holtkultura sebesar 76,32 persen, Dinas Perhubungan sebesar 67,00 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 31,00 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 20,24 persen, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 persen.

Dengan adanya perangkat daerah yang memiliki tingkat capaian kinerja program jauh diatas 100 persen tentu perlu ditelaah lebih lanjut. Sebagai contoh, pada Dinas Sosial terdapat Program Penanganan Fakir Miskin dengan indikator Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya, memiliki tingkat capaian kinerja 5.381 persen. Hal ini disebabkan rendahnya target yang direncanakan yaitu 1 persen sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk program ini (Rp3.096.895.705) digunakan sebanyak 98,76 persen untuk menghasilkan kinerja 53,81 persen. Kondisi seperti ini terjadi pada beberapa indikator program lainnya di beberapa perangkat daerah.

Ditinjau dari sisi capaian anggaran, 5 (lima) perangkat daerah yang memiliki rata-rata tingkat capaian anggaran tertinggi yaitu: Dinas Kehutanan sebesar 94,23 persen, Inspektorat sebesar 95,49 persen, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebesar 96,14 persen, Dinas Perkebunan sebesar 97,32 persen, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 97,38 persen. Sementara beberapa perangkat daerah dengan rata-rata tingkat capaian anggaran terendah, yaitu: Dinas

Perumahan Dan Permukiman sebesar 51,90 persen, Dinas Sumber Daya Air sebesar 53,24 persen, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar 63,33 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana sebesar 65,19 persen, dan Dinas Perhubungan sebesar 66,12 persen.

Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja dan anggaran yang diurutkan berdasarkan tingkat capaian disajikan masing-masing pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4.

Gambar 5.3
Rekap Capaian Indikator Kinerja Program (*Outcome*) Pemerintah Deaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
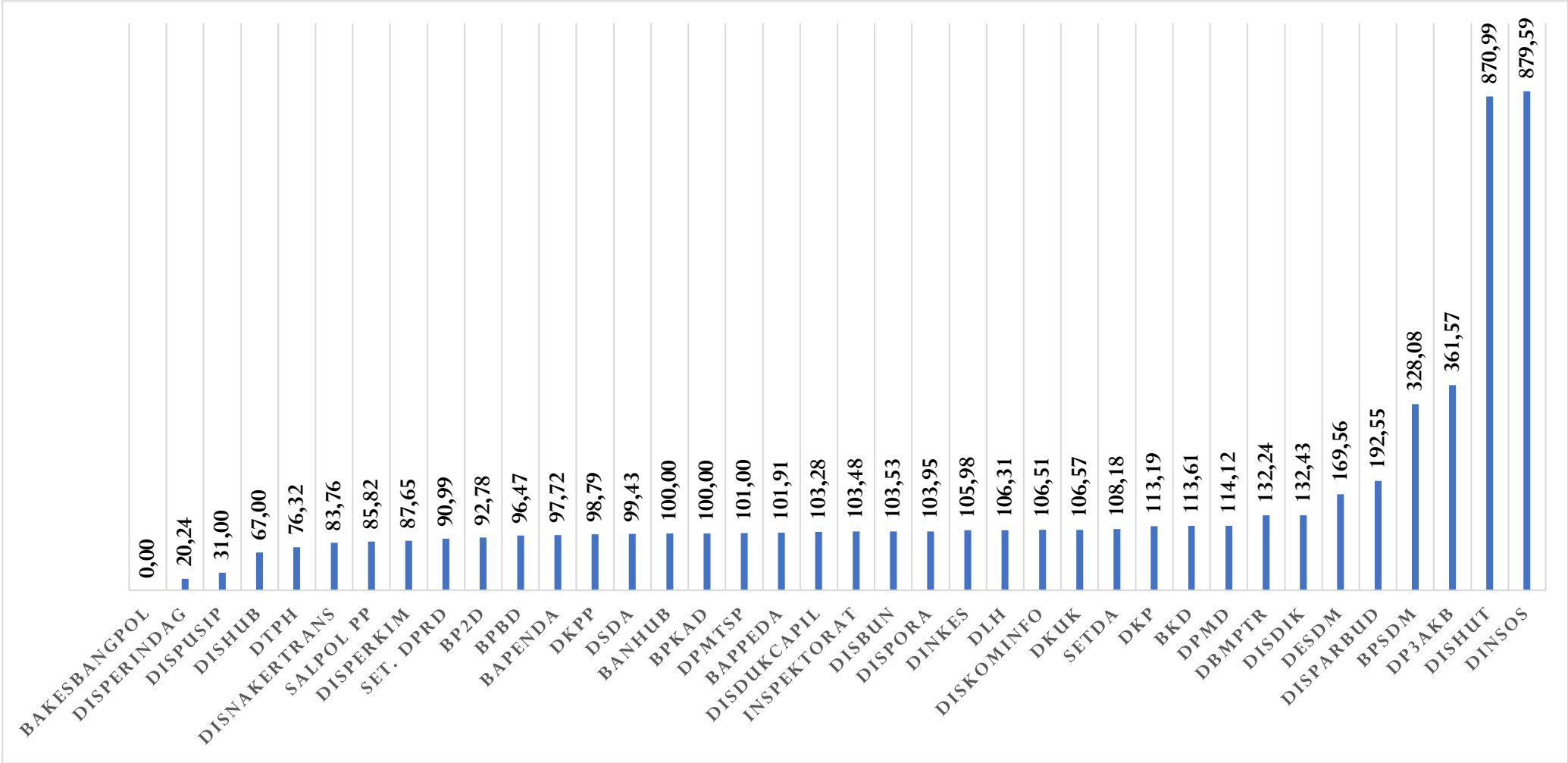
Sumber: hasil pengolahan data, 2020

Gambar 5. 4
Rekap Capaian Anggaran Program (Outcome) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Perangkat Daerah	Capaian
DISPERKIM	51,90
DSD	53,24
BPKAD	63,33
DP3AKB	65,19
DISHUB	66,12
DLH	69,70
BPSDM	78,22
DKUK	78,99
DINKES	79,83
DISNAKERTRANS	81,38
BKD	81,52
DISPARBUD	82,82
BAPPEDA	85,13
DBMPR	85,43
BPBD	87,13
DISPORA	87,35
BP2D	88,64
SETDA	88,84
DESDM	89,21
SET . DPRD	89,38
DKP	89,41
DISDUKCAPIL	89,62
BAPENDA	89,88
BAKESBANG	90,60
DPMD	91,34
SATPOL PP	91,90
DISKOMINFO	91,96
DPMPTSP	92,31
DISPERINDAG	92,54
BAHUB	92,58
DKPP	92,91
DISDIK	93,04
DINSOS	93,27
DISHUT	94,23
INSPEKTORAT	95,49
DTPH	96,14
DISBUN	97,32
DISPUSIP	97,38

Sumber: hasil pengolahan data, 2020

Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sebesar 152,28 persen dan rata-rata tingkat capaian anggaran program perangkat daerah sebesar 85,00 pesen, disajikan pada tabel di bawah. Sedangkan rincian target, realisasi, dan tingkat capaian kinerja program perangkat daerah Tahun 2019 dimuat pada **Tabel 1 Lampiran**. Capaian anggaran masing-masing program dimuat pada **Tabel 2 Lampiran.**

Tabel 5.5
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran
Program Perangkat Daerah Tahun 2019

NO.	PERANGKAT DAERAH	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
1	Dinas Pendidikan	132,43	93,04
2	Dinas Kesehatan	105,98	79,83
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	132,24	85,43
4	Dinas Sumber Daya Air	99,43	53,24
5	Dinas Permukiman dan Perumahan	87,65	51,90
6	Satuan Polisi Pamong Praja	85,82	91,90
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96,47	87,13
8	Dinas Sosial	879,59	93,27
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83,76	81,38
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	361,57	65,19
11	Dinas Lingkungan Hidup	106,31	69,70
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103,28	89,62
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	114,12	91,34
14	Dinas Perhubungan	67,00	66,12
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	106,51	91,96
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	106,57	78,99
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	101,00	92,31
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	103,95	87,35
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31,00	97,38
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	113,19	89,41
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	192,55	82,82
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan	98,79	92,91
23	Dinas Tanaman Pangan dan Holtkultura	76,32	96,14
24	Dinas Perkebunan	103,53	97,32
25	Dinas Kehutanan	870,99	94,23
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	169,56	89,21
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20,24	92,54
28	Sekretariat Daerah	108,18	88,84
29	Sekretariat DPRD	90,99	89,38
30	Badan Penghubung	100,00	92,58
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	101,91	85,13
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100,00	63,33
33	Badan Pendapatan Daerah	97,72	89,88
34	Badan Kepegawaian Daerah	113,61	81,52
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	328,08	78,22
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	92,78	88,64

NO.	PERANGKAT DAERAH	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
37	Inspektorat	103,48	95,49
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	90,60
	JUMLAH	**152,28**	**85,00**

Sumber: hasil pengolahan data, 2020

Hasil rekap capaian indikator kinerja program perangkat daerah menunjukkan sebanyak 20,84 indikator yang **Melampaui Target** yang direncanakan dan sebanyak 43,87 persen yang **Tercapai**. Namun masih ada 15,80 persen indikator program yang **belum Tercapai** dan 19,50 persen yang tidak tersedia data realisasinya oleh perangkat daerah penanggung jawab.

Gambar 5.5
Rekap Capaian Indikator Program/IKK Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
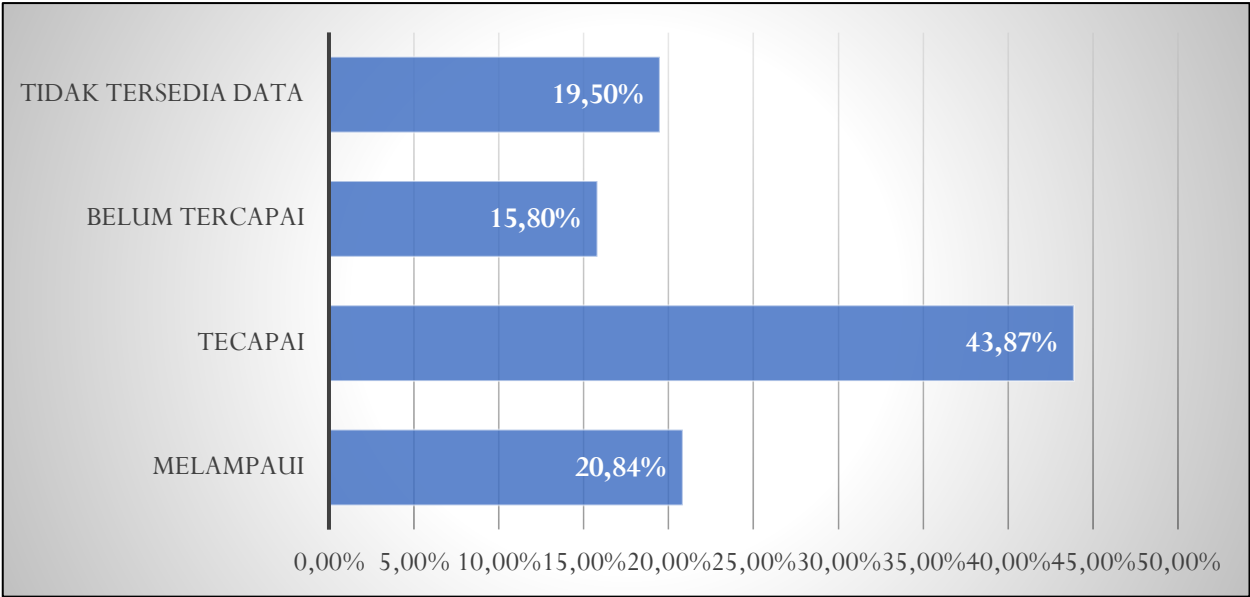
Sumber: hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 5.5. diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah yang Tercapai 100 persen seluruh target indikator programnya. Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan perangkat daerah dengan persentase tertinggi untuk indikator yang Melampaui target yaitu 52,94 persen. Perangkat daerah dengan persentase tertinggi untuk kriteria Belum Tercapai yaitu Sekretariat DPRD sebesar 90,00 persen. Selain itu, berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat 19,50 persen indikator kinerja program yang tidak ada data realisasinya. Beberapa perangkat daerah yang perlu mendapat perhatian dalam penyediaan data realisasi kinerja program yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, Dinas perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penghubung, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Permukiman dan Perumahan, dan Dinas Kesehatan.

Tabel 5.6
Jumlah dan Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Berdasarkan Kriteria Pencapaian Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Indikator Program	Melampaui		Tercapai		Belum Tercapai		Tidak Tersedia Data	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dinas Pendidikan	7	21	4	19,05%	1	4,76%	13	61,90%	3	14,29%
2	Dinas Kesehatan	11	36	6	16,67%	5	13,89%	5	13,89%	20	55,56%
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	7	16	5	31,25%	8	50,00%	2	12,50%	1	6,25%
4	Dinas Sumber Daya Air	7	15	1	6,67%	13	86,67%	1	6,67%	0	0,00%
5	Dinas Permukiman dan Perumahan	6	21	3	14,29%	2	9,52%	3	14,29%	13	61,90%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4	13	1	7,69%	8	61,54%	3	23,08%	1	7,69%
7	Dinas Sosial	6	14	4	28,57%	3	21,43%	7	50,00%	0	0,00%
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	17	5	29,41%	6	35,29%	6	35,29%	0	0,00%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	8	17	1	5,88%	7	41,18%	8	47,06%	1	5,88%
10	Dinas Lingkungan Hidup	7	15	7	46,67%	5	33,33%	3	20,00%	0	0,00%
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	11	4	36,36%	7	63,64%	0	0,00%	0	0,00%
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	11	3	27,27%	8	72,73%	0	0,00%	0	0,00%
13	Dinas Perhubungan	7	24	9	37,50%	9	37,50%	2	8,33%	4	16,67%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	13	0	0,00%	0	0,00%	1	7,69%	12	92,31%
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	6	14	2	14,29%	1	7,14%	1	7,14%	10	71,43%
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	11	2	18,18%	9	81,82%	0	0,00%	0	0,00%
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	10	2	20,00%	6	60,00%	2	20,00%	0	0,00%
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	27	4	14,81%	16	59,26%	5	18,52%	2	7,41%
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	7	12	0	0,00%	0	0,00%	1	8,33%	11	91,67%
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	17	9	52,94%	7	41,18%	1	5,88%	0	0,00%
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan	7	17	4	23,53%	13	76,47%	0	0,00%	0	0,00%
22	Dinas Tanaman Pangan dan Holtkultura	5	17	6	35,29%	8	47,06%	2	11,76%	1	5,88%
23	Dinas Perkebunan	4	11	2	18,18%	8	72,73%	1	9,09%	0	0,00%
24	Dinas Kehutanan	4	15	6	40,00%	5	33,33%	4	26,67%	0	0,00%
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6	17	4	23,53%	10	58,82%	0	0,00%	3	17,65%

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Indikator Program	Melampaui		Tercapai		Belum Tercapai		Tidak Tersedia Data	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	14	5	35,71%	7	50,00%	2	14,29%	0	0,00%
27	Badan Perecanaan Pembangunan Daerah	7	19	7	36,84%	8	42,11%	4	21,05%	0	0,00%
28	Sekretariat Daerah	4	31	3	9,68%	17	54,84%	0	0,00%	11	35,48%
29	Sekretariat DPRD	5	10	1	10,00%	0	0,00%	9	90,00%	0	0,00%
30	Badan Penghubung	4	10	0	0,00%	1	10,00%	0	0,00%	9	90,00%
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7	12	2	16,67%	10	83,33%	0	0,00%	0	0,00%
32	Badan Pendapatan Daerah	4	12	0	0,00%	12	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
33	Badan Kepegawaian Daerah	4	12	2	16,67%	8	66,67%	2	16,67%	0	0,00%
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	12	5	41,67%	5	41,67%	2	16,67%	0	0,00%
35	Inspektorat	4	10	3	30,00%	6	60,00%	1	10,00%	0	0,00%
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	12	0	0,00%	10	83,33%	2	16,67%	0	0,00%
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	16	2	12,50%	12	75,00%	1	6,25%	1	6,25%
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	13	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	13	100,00%
	Jumlah	**211**	**595**	**124**	**20,84%**	**261**	**43,87%**	**94**	**15,80%**	**116**	**19,50%**

Sumber: hasil pengolahan data, 2020

5.3 DUKUNGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL

Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Provinsi Jawa Barat memiliki peran bagi pencapaian pembangunan nasional. Capaian beberapa indikator makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 di tingkat nasional dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari posisi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat yang berada di posisi 21 diantara 33 provinsi lain, dan indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Barat menempati urutan 10 tertinggi. Selanjutnya, posisi angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin Jawa Barat berada pada 11 terendah se-Indonesia. Capaian indikator angka kemiskinan tidak diikuti dengan capaian indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indeks gini. Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 tercatat sebagai provinsi dengan TPT tertinggi kedua setelah Provinsi Banten. Sedangkan capaian indeks gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan untuk Jawa Barat menempati urutan ketiga tertinggi setelah Provinsi Gorontalo dan D.I Yogyakarta.

Tabel 5.7
Capaian Indikator Makro Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2019

No.	Provinsi	LPE (%)	IPM	Angka Kemiskinan (%)	Indeks Gini (Semester I 2019)	TPT (%)
1	Aceh	4,15	71,90	15,01	0,319	6,20
2	Sumatera Utara	5,22	71,74	8,63	0,317	5,41
3	Sumatera Barat	5,05	72,39	6,29	0,306	5,33
4	Riau	2,84	73	6,90	0,334	5,97
5	Jambi	4,40	71,26	7,51	0,321	4,19
6	Sumatera Selatan	5,71	70,02	12,56	0,331	4,48
7	Bengkulu	4,96	71,21	14,91	0,34	3,39
8	Lampung	5,27	69,57	12,3	0,329	4,03
9	Kep. Bangka Belitung	3,32	71,30	4,50	0,269	3,62
10	Kepulauan Riau	4,89	75,48	5,80	0,341	6,91
11	Dki Jakarta	5,89	80,76	3,42	0,394	6,22
12	**Jawa Barat**	**5,07**	**72,03**	**6,82**	**0,402**	**7,99**
13	Jawa Tengah	5,41	71,73	10,58	0,361	4,49
14	D I Yogyakarta	6,60	79,99	11,44	0,423	3,14
15	Jawa Timur	5,52	71,5	10,20	0,37	3,92
16	Banten	5,53	72,44	4,94	0,365	8,11
17	Bali	5,63	75,38	3,61	0,366	1,52
18	Nusa Tenggara Barat	4,01	68,14	13,88	0,379	3,42
19	Nusa Tenggara Timur	5,20	65,23	20,62	0,356	3,35

No.	Provinsi	LPE (%)	IPM	Angka Kemiskinan (%)	Indeks Gini (Semester I 2019)	TPT (%)
20	Kalimantan Barat	5,00	67,65	7,28	0,327	4,45
21	Kalimantan Tengah	6,16	70,91	4,81	0,336	4,10
22	Kalimantan Selatan	4,08	70,72	4,47	0,334	4,31
23	Kalimantan Timur	4,77	76,61	5,91	0,33	6,09
24	Kalimantan Utara	6,91	71,15	6,49	0,295	4,40
25	Sulawesi Utara	5,66	72,99	7,51	0,367	6,25
26	Sulawesi Tengah	7,15	69,5	13,18	0,327	3,15
27	Sulawesi Selatan	6,92	71,66	8,56	0,389	4,97
28	Sulawesi Tenggara	6,51	71,2	11,04	0,399	3,59
29	Gorontalo	6,41	68,49	15,31	0,407	4,06
30	Sulawesi Barat	5,66	65,73	10,95	0,365	3,18
31	Maluku	5,57	69,45	17,65	0,324	7,08
32	Maluku Utara	6,13	68,7	6,91	0,312	4,97
33	Papua Barat	2,66	64,7	21,51	0,386	6,24
34	Papua	-15,72	60,84	26,55	0,394	3,65
	Indonesia	**5,00**	**71,92**	**9,22**	**0,382**	**5,28**

Sumber: BPS RI, 2020, diolah

5.4 KENDALA DALAM EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 diwarnai dengan beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2019 dan hasil analisis dalam evaluasi hasil RPJMD ini, dapat disimpulkan beberapa kendala atau masalah yang dialami oleh perangkat daerah sebagai berikut:

a. Pengisian format evaluasi hasil Renja PD dan RKPD secara manual menjadi salah satu hambatan penyajian laporan yang benar, akurat dan tepat waktu.
b. Terdapat beberapa daerah yang melaporkan realisasi IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program berbeda dengan yang termuat di Bab 7 RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisis. Sebagian dari perangkat daerah tersebut melaporkan realisasi indikator kinerja yang seharusnya digunakan pada periode 2020-2023.
c. Terkait dengan huruf b di atas, pada Perubahan RKPD Tahun 2019 tidak menyajikan indikator kinerja program, hanya menyajikan indikator kinerja kegiatan. Hal ini menyebabkan tidak dapat ditelusuri bila ada perubahan indikator kinerja program.
d. Kurangnya koordinasi
e. Kurangnya SDM, sebab beban kerja yang melebihi ketersediaan sumber daya aparatur

f. Kurang pahamnya aparatur dalam penjadwalan kegiatan yang sudah ditetapkan pada anggaran kas per kegiatan
g. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran
h. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan
i. Keterlambatan dalam pengadministrasian SPJ
j. Kurangnya sinkronisasi antara percairan anggaran dengan pelaksanaan anggaran yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan
k. Penetapan kegiatan tahunan tidak mengacu pada perencanaan strategis
l. Terdapat beberapa kegiatan yang indikatornya tidak sesuai sehingga capaian indikator tidak dapat terukur
m. Keterlambatan penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas dan Pejabat Barang dan Jasa

BAB VI
PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan evalusi hasil RPJMD pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistematika dan substansi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah sesuai dengan sistematika dan substansi RPJMD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Jawa Barat akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran (IKU pemda), serta indikator IKK tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini.
3. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 perlu segera dilaksanakan/diterapkan/diselaraskan dengan RPJMD oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan dimaksud yang sangat strategis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
4. Terkait nomor 2 dan 3 diatas, maka penyesuaian-penyesuaian tersebut perlu dilakukan dengan melaksanakan perubahan RPJMD. Kebijakan ini dapat diambil sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lebih

lanjut perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3) terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

5. Capaian indikator makro RPJMD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Persentase Penduduk Miskin mampu mencapai target bahkan diatas target, sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Gini belum mencapai target.
6. Capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 menunjukkan dari 29 IKU terdapat 16 indikator (55,17 persen) yang melampaui target, 2 (dua) indikator (6,90 persen) yang mencapai target, 7 (tujuh) indikator (24,14 persen) yang belum tercapai, dan 4 (empat) indikator (13,79 persen) yang tidak ada tersedia data realisasinya.
7. Capaian Tahun 2019 menunjukkan dari 211 IKK tingkat *impact* Tahun 2019, yang memiliki capaian kinerja Melampaui sebanyak 97 indikator atau 45,97 persen, Tercapai sebanyak 42 indikator atau 19,91 persen, Belum Tercapai sebesar 57 indikator atau 27,01 persen, dan Tidak Tersedia Data sebanyak 15 indikator atau 7,11 persen.
8. Capaian IKU perangkat daerah menunjukkan bahwa 44,32 persen IKU perangkat daerah telah Melampaui target dan 21,59 persen yang Tercapai targetnya. Namun masih terdapat 26,70 persen IKU perangkat daerah yang Belum Tercapai targetnya, serta masih terdapat 7,39 persen IKU perangkat daerah yang tidak tersedia data realisasinya.

9. Perangkat daerah yang seluruh IKU perangkat daerahnya (100 persen) dapat Melampaui target yang ditetapkan, yaitu Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perangkat daerah yang mampu mencapai seluruh target sesuai yang direncanakan yaitu Badan Penghubung.
10. Capaian indikator kinerja program/IKK tingkat *outcome* menunjukkan bahwa 63 persen perangkat daerah memiliki rata-rata tingkat capaian kinerja program ≤ 100 persen, sementara sisanya bervariasi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak melaporkan capaian indikator kinerja program Tahun 2019 sesuai dengan yang termuat dalam RPJMD.
11. Lima perangkat daerah dengan rata-rata tingkat capaian kinerja tertinggi, yaitu: Dinas Sosial sebesar 879,59 persen, Dinas Kehutanan sebesar 870,99 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebesar 361,57 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 328,08 persen, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar 192,55 persen.
12. Rata-rata tingkat capaian anggaran seluruh program Tahun 2019 sebesar 85 persen. Lima perangkat daerah yang memiliki rata-rata tingkat capaian anggaran tertinggi yaitu: Dinas Kehutanan sebesar 94,23 persen, Inspektorat sebesar 95,49 persen, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebesar 96,14 persen, Dinas Perkebunan sebesar 97,32 persen, dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebesar 97,38 persen.
13. Konsistensi pelaksanaan program RPJMD di RKPD dan APBD Tahun 2019 dan Tahun 2020, sebagai berikut:
    a) Konsistensi program RPJMD ke RKPD dan APBD Tahun 2019 adalah 100 persen. Seluruh program (211 program) di RPJMD konsisten dijabarkan ke RKPD dan APBD Tahun 2019. Tidak Terdapat program baru di RKPD maupun APBD Tahun 2019.
    b) Jumlah program di RPJMD Tahun 2020 yang konsisten dijabarkan ke RKPD dan APBD yaitu 817 program atau 98,43 persen. Terdapat 10 program RPJMD (1,20 persen) yang tidak dilaksanakan di RKPD dan APBD pada Tahun 2020.

14. Capaian beberapa indikator makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di tingkat nasional dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari posisi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat yang berada di posisi 21 diantara 33 provinsi lain, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat menempati urutan 10 tertinggi. Selanjutnya, posisi Angka Kemiskinan atau Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat berada pada 11 terendah se-Indonesia. Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019 tercatat sebagai provinsi dengan TPT tertinggi kedua setelah Provinsi Banten. Sedangkan capaian Indeks Gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan untuk Jawa Barat menempati urutan ketiga tertinggi setelah Provinsi Gorontalo dan D.I Yogyakarta.

6.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan evaluasi hasil RPJMD di atas, maka berikut disampaikan beberapa rekomendasi:

1. Dalam rangka keterpaduan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka evaluasi terhadap hasil RPJMD ini supaya ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing perangkat daerah.
2. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian indikator kinerja makro, IKU Pemda Jawa Barat, IKU perangkat daerah, IKK tingkat *impact* maupun tingkat *outcome*.
3. Konsistensi perencanaan dan pengangaran program RPJMD ke RKPD dan APBD tetap perlu dijaga pada tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dengan menggunakan SIPD.
4. Sehubungan dengan kesimpulan dan rekomendasi pada poin-poin sebelumnya, maka perlu segera melakukan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Apabila perubahan RPJMD dilakukan pada tahun ini, maka akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 dan 2023, dan Perubahan RKPD Tahun 2021. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
5. Substansi RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 perlu segera diubah dengan memprioritaskan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19, pencapaian visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan mendukung prioritas nasional.

6. Bila diambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka evaluasi terhadap hasil RPJMD ini perlu disampaikan ke Gubernur dan DPRD sebagai bahan pertimbangan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Tabel 1
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil (*Outcome*) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
				DINAS PENDIDIKAN						**132,43**
1	01	01	001	Program Pendidikan Menengah						
					1	APK SMA/SMK Sederajat	Persen	85	78,04	91,81
					2	APM SMA/SMK Sederajat	Persen	65	57,42	88,34
					3	SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	Persen	10	36,55	365,50
					4	SMA yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasrana	Persen	70		
					5	SMK yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasrana	Persen	70		
1	01	01	002	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus						
					1	APK SLB	Persen	24		
					2	Sekolah SLB Terakreditasi A	Sekolah	5	16	320,00
					3	SLB yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen	20	16	80,00
1	01	01	003	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
					1	Nilai Rerata Uji Kompetensi GTK SMA/MA/SMK/SLB	-	75,51	58,97	78,10
					2	Kualifiaksi S2 Guru SMA	Persen	10	12,52	125,22
					3	Kualifiaksi S2 Guru SMK	Persen	10	6,08	60,76
					4	Kualifikasi S2 Guru SLB	Persen	5	4,21	84,26

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
1	01	01	004	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1	Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/ SMK/SLB Negeri Swasta	Siswa	8.050.838	31.481.356	391,03
1	01	01	005	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pendidikan	Persen	100	98	98,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan	Persen	100	95	95,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pendidikan	Persen	100	95	95,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan	Persen	100	95	95,00
1	01	01	006	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pendidikan	Persen	100	90	90,00
1	01	01	007	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pendidikan	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pendidikan	Unit	350	125	35,71
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pendidikan	Persen	100	90	90,00
				DINAS KESEHATAN						**105,98**
1	02	01	008	Program Promosi Kesehatan						

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					1	Persentase Rumah tangga yang berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70		
					2	Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	85		
1	02	01	009	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						
					1	Persentase penduduk yang menggunakan air minum yang berkualitas	Persen	61,5	77,84	126,57
					2	Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	Persen	56	72,39	129,27
1	02	01	010	Program Pelayanan Kesehatan						
					1	Ratio kematian ibu	Persen	86	78,3	108,95
					2	Ratio kematian bayi	Persen	5,9	3,28	144,41
					3	Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,52		
					4	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen	89		
1	02	01	012	Program Sumber Daya Kesehatan						
					1	Persentase Puskesmas terisi dokter sesuai standar	Persen	100		
					2	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	64,52		
					3	Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskesmas	256		
					4	Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	95		
					5	Jumlah RS mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar	Rumah Sakit	99		
					6	Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen	75		
					7	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Persen	85	84,46	99,36
1	02	01	013	Program Manajeman Kesehatan						

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					1	Terpenuhinya regulasi kebijakan bidang kesehatan provinsi	Dokumen	2		
					2	Tercapainya pengelolaan data dan informasi kesehatan provinsi (Pemerintah dan Swasta)	Persen	55		
1	02	01	014	Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi						
					1	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian bencana dan paska bencana	Persen	100		
					2	Persentase penanganan kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit	Persen	100		
1	02	01	015	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi						
					1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80		
					2	Peningkatan kinerja keuangan	Persen	30		
					3	Peningkatan kinerja pelayanan	Persen	70		
					4	Peningkatan mutu dan manfaat untuk masyarakat	Persen	60		
1	02	01	016	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Succes Rate)	Persen	89	81,8	91,91
					2	Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI >90%	Persen	94	89	94,68
					3	Prevalensi Hipertensi	Persen	28,55	39,6	61,30
					4	Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Persen	100		
					5	Persentasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	44,1	74	167,80
1	02	01	016	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan						

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100,00
1	02	01	017	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100,00
1	02	01	018	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Kesehatan	Persen	70	100	142,86
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Kesehatan	Unit	350	100	28,57
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kesehatan	Persen			
				DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG						**132,24**
1	03	01	019	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	91,48	91,9	100,46
1	03	01	020	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan						
					1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	91,48	91,9	100,46
					2	Presentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan	Persen	88,83	1,35	1,52

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
1	03	01	021	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Penambahan SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat	Orang	100	449	449,00
1	03	01	022	Program Penataan Ruang						
					1	Persentase Ketersediaan Rencana Rinci	Persen	20	46	230,00
					2	Persentase Ketersediaan Rencana Rinci	Persen	20	46	230,00
					3	Persentase Ketersediaan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	35		
					4	Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Persen	100	72,1	72,10
1	03	01	023	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100	100	100,00
1	03	01	024	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100	100	100,00
1	03	01	025	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang						

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100	100	100,00
				DINAS SUMBER DAYA AIR						**99,43**
1	03	02	026	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya						
					1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Air	Persen	0,5	0,5	100,00
					2	Tingkat Pelayanan Rekomendasi Perijinan Sumber Daya Air	Persen	60	60	100,00
1	03	02	027	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan lainnya						
					1	Indeks kinerja sistem irigasi	Persen	52	52,2	100,38
					2	Cakupan layanan D.I. Tambak	Ha	0	0	100,00
1	03	02	028	Program Pengendalian Daya Rusak Air	1	Tingkat Pengurangan Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan	Persen	5	5	100,00
1	03	02	029	Program Pengelolaan Kelembagaan, Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air						
					1	Tingkat Implementasi Penerapan Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Kelembagaan SDA	Persen	60	60	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					2	Tingkat Penyediaan Sistem Informasi SDA yang dapat diakses Masyarakat	Persen	45	45	100,00
1	03	02	030	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Sumber Daya Air	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Sumber Daya Air	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Sumber Daya Air	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Sumber Daya Air	Persen	100	100	100,00
1	03	02	031	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sumber Daya Air	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Sumber Daya Air	Persen	100	100	100,00
1	03	02	032	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sumber Daya Air						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Sumber Daya Air	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Sumber Daya Air	Unit	350	318,5	91,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sumber Daya Air	Persen	100	100	100,00
				DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN						**87,65**

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
1	03	02	033	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman						
					1	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	78	78,78	101,00
					2	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	69	72,44	104,99
					3	Cakupan Pelayanan Penanganan Persampahan	Persen	69,24	69,01	99,67
					4	Pengurangan luasan Genangan di Permukiman (Menurunkan jumlah kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Persen	95	29,20	30,74
1	03	01	034	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
					1	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni (Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni)	Persen	98,46	98,72	100,26
					2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh)	Persen	74,76	48,24	64,53
					3	Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana	Persen	100	100	100,00
					4	Terbangunnya PSU Pendukung Permukiman	Kawasan	12		
				Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	100		
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan	Persen	100		

Kode	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		pelaporan keuangan Dinas Perumahan Dan Permukiman				
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	100		
	Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan					
		1 Rekomendasi Penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persen	100		
		2 Persentase Kelengkapan data Spasial pertanahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen	15		
		3 Jumlah Sertifikat Tanah Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR yang Difasilitasi	Sertifikat	10.000		
		4 Persentase Bahan Keputusan Gubernur yang dikeluarkan untuk Penetapan Lokasi pembangunan bagi kepentingan umum	Persen	100		
		5 Ketersediaan Data Spasial Pertanahan	Kawasan	10		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan Dan Permukiman	1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman	Persen	100	100	100,00
	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Dan Permukiman					
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap	Unit	350		

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman				
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	100		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**85,82**
1	05	01	038	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat						
					1	Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	150	166	110,67
					2	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kali	800	509	63,63
					3	Jumlah kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas	Kali	100	27	27,00
					4	Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Jawa Barat	Orang	756	216	28,57
					5	Jumlah Pol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten	Orang	520	520	100,00
1	05	01	039	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100	100	100,00
					2	indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	Persen	100		
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
1	05	01	040	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100	100	100,00
1	05	01	041	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100	100	100,00
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**96,47**
1	05	02	042	Program Pengurangan Kerentanan Bencana						
					1	Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan	Persen	80	85	106,25
					2	Tingkat Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	Persen	75	80	106,67
1	05	02	043	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana						
					1	Tingkat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab./Kota	27	27	100,00
					2	Tingkat Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persen	90	90	100,00
					3	Tingkat Pemulihan Pasca Bencana	Persen	95	80	84,21
1	05	02	044	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	1	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persen	75	78	104,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
1	05	02	045	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	90	90,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	90	90,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	85	85,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	80	80,00
1	05	02	046	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	85	85,00
1	05	02	047	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	70	85	121,43
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	350	350	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	98	98,00
				DINAS SOSIAL						**879,59**
1	06	01	052	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1	Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	2,61	72,44	2.775,48
1	06	01	053	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						
					1	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	1	53,81	5.381,00
					2	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Persen	100	6,42	6,42
1	06	01	054	Program Pemberdayaan Sosial						
					1	Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	8,85	45,49	514,01
					2	Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	7,92	1,96	24,75
					3	Persentase sumber dana bantuan social yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	44,00	0,85	1,93
					4	Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen	1	0,59	59,00
					5	Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen	45,55	17,28	37,94
1	06	01	055	Program Penanganan Fakir Miskin	1	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen	1	53,81	5.381,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
1	06	01	056	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Sosial	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Sosial	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Sosial	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Sosial	Persen	100	100	100,00
1	06	01	057	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Sosial	Persen	100	100	100,00
1	06	01	058	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sosial						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Sosial	Persen	70	100	142,86
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Sosial	Unit	350	100	28,57
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sosial	Persen	100	100	100,00
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**83,76**
1	07	01	059	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
					1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	57	0,11	0,19
					2	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi	Orang	500	400	80,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					3	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	1000	830	83,00
1	07	01	060	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
					1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	50	31,07	62,15
					2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	12	13,46	112,20
1	07	01	061	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	60	35,37	58,94
1	07	01	062	Program Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						
					1	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	12.000	8.557	71,31
					2	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Perusahaan	6.000		
1	07	01	063	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	07	01	064	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100	100	100,00
1	07	01	065	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Unit	350	300	85,71
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100	100	100,00
1	08	01	068	Program Pengembangan Transmigrasi	1	Jumlah Perjanjian Kerjasama	Perjanjian	15	13	86,67
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA						**361,57**
1	08	01	066	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak lintas daerah Kabupaten/Kota						
					1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	60	100	166,67
					2	Persentase Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional	Persen	70	85,18	121,69
					3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	80	100	125,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
1	08	01	067	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100	100	100,00
1	08	01	068	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	90	14	15,56
1	08	01	069	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan	Persen	70	100	142,86

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						perundang-undangan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana				
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	persen	350	100	28,57
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100	100	100,00
1	14	01	088	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	1	Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera	Keluarga	1.083.117	1.157.346	106,85
1	14	01	089	Program Pelayanan Keluarga Berencana						
					1	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	73	100	136,99
					2	Cakupan KB Pria	Persen	2,50	100	4.000,00
1	14	01	090	Program Pendewasaan Usia Perkawinan	1	Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	Persen	75	59,52	79,36
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**106,31**
1	11	01	072	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup						
					1	Indeks Kualitas Air	Poin	42,47	42,73	100,61
					2	Indeks Kualitas Udara	Poin	79,31	79,4	100,11
					3	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pengelolaan Limbah Domestik	Persen	0,62	0,78	125,81
1	11	01	073	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100,00
1	11	01	074	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100,00
1	11	01	075	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Persen	70	100	142,86
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100,00
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**103,28**
1	12	01	076	Program Penataan Administrasi Kependudukan						
					1	Akurasi Data Kependudukan	Persen	80	80,53	100,66
					2	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah	12	16	133,33
					3	Tertib Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	90	91,84	102,04
1	12	01	077	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta						

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
				Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100,00
1	12	01	078	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100,00
1	12	01	079	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Unit	350	350	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100,00
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**114,12**
1	13	01	080	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat						
					1	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlibat dalam Kegiatan TMMD, BSMSS,dan BBGRM	Persen	80	100	125,00
					2	Persentase Lembaga Lembaga Budaya dan Keswadayaan Masyarakat	Persen	80	100	125,00
					3	Persentase Posyandu Mandiri	Persen	100	27,06	27,06
1	13	01	081	Program Pemantapan Kerja Sama Pemerintah Desa Antar Perbatasan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi						
					1	Identifikasi potensi kawasan perdesaan di perbatasan	Kabupaten	5	6	120,00
					2	Jumlah kerjasama pengembangan potensi kawasan perdesaan di perbatasan	Kabupaten	5	2 provinsi	
1	13	01	082	Program Pemantapan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa						
					1	Persentase tingkat perkembangan desa mandiri	Persen	25		
					2	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang memiliki pendidikan di atas pendidikan mininal	Persen	65		
					3	Jumlah desa yang sudah menerapkan SISKEUDES	Desa	60	90	150,00
					4	Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa sesuai standar baku sarana dan prasarana pemerintahan desa	Persen	50		

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
1	13	01	083	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan						
					1	Prosentase anggaran APB-Desa diatas 30% untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Persen	40	100	250,00
					2	Jumlah desa yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah desa	Dokumen	40	40	100,00
1	13	01	084	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan						
					1	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	50	73,26	146,52
					2	Jumlah dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat	Buah	25	27	108,00
					3	Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	70	70	100,00
					4	Persentase Kerjasama Pengembangan Kapasitas Produksi Desa, dan Akses Pemasaran Potensi Desa	Persen	30	30	100,00
					5	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	50	79,74	159,48
1	13	01	085	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100	100	100,00
1	13	01	086	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100	100	100,00
1	13	01	087	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	70	100	142,86
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Unit	350	100	28,57
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100	100	100,00
				DINAS PERHUBUNGAN						**67,00**
1	15	01	091	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1	Persentase ketersediaan Prasarana Transportasi Darat,Laut & ASDP, Kereta Api dan Udara	Persen	79		
1	15	01	092	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum						
					1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Orang	174.000.000		

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					2	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Transportasi	Persen	0,42		
1	15	01	093	Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi	Persen	38		
1	15	01	094	Program Pengendalian dan Pengamanan Perhubungan	1	Persentase Angkutan Penumpang Umum (AKDP) yang Daftar Ulang Kartu Pengawasan	Persen	56		
1	15	01	095	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perhubungan	Persen	100		
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan	Persen	100		
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perhubungan	Persen	100		
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan	Persen	100		
1	15	01	096	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perhubungan	Persen	100	67	67,00
1	15	01	097	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perhubungan	Persen	70		
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perhubungan	Unit	350		

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perhubungan	Persen	100		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**106,51**
1	16	01	098	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi						
					1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,5	3,12	124,80
					2	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	Media	15		
					3	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah	Persen	80	93	116,25
1	16	01	099	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100		
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100		
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100		
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100	100	100,00
1	16	01	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	85	85,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
1	16	01	101	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	70		
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika	Unit	350		
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100		
1	20	01	117	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1	Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	70		
1	21	01	118	Program Penyelenggaraan Persandian daerah						
					1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Skala Tingkat Kematangan	III		
					2	Tingkat Penyelenggaraan Persandian	Skala Tingkat Kematangan	II		
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL						**106,57**
1	17	01	102	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
					1	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persen	20	29,84	149,20
					2	Pertumbuhan Akses Modal KUK	Persen	20	24,61	123,05

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					3	Pertumbuhan Jumlah Rasio Wirausaha	Persen	1,5	1,5	100,00
1	17	01	103	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100	100	100,00
1	17	01	104	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100	100	100,00
1	17	01	105	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100	100	100,00
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**101,00**

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
1	18	01	106	Program Peningkatan Investasi Daerah	1	Jumlah Nilai Investasi PMA-PMDN	Trilyun Rupiah	108,5	137,5	126,73
1	18	01	107	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin	79	81,62	103,32
1	18	01	108	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100	95	95,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100	100	100,00
1	18	01	109	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100	85	85,00
1	18	01	110	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	70	70	100,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100	100	100,00
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						**103,95**
1	19	01	111	Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan						
					1	Jumlah pemuda berprestasi Nasional. (Pemuda pelopor, PPAN, Paskibraka, KPN)	Orang	17	19	111,76
					2	Persentase Pemuda yang Berwirausaha atas Pembinaan Kewirausahaan	Persen	10	10	100,00
					3	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Terdata	Persen	20	15	75,00
					4	Prestasi Marching Band di Tingkat Nasional	Peringkat	1	1	100,00
					5	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori	5	5	100,00
					6	Jumlah Event Kepemudaan Tingkat Jawa Barat	Event	2	2	100,00
					7	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan di Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab/Kota	5	0	0,00
1	19	01	112	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga						
					1	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga	Orang	10.137	39.367	388,35
					2	Persentase Kecamatan Penempatan Sarjana Pendamping, Penggerak, Pembangunan Olahraga (SP3OR)	Persen	17,28	17,28	100,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					3	Persentase Tenaga Olahraga Tradisional, Layanan Khusus dan Rekreasi yang dibina yang bersertifikat	Persen	10	8,4	84,00
					4	Jumlah event olahraga Tradisional, Layanan khusus dan Rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti	Event	9	9	100,00
1	19	01	113	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga						
					1	Jumlah Penerima Penghargaan Insan Olahraga Berprestasi/Berjasa	Orang	1.160	342	29,48
					2	Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional:				
						a. POPNAS	Persen	20	17	85,00
						b. POPWILNAS	Persen	0	0	100,00
						c. PEPARPENAS	Persen	12	7,82	65,17
					3	Persentase Sertifikat Lanjutan bagi Tenaga Olahraga Prestasi yang dibina	Persen	10	12,8	128,00
					4	Persentase Pembangunan Kawasan SPOrT Jabar Arcamanik	Persen	90	0	0,00
					5	Jumlah Event Olahraga yang Mendukung Prestasi Olahraga Jawa Barat	Event	7	7	100,00
					6	Jumlah Sarana dan Prasarana keolahragaan di Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab/Kota	5	12	240,00
1	19	01	114	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						pelaporan keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga				
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen	100	100	100,00
1	19	01	115	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda Dan Olahraga	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen	100	100	100,00
1	19	01	116	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen	100	100	100,00
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**31,00**
1	23	01	121	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Indeks membaca masyarakat	Poin	69		
1	23	01	122	Program Pelestarian Koleksi Naskah Kuno	1	Persentase pelestarian koleksi naskah kuno	Persen	60		
1	23	01	123	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah						

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
1	23	01	124	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
1	23	01	125	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	70		
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Unit	350		
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
1	24	01	126	Program Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan	1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	Persen	37		

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
1	24	01	127	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1	Persentase arsip statis yang diselamatkan	Persen	100	31	31,00
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**113,19**
2	01	01	128	Program Peningkatan Produksi Perikanan Dan Daya Saing Produk Perikanan						
					1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	244.000,00	249.754,40	102,36
					2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.200.000,00	1.269.657,38	105,80
					3	Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	Persen	91	99	108,79
					4	Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/Kap/Tahun	29,10	30,54	104,95
2	01	01	129	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						
					1	Peningkatan Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara akuntabel	Persen	75	78,57	104,76
					2	Jumlah Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan	1	2	200,00
					3	Jumlah Benih Ikan yang ditebar di Perairan Daratan	Ekor	60.000.000	29.060.500	48,43
					4	Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	4	5	125,00
					5	Produksi garam	Ton	245.978,0	445.727,6	181,21
2	01	01	130	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan				
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100,00
2	01	01	131	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100,00
2	01	01	132	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	70	100	142,86
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100,00
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**192,55**
	22	01	119	Program Pengembangan Nilai Budaya						
					1	Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Jumlah Pembinaan Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah)	Pembinaan	3	16	533,33
					2	Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman (Jumlah Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman)	Pembinaan	3	30	1.000,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					3	Pengusulan HKI	Usulan/ Rekomend asi Per Tahun	1	1	100,00
	22	01	120	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya						
					1	Pelestarian Seni Tradisi (Jumlah Pembinaan Pelestarian Seni Tradisi)	Pembinaa n	3	9	300,00
					2	Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/ Lomba/Sayembara Karya Seni	Event Per Tahun	5	7	140,00
2	02	01	133	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun	3	3	100,00
2	02	01	134	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
					1	Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun	5	5	100,00
					2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat	Orang Per Tahun	6.030.682	6.030.682	100,00
					3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusatntara ke Jawa Barat	Orang Per Tahun	72.169.325	72.169.325	100,00
2	02	01	136	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100	100	100,00
2	02	01	135	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100	100	100,00
2	02	01	137	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100	100	100,00
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN						**98,79**
	09	01	070	Program Ketahanan Pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	86,5		
2	03	01	146	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Peternakan						
					1	Produksi Komoditas Peternakan:				
						a Daging	Ton	1.043.467	1065014**	102,06
						b.Telur	Ton	243.517	262989**	108,00
						c.Susu	Ton	326.698	351885**	107,71
					2	Jumlah Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit	480	502	104,58
					3	Peningkatan mutu produk peternakan				
						a. Daging	Persen	60	84,79	141,32
						b.Telur	Persen	81	41,78	51,58

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						c.Susu	Persen	81	48,68	60,10
					4	Bobot Kinerja Pengendalian PHMS di Jawa Barat	Poin	76	80	105,26
2	03	01	147	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100	100	100,00
2	03	01	148	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100	100,00	100,00
2	03	01	149	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	70	70,00	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Unit	350	350	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan				
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100	100	100,00
				DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						**76,32**
2	03	01	138	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura						
					1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	2,5	-7,13	-285,19
					2	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	1,5	3,96	263,88
					3	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Persen	2,5	1,52	60,80
2	03	01	139	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100	100	100,00
2	03	01	140	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100	100	100,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
2	03	01	141	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100	100	100,00
	DINAS PERKEBUNAN									**103,53**
2	03	02	142	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Perkebunan						
					1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Rata-rata Komoditas Perkebunan	Persen	2,6	4,71	181,15
					2	Peningkatan ketersediaan benih unggul komoditas perkebunan	Persen	2,6	2,7	103,85
					3	peningkatan benih tanaman perkebunan tersertifikasi	Persen	2,6	2,7	103,85
					4	Peningkatan Kemantapan Kelembagaan	Persen	2,6	2,75	105,77
					5	Optimalisasi Lahan Perkebunan	Ha	≥484.234	485.529	100,27
					6	Penurunan intensitas serangan OPT Perkebunan	Persen	-1	-1,20	80,00
					7	Peningkatan Penerapan Jaminan Mutu	Persen	10	10,81	108,10
2	03	02	143	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta						

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
				Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perkebunan	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perkebunan	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perkebunan	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perkebunan	Persen	100	90	90,00
2	03	02	144	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perkebunan	Persen	100	90	90,00
2	03	02	145	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perkebunan						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perkebunan	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perkebunan	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perkebunan	Persen	100	90	90,00
				DINAS KEHUTANAN						**870,99**
2	04	01	150	Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat						
					1	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	1	108,15	10.815,00
					2	Peningkatan Jasa Wisata Alam	Persen	8	-5,75	-71,88

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					3	Bertambahnya Unit Manajemen Hutan Rakyat	Persen	20	0	0,00
2	04	01	151	Program Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya						
					1	Persentase Tutupan Hutan	Persen	33,06	33,67	101,85
					2	Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi yang memiliki izin	Persen	20	418,18	2.090,90
					3	Penurunan Gangguan Keamanan Hutan	Persen	2	2	100,00
					4	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan	Persen	10	0	0,00
					5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)	Persen	9,05	2.650.477	
2	04	01	152	Program Penyuluhan Kehutanan	1	Peningkatan Kompetensi Penyuluh	Persen	100	100	100,00
2	04	01	153	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kehutanan						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Kehutanan	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kehutanan	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kehutanan	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kehutanan	Persen	100	100	100,00
2	04	01	154	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kehutanan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kehutanan	Persen	100	100	100,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
2	04	01	155	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Kehutanan	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Kehutanan	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kehutanan	Persen	100	100	100,00
				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**169,56**
2	05	01	156	Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Geologi						
					1	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	34,53	40,87	118,36
					2	Persentase Peningkatan Muka Air Tanah	Persen	5	5,22	104,40
2	05	01	157	Program Pengembangan Energi						
					1	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	1.376	1302	94,62
					2	Jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Unit	600	916	152,67
					3	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi	Persen	0,36	3,81	1.058,33
2	05	01	158	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						pelaporan keuangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral				
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100	100	100,00
					5	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100	100	100,00
2	05	01	159	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100	100	100,00
2	05	01	160	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	70	100	142,86
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Unit	350	9	2,57
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100	100	100,00
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**20,24**
2	06	01	161	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga						
					1	Indeks Keberdayaan Konsumen	Poin	37	37	100,00
					2	Jumlah Pengujian Mutu Barang	Jumlah Pengujian	160	408	255,00
					3	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	SNI Wajib	20	16	80,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
2	06	01	162	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri						
					1	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	22	15,23	69,23
					2	IHK (Indeks Harga Konsumen) bahan makanan	Poin	150	4,18	104,50
2	06	01	163	Program Pengembangan Ekspor						
					1	Volume Ekspor	Ribu Ton	7.500,00	7.393,30	98,58
					2	Nilai Ekspor	Juta USD	30.000,00	29.709,05	99,03
2	06	01	164	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	100	100	100,00
2	06	01	165	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	100	100	100,00
2	06	01	166	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan	Persen	70	70	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
						perundang-undangan Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan				
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Unit	350	385	110,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	100	100	100,00
2	07	01	167	Program Pembangunan Industri						
					1	PDRB sektor industri non-migas	Rp. Triliun	821,95	884,12	107,56
					2	Jumlah Unit usaha Industri	Unit Usaha	211.000	214.287	101,56
					3	PMA sektor Industri	Rp. Triliun	16,7	-50,69	-303,53
					4	PMDN sektor industri	Rp. Triliun	4,8	-54,59	-1.137,29
				SEKRETARIAT DAERAH						**108,18**
3	05	03		Program Pendidikan Politik Masyarakat						
					1	Persentase Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian antar waktu DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	Persen	95	95	100,00
					2	Persentase Fasilitasi pengangkatan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	95	95	100,00
3	05	03	194	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah						
					1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Persen	85		
					2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	82,3		
					3	Persentase Penggunaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Mulai Dari	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						Perencanaan, Proses Pengadaan sampai dengan Monev/Pelaporan				
					4	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Kategori	A		
3	05	03	195	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM	1	Persentase harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan prodak hukum daerah	Persen	80	96,56	120,70
3	05	03	196	Program Kerja Sama Pembangunan	1	Kerja sama antar daerah	Buah	10	10	100,00
					2	Kerja sama dengan pihak ketiga	Buah	15	15	100,00
					3	Kerja sama luar negeri	Buah	3	6	200,00
					4	Peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi terkait upaya sinkronisasi regulasi bidang kerja sama daerah	Buah	3		
3	05	03	197	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan						
					1	Persentase Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persen	80	80	100,00
					2	Persentase Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian antar waktu DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	Persen	95	95	100,00
					3	Prosentasi Fasilitasi pengangkatan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	95	95	100,00
					4	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dokumen	9	9	100,00
					5	Jumlah Dokumen fasilitasi administrasi kependudukan dan Pemerintahan Desa	Dokumen	15	15	100,00
					6	Tingkat Persepsi Publik yang Positif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Kualifikasi "Baik"	61 - 79 (baik)		
					7	Kontribusi BUMD terhadap PAD meningkat	Kali	4		
					8	Jumlah BUMD yang dibina dan diawasi	BUMD	12		

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					9	Rata-rata Kontribusi Deviden terhadap PAD	Persen	2		
					10	Keputusan Gubernur untuk Penetapan Lokasi pembangunan bagi kepentingan umum	Kepgub	9		
					11	Dokumen fasilitasi administrasi kependudukan dan Pemerintahan Desa	Dokumen	15		
					12	Jumlah Forum Komunikasi dengan insan pers dan media massa	Forum	4	4	100,00
3	05	03	198	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100,00
3	05	03	199	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100,00
3	05	03	200	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat Daerah	Persen	70	100	142,86
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap	Unit	350		

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
						PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Sekretariat Daerah				
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100,00
	SEKRETARIAT DPRD									**90,99**
3	05	04	201	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						
					1	Tingkat kinerja DPRD	Persen	100	71,09	71,09
					2	Tingkat dukungan dan fasilitasi DPRD	Persen	100	68,64	68,64
3	05	04	202	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100	92,24	92,24
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100	99,22	99,22
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100	99,67	99,67
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100	96,00	96,00
3	05	04	203	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100	86,21	86,21
3	05	04	204	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Provinsi						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	70	86,21	123,16

Kode	Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
					Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	7
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi	Unit	350	321	91,71
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100	81,99	81,99
	BADAN PENGHUBUNG						**100,00**
	Program Fasilitasi Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	1	Jumlah Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	Event/Promosi	15		
	Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat	1	Persentasi Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat yang Efektif dan Efisien	Persen	100		
	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung						
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Penghubung	Persen	100		
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penghubung	Persen	100		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penghubung	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penghubung	Persen	100		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung	1	Tingkat Pemenuhun sarana dan prasarana kerja di Badan Penghubung	Persen	100	100	100,00
	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penghubung						
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan	Persen	70		

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						perundang-undangan Lingkup Badan Penghubung				
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Penghubung	Unit	350		
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penghubung	Persen	100		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									**101,91**
3	01	01	169	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
					1	Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	30	35	116,67
					2	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota	Persen	80	85	106,25
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100,00
3	01	01	170	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100,00
3	01	01	171	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100,00
3	01	01	172	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									**100,00**
3	02	01	173	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah						
					1	Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Buah	3	3	100,00
					2	Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	Persen	100	100	100,00
					3	Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	Persen	40	40	100,00
					4	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.	Persen	85	85	100,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
3	02	01	174	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100	100	100,00
3	02	01	175	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100	100	100,00
3	02	01	176	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Unit	350	350	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
						Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100	100	100,00
				BADAN PENDAPATAN DAERAH						**97,72**
3	02	02	177	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
					1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	56,52	58,95	104,30
					2	Dana Perimbangan	Persen	43,16	40,83	94,60
					3	Pendapatan lain2-lain yang sah	Persen	0,31	0,22	70,97
					4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pendapatan Daerah)	Skor	82,3	84,6	102,79
3	02	02	178	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah	Persen	100	100	100,00
3	02	02	179	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Pendapatan Daerah	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
3	02	02	180	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Pendapatan Daerah	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Pendapatan Daerah	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pendapatan Daerah	Persen	100	100	100,00
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						**113,61**
3	03	01	185	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
					1	Persentase pegawai yang mencapai SKP diatas 76%;	Persen	80	87,89	109,86
					2	Persentase Pelanggaran Disiplin	Persen	2	0,05	197,50
					3	Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan Formal	Orang	200	237	118,50
					4	Tingkat Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen	100	80	80,00
3	03	01	186	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan	Persen	100	100	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah				
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100,00
3	03	01	187	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100	97,52	97,52
3	03	01	188	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Kepegawaian Daerah	Persen	70	80	114,29
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Kepegawaian Daerah	Unit	350	510	145,71
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100,00
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									**328,08**
3	03	02	181	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur						
					1	Jumlah ASN yang terfasilitasi uji keahlian (kompetensi)	Orang	220	5.122	2.328,18
					2	Jumlah ASN/Pejabat Negara yang terfasilitasi pengembangan kompetensi	Orang	720	862	119,72

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
3	03	02	182	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100	90	90,00
3	03	02	183	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100	100	100,00
3	03	02	184	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	70	100	142,86
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Unit	350	350	100,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
						Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100	100	100,00
	INSPEKTORAT									**103,48**
3	05	05	205	Program Pembinaan dan Pengawasan						
					1	Hasil Penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di Tngkat Nasional	Poin	3275		
					2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat	A	A	100,00
					3	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	100,00
					4	Level Maturitas SPIP Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level	III	III	100,00
					5	Persentase Penyelasaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	75	94	125,33
					6	Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen	90	83	92,22
					7	Persentase Nilai Indikator RAD-PPK	Persen	100	100	100,00
					8	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen	75	101	134,67
3	05	05	206	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100	100	100,00

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100	100	100,00
3	05	05	207	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100	100	100,00
3	05	05	208	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Provinsi						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100	100	100,00
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						**92,78**
3	02	01	176	Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK						
					1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berbasis IPTEK	Jumlah	5	4	80,00

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					2	Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat	Jumlah	10	10	100,00
					3	Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk mendapat Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah	60	20	33,33
					4	Jumlah Inovasi yang Ditindaklanjuti menjadi SIDa	Jumlah	15	15	100,00
				Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100	100,00
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100	100,00
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100	100,00
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100	100,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100	100,00
				Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah						

Kode				Program		Indikator Kinerja	Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2		3	4	5	6	7
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	70	70	100,00
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Unit	350	350	100,00
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100	100,00
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**0,00**
1	05	03	048	Program Kesatuan Bangsa dan Politik						
					1	Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	Poin	73		
					2	Rasio masyarakat Jawa Barat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen	1,5		
					3	Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	Persen	59		
					4	Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	Persen	50		
					5	Tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama	Skala	68,5		
1	05	03	049	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
					1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		

Kode				Program	Indikator Kinerja		Satuan	2019		Tingkat Capaian
								Target	Realisasi	
1				2	3		4	5	6	7
					2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		
					3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		
					4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		
1	05	03	050	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		
1	05	03	051	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
					1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	70		
					2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Unit	350		
					3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		

Sumber: hasil pengolahan data, 2020

Keterangan:

Melampaui
Tercapai
Belum Tercapai

Tabel 2
Realisasi Anggaran Program Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2019

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	**6.956.588.106.544**	**7.114.134.625.699**	**5.988.690.816.519**	**84,18**
01	**01**		**Dinas Pendidikan**	**2.697.242.530.631**	**2.941.472.189.027**	**2.736.656.604.479**	**93,04**
01	01	001	Program Pendidikan Menengah	1.306.738.798.631	1.314.521.365.825	1.235.421.005.369	93,98
01	01	002	Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus	60.803.757.000	53.731.543.650	49.100.914.853	91,38
01	01	003	Program Pembinaan Dan Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	49.211.025.000	50.383.020.340	42.560.880.780	84,47
01	01	004	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.046.697.000.000	1.287.252.372.590	1.199.763.869.230	93,20
01	01	005	Program Penyusunan Rencana Pengendalian Dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	16.055.000.000	15.126.400.000	13.551.228.908	89,59
01	01	006	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan	37.748.140.000	37.474.633.023	34.247.502.029	91,39
01	01	007	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan	179.988.810.000	182.982.853.599	162.011.203.310	88,54
02	**01**		**Dinas Kesehatan**	**1.221.305.777.982**	**1.177.049.512.892**	**939.691.148.515**	**79,83**
02	01	008	Program Promosi Kesehatan	2.759.412.300	2.153.124.752	1.904.306.086	88,44
02	01	009	Program Pengembangan lingkungan sehat	1.178.521.000	1.178.513.241	1.109.039.957	94,11
02	01	010	Program Pelayanan Kesehatan	221.011.767.700	69.018.498.117	23.657.929.992	34,28
02	01	011	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.486.884.000	8.095.793.882	7.065.994.500	87,28
02	01	012	Program Sumber Daya Kesehatan	87.793.992.500	52.453.521.897	49.265.360.343	93,92
02	01	013	Program Manajeman Kesehatan	5.420.980.000	3.238.211.275	2.660.767.537	82,17

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
02	01	014	Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi	1.956.627.100	1.956.626.797	1.468.866.500	75,07
02	01	015	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi	673.806.338.445	822.423.759.290	660.969.737.011	80,37
02	01	016	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	6.584.370.000	4.046.482.422	2.053.882.184	50,76
02	01	017	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan	79.462.291.937	78.843.843.753	75.594.348.331	95,88
02	01	018	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan	132.844.593.000	133.641.137.466	113.940.916.074	85,26
03	**01**		**Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang**	**1.187.671.510.550**	**1.211.543.302.689**	**1.035.065.512.835**	**85,43**
03	01	019	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	400.390.303.450	420.667.834.669	360.801.876.029	85,77
03	01	020	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	660.407.082.100	608.307.100.086	518.058.006.946	85,16
03	01	021	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	93.577.500.000	146.991.658.183	125.570.116.083	85,43
03	01	022	Program Penataan Ruang	3.850.210.000	4.340.417.600	3.093.797.699	71,28
03	01	023	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	610.280.000	610.279.885	523.142.209	85,72
03	01	024	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	5.915.850.000	6.885.518.984	6.070.577.815	88,16
03	01	025	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	22.920.285.000	23.740.493.282	20.947.996.054	88,24
03	**02**		**Dinas Sumber Daya Air**	**396.055.248.824**	**340.460.814.842**	**181.249.397.399**	**53,24**
03	02	026	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Situ Sungai Pantai dan Sumber Daya Air lainnya	218.526.594.824	214.317.715.777	61.374.187.944	28,64

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
03	02	027	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tambak dan Jaringan Pengairan lainnya	131.618.323.000	79.953.042.459	77.315.820.162	96,70
03	02	028	Program Pengendalian Daya Rusak Air	4.900.000.000	3.924.105.705	3.526.951.141	89,88
03	02	029	Program Pengelolaan Kelembagaan Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air	10.063.750.000	10.053.023.848	9.455.108.608	94,05
03	02	030	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air	1.050.000.000	978.600.576	922.792.424	94,30
03	02	031	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sumber Daya Air	3.820.350.000	3.723.952.484	3.516.154.093	94,42
03	02	032	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sumber Daya Air	26.076.231.000	27.510.373.993	25.138.383.027	91,38
04	**01**		**Dinas Perumahan Dan Permukiman**	**244.098.322.138**	**228.939.272.483**	**118.814.785.430**	**51,90**
03	01	033	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	14.174.000.000	13.902.643.384	10.449.024.574	75,16
04	01	034	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	203.825.360.500	186.541.708.142	81.016.680.181	43,43
04	01	035	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.300.000.000	981.761.826	800.053.778	81,49
04	01	036	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan Dan Permukiman	966.274.638	1.292.860.276	1.267.404.600	98,03
04	01	037	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Dan Permukiman	20.882.687.000	23.288.610.577	22.419.472.640	96,27
10	01	071	Program Pengadaan Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	2.950.000.000	2.931.688.278	2.862.149.657	97,63
05	**01**		**Satuan Polisi Pamong Praja**	**15.115.800.000**	**16.258.242.294**	**14.941.771.555**	**91,90**
05	01	038	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	8.536.500.000	8.702.994.718	8.061.949.705	92,63

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
05	01	039	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	733.410.000	983.410.000	885.039.700	90,00
05	01	040	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	1.107.258.200	1.107.258.200	1.056.946.900	95,46
05	01	041	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	4.738.631.800	5.464.579.376	4.937.835.250	90,36
05	**02**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**21.311.800.000**	**21.490.760.081**	**18.724.194.143**	**87,13**
05	02	042	Program Pengurangan Kerentanan Bencana	1.424.300.000	1.422.927.187	1.311.904.200	92,20
05	02	043	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	11.660.000.000	11.631.869.071	10.451.064.369	89,85
05	02	044	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	1.300.000.000	1.305.935.500	1.259.095.114	96,41
05	02	045	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	968.900.000	968.581.447	781.967.297	80,73
05	02	046	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.520.000.000	1.540.478.372	462.248.693	30,01
05	02	047	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.438.600.000	4.620.968.504	4.457.914.470	96,47
06	**01**		**Dinas Sosial**	**108.025.400.000**	**108.268.821.282**	**100.977.949.348**	**93,27**
06	01	052	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	40.885.032.400	41.094.217.732	39.221.814.414	95,44
06	01	053	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.757.025.000	5.756.882.658	5.296.806.862	92,01
06	01	054	Program Pemberdayaan Sosial	5.033.150.000	5.032.799.548	4.869.395.029	96,75
06	01	055	Program Penanganan Fakir Miskin	3.096.905.000	3.096.895.705	3.058.380.241	98,76
06	01	056	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial	2.881.717.000	2.881.713.080	2.488.840.316	86,37

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
06	01	057	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial	25.752.961.956	24.807.534.961	21.757.738.035	87,71
06	01	058	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sosial	24.618.608.644	25.598.777.598	24.284.974.451	94,87
07	**01**		**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**79.972.400.000**	**65.189.001.847**	**53.053.531.125**	**81,38**
07	01	059	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	13.077.194.000	13.009.526.055	11.824.050.928	90,89
07	01	060	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	4.585.427.000	4.585.374.919	4.166.627.418	90,87
07	01	061	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4.314.050.200	4.314.043.758	3.669.910.709	85,07
07	01	062	Program Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	6.065.865.000	6.084.659.250	5.754.453.120	94,57
07	01	063	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.703.245.000	2.703.202.924	2.458.424.427	90,94
07	01	064	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	29.134.800.550	13.834.945.193	6.618.478.381	47,84
07	01	065	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	18.921.903.650	19.487.343.668	17.513.728.314	89,87
08	01	168	Program Pengembangan Transmigrasi	1.169.914.600	1.169.906.080	1.047.857.828	89,57
08	**01**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana**	**59.818.690.000**	**63.141.856.428**	**41.163.605.785**	**65,19**
08	01	066	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak lintas daerah Kabupaten/Kota	19.180.565.000	19.761.555.911	17.655.512.546	89,34
08	01	067	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.490.000.000	1.490.000.000	1.160.541.600	77,89

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
08	01	068	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	20.834.000.000	21.080.593.650	2.926.556.460	13,88
08	01	069	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	4.614.125.000	4.612.211.691	4.168.569.111	90,38
14	01	088	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	11.000.000.000	13.497.499.920	12.888.556.149	95,49
14	01	089	Program Pelayanan Keluarga Berencana	1.700.000.000	1.699.998.656	1.475.163.879	86,77
14	01	090	Program Pendewasaan Usia Perkawinan	1.000.000.000	999.996.600	888.706.040	88,87
11	**01**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**118.500.000.000**	**110.170.400.826**	**76.785.310.084**	**69,70**
11	01	072	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	69.255.472.350	59.894.088.979	36.348.358.069	60,69
	01	073	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	2.290.000.000	2.330.499.196	1.900.118.220	81,53
	01	074	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	3.761.928.240	3.830.582.328	3.512.496.899	91,70
	01	075	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup	43.192.599.410	44.115.230.323	35.024.336.896	79,39
12	**01**		**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**10.596.200.000**	**10.827.485.920**	**9.703.924.070**	**89,62**
12	01	076	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.250.000.000	5.249.216.643	5.069.411.670	96,57
12	01	077	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	450.000.000	449.967.710	413.824.864	91,97
12	01	078	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	860.000.000	1.067.763.227	1.025.480.323	96,04
12	01	079	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.036.200.000	4.060.538.340	3.195.207.213	78,69

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
13	**01**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**	**158.892.076.378**	**156.052.664.340**	**142.540.209.584**	**91,34**
13	01	080	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	9.407.500.000	8.773.450.250	7.908.347.047	90,14
13	01	082	Program Pemantapan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa	54.766.000.000	54.614.895.121	52.002.869.010	95,22
13	01	083	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	21.703.574.800	19.224.731.200	13.689.507.950	71,21
13	01	084	Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan	53.406.600.000	53.406.600.000	52.487.529.036	98,28
13	01	085	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.685.600.000	3.685.600.000	2.572.487.051	69,80
13	01	086	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9.225.801.578	8.886.752.997	7.612.346.640	85,66
13	01	087	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.697.000.000	7.460.634.772	6.267.122.850	84,00
15	**01**		**Dinas Perhubungan**	**249.546.314.000**	**271.100.165.805**	**179.257.775.110**	**66,12**
15	01	091	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	102.289.102.000	116.525.258.379	54.898.555.387	47,11
15	01	092	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	73.367.450.000	77.042.463.575	53.450.187.299	69,38
15	01	093	Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	16.003.544.000	16.255.508.979	15.758.057.358	96,94
15	01	094	Program Pengendalian dan Pengamanan Perhubungan	9.338.500.000	9.623.415.775	8.665.342.096	90,04
15	01	095	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan	1.596.235.000	1.596.184.011	1.136.582.891	71,21
15	01	096	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan	10.118.237.000	12.488.391.726	11.156.702.817	89,34
15	01	097	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan	36.833.246.000	37.568.943.360	34.192.347.262	91,01

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
16	**01**		**Dinas Komunikasi Dan Informatika**	**86.059.400.000**	**89.489.262.908**	**82.294.110.506**	**91,96**
16	01	098	Program Pengembangan Komunikasi Informasi Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	62.414.000.000	64.152.064.752	59.147.073.228	92,20
16	01	099	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.349.000.000	1.382.433.404	1.278.489.256	92,48
16	01	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.356.486.600	3.253.338.359	2.884.315.884	88,66
16	01	101	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika	8.919.913.400	9.353.747.473	8.344.501.572	89,21
20	01	117	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	3.450.000.000	3.849.399.297	3.364.888.135	87,41
21	01	118	Program Penyelenggaraan Persandian daerah	6.570.000.000	7.498.279.623	7.274.842.431	97,02
17	**01**		**Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil**	**143.691.036.600**	**143.785.818.640**	**113.583.538.590**	**78,99**
17	01	102	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	129.515.736.600	129.560.577.577	100.827.231.109	77,82
17	01	103	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	1.990.000.000	2.039.999.350	1.872.464.288	91,79
17	01	104	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	2.500.000.000	2.338.371.770	2.170.722.134	92,83
17	01	105	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	9.685.300.000	9.846.869.943	8.713.121.059	88,49
18	**01**		**Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu**	**37.295.928.375**	**35.881.548.912**	**33.122.738.935**	**92,31**
18	01	106	Program Peningkatan Investasi Daerah	3.847.975.000	4.011.429.914	3.649.007.661	90,97
18	01	107	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.800.000.000	5.616.717.935	5.425.259.284	96,59

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
18	01	108	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.275.000.000	1.342.803.990	1.199.518.190	89,33
18	01	109	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.577.953.375	2.800.838.753	2.702.943.920	96,50
18	01	110	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.795.000.000	22.109.758.320	20.146.009.880	91,12
19	**01**		**Dinas Pemuda Dan Olahraga**	**87.542.671.066**	**86.982.003.271**	**75.977.518.419**	**87,35**
19	01	111	Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan	11.017.644.999	11.066.624.750	10.209.007.571	92,25
19	01	112	Program Pembinaan Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga	10.057.973.066	11.684.174.453	11.550.201.485	98,85
19	01	113	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Olahraga Prestasi Dan Organisasi Olahraga	49.703.871.050	46.269.936.447	37.381.942.319	80,79
19	01	114	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga	2.670.840.000	2.617.027.536	2.378.264.669	90,88
19	01	115	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda Dan Olahraga	680.000.000	1.135.604.925	1.080.619.300	95,16
19	01	116	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga	13.412.341.951	14.208.635.160	13.377.483.075	94,15
23	**01**		**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan**	**33.847.000.000**	**36.031.501.212**	**35.087.190.607**	**97,38**
23	01	121	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	9.850.505.550	11.182.041.921	10.926.926.317	97,72
23	01	122	Program Pelestarian Koleksi Naskah Kuno	453.389.000	453.386.800	434.709.740	95,88

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
23	01	123	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	489.813.750	528.739.150	457.630.012	86,55
23	01	124	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	6.942.222.950	7.771.425.383	7.479.918.861	96,25
23	01	125	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	11.789.538.250	11.834.545.402	11.576.311.116	97,82
24	01	126	Program Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan	2.956.023.000	2.898.969.800	2.860.517.169	98,67
24	01	127	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1.365.507.500	1.362.392.756	1.351.177.392	99,18
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**711.737.636.427**	**704.911.510.790**	**641.893.794.051**	**91,06**
01	**01**		**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**109.973.923.210**	**103.315.285.197**	**92.378.715.499**	**89,41**
01	01	128	Program Peningkatan Produksi Perikanan Dan Daya Saing Produk Perikanan	41.024.922.500	40.504.999.472	33.204.026.786	81,98
01	01	129	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	30.336.697.210	24.900.202.573	23.813.197.519	95,63
01	01	130	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	2.066.949.000	2.066.428.867	1.805.286.297	87,36
01	01	131	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	14.918.287.000	14.623.870.160	13.924.933.803	95,22
01	01	132	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	21.627.067.500	21.219.784.125	19.631.271.094	92,51
02	**01**		**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	**137.697.132.159**	**138.532.120.242**	**114.727.905.567**	**82,82**
02	01	133	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	71.235.000.000	62.356.636.113	49.162.831.852	78,84
02	01	134	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12.050.000.000	13.827.887.600	12.744.283.461	92,16
02	01	135	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.670.000.000	7.789.053.735	6.991.628.595	89,76

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
02	01	136	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.763.695.744	2.669.800.769	2.606.055.973	97,61
02	01	137	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	29.801.436.415	31.470.819.613	27.927.211.645	88,74
22	01	119	Program Pengembangan Nilai Budaya	9.100.000.000	9.099.526.378	6.150.055.672	67,59
22	01	120	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	10.077.000.000	11.318.396.034	9.145.838.369	80,81
03	**01**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan**	**65.677.823.580**	**61.614.261.265**	**57.248.737.591**	**92,91**
09	01	070	Program Ketahanan Pangan	8.209.922.000	8.191.912.354	7.327.797.491	89,45
03	01	146	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Peternakan	29.327.287.300	28.711.499.909	26.902.034.595	93,70
03	01	147	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	1.453.800.000	1.223.075.000	1.108.873.414	90,66
03	01	148	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	7.511.128.000	4.055.450.210	3.963.470.595	97,73
03	01	149	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	19.175.686.280	19.432.323.792	17.946.561.496	92,35
03	**01**		**Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura**	**125.930.747.108**	**135.276.862.997**	**130.055.265.400**	**96,14**
03	01	138	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura	82.647.250.108	91.808.610.749	87.997.336.667	95,85
03	01	139	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2.800.000.000	2.799.999.464	2.513.696.834	89,77
03	01	140	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	15.516.977.825	15.566.343.257	15.090.195.038	96,94
03	01	141	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	24.966.519.175	25.101.909.527	24.454.036.861	97,42

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
03	**02**		**Dinas Perkebunan**	**47.772.548.915**	**47.156.570.286**	**45.890.958.256**	**97,32**
03	02	142	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Perkebunan	28.437.500.000	28.435.138.228	27.747.048.876	97,58
03	02	143	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan	2.180.000.000	2.178.248.839	2.111.947.384	96,96
03	02	144	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan	7.597.836.023	6.989.586.256	6.884.558.668	98,50
03	02	145	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perkebunan	9.557.212.892	9.553.596.963	9.147.403.328	95,75
04	**01**		**Dinas Kehutanan**	**71.425.212.049**	**66.557.248.456**	**62.715.246.304**	**94,23**
04	01	150	Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.727.833.605	6.590.084.688	6.470.808.791	98,19
04	01	151	Program Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	23.351.570.395	23.211.527.726	22.523.119.893	97,03
04	01	152	Program Penyuluhan Kehutanan	1.090.000.000	1.089.977.559	1.071.442.305	98,30
04	01	153	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kehutanan	2.090.000.000	2.105.832.600	1.812.759.160	86,08
04	01	154	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kehutanan	7.276.057.000	3.617.160.707	3.292.102.486	91,01
04	01	155	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan	30.889.751.049	29.942.665.176	27.545.013.669	91,99
05	**01**		**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**67.031.273.056**	**66.362.527.196**	**59.203.200.649**	**89,21**
05	01	156	Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Geologi	11.250.446.000	8.100.966.379	7.366.371.916	90,93
05	01	157	Program Pengembangan Energi	22.285.825.000	22.261.652.008	18.422.711.759	82,76

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
05	01	158	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.475.000.000	1.463.300.769	1.186.835.221	81,11
05	01	159	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	12.482.757.056	14.415.841.449	13.531.209.155	93,86
05	01	160	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	19.537.245.000	20.120.766.591	18.696.072.598	92,92
07	**01**		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**86.228.976.350**	**86.096.635.151**	**79.673.764.785**	**92,54**
07	01	167	Program Pembangunan Industri	12.475.000.000	14.174.708.597	13.649.845.234	96,30
06	01	161	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	3.760.000.000	3.805.181.742	3.706.651.236	97,41
06	01	162	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	15.895.367.500	15.473.318.029	13.672.351.041	88,36
06	01	163	Program Pengembangan Ekspor	2.900.000.000	2.880.452.774	2.860.183.255	99,30
06	01	164	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.780.000.000	2.779.996.423	2.581.780.743	92,87
06	01	165	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	25.621.400.000	23.201.515.046	20.301.613.785	87,50
06	01	166	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	22.797.208.850	23.781.462.540	22.901.339.491	96,30
			FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**497.743.312.063**	**607.909.122.552**	**541.767.253.520**	**89,12**
05	**03**		**Sekretariat Daerah**	**326.250.862.063**	**382.649.946.208**	**339.927.471.714**	**88,84**
05	03	194	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	11.628.100.000	15.821.273.300	13.469.277.794	85,13
05	03	195	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kesadaran Hukum dan HAM	8.406.500.000	11.014.017.551	10.627.045.971	96,49
05	03	196	Program Kerja Sama Pembangunan	9.391.900.000	13.994.262.347	13.597.107.580	97,16

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
05	03	197	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	81.415.632.640	89.031.228.381	77.625.072.727	87,19
05	03	198	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	14.665.773.540	13.070.041.505	10.610.093.773	81,18
05	03	199	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah	17.540.592.573	24.505.697.057	20.746.363.689	84,66
05	03	200	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah	183.202.363.310	215.213.426.067	193.252.510.180	89,80
05	**04**		**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**155.720.350.000**	**209.493.729.087**	**187.244.643.542**	**89,38**
05	04	201	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	117.787.725.000	143.668.880.160	129.163.329.093	89,90
05	04	202	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi	1.050.000.000	1.049.999.516	1.018.736.561	97,02
05	04	203	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi	10.702.200.000	24.614.795.032	21.935.962.820	89,12
05	04	204	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Provinsi	26.180.425.000	40.160.054.379	35.126.615.068	87,47
05	**10**		**Badan Penghubung**	**15.772.100.000**	**15.765.447.257**	**14.595.138.264**	**92,58**
05	10	209	Program Fasilitasi Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	4.135.000.000	4.133.050.000	3.736.627.655	90,41
05	10	210	Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat	424.400.000	423.765.000	419.326.019	98,95
05	10	211	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung	100.000.000	99.376.000	98.819.850	99,44
05	10	212	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung	1.969.720.000	1.954.981.495	1.892.868.190	96,82
05	10	213	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penghubung	9.142.980.000	9.154.274.762	8.447.496.550	92,28

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**685.330.939.783**	**691.999.795.975**	**573.129.863.423**	**82,82**
01	**01**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**60.334.870.000**	**78.305.023.009**	**66.662.667.490**	**85,13**
01	01	169	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	44.097.500.000	58.366.512.224	48.673.303.832	83,39
01	01	170	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.180.000.000	1.253.729.897	1.190.806.537	94,98
01	01	171	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.198.520.000	5.281.464.658	4.474.708.440	84,72
01	01	172	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.858.850.000	13.403.316.230	12.323.848.681	91,95
02	**01**		**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**	**119.678.939.283**	**110.540.226.868**	**70.001.763.752**	**63,33**
02	01	173	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	38.706.639.283	32.286.267.126	18.691.330.584	57,89
02	01	174	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.850.000.000	1.850.669.908	1.540.939.462	83,26
02	01	175	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	39.400.000.000	38.626.864.173	22.576.066.750	58,45
02	01	176	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	39.722.300.000	37.776.425.661	27.193.426.956	71,99
02	**02**		**Badan Pendapatan Daerah**	**346.710.000.000**	**341.204.880.696**	**306.669.623.111**	**89,88**
02	02	177	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	28.694.600.000	27.779.507.852	25.705.244.971	92,53
02	02	178	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	7.850.025.000	6.582.840.341	6.216.720.592	94,44
02	02	179	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	127.546.268.902	119.433.065.457	112.231.508.610	93,97

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
02	02	180	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah	182.619.106.098	187.409.467.046	162.516.148.938	86,72
03	**01**		**Badan Kepegawaian Daerah**	**48.233.650.000**	**50.885.184.122**	**41.482.840.876**	**81,52**
03	01	185	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	32.819.739.500	35.567.119.780	28.086.408.484	78,97
03	01	186	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah	3.741.250.000	3.739.832.889	3.008.055.162	80,43
03	01	187	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah	1.038.050.000	1.037.664.225	770.421.969	74,25
03	01	188	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah	10.634.610.500	10.540.567.228	9.617.955.261	91,25
03	**02**		**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**96.473.480.500**	**97.284.283.946**	**76.098.228.388**	**78,22**
03	02	181	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	48.871.732.500	40.064.823.124	31.082.169.535	77,58
03	02	182	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.010.000.000	1.878.728.645	1.469.335.967	78,21
03	02	183	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.686.000.000	25.806.117.860	20.412.401.641	79,10
03	02	184	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.905.748.000	29.534.614.317	23.134.321.245	78,33
04	**01**		**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**13.900.000.000**	**13.780.197.334**	**12.214.739.806**	**88,64**
04	01	189	Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK	7.050.000.000	7.024.353.195	5.901.975.930	84,02
04	01	190	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.550.000.000	1.529.556.025	1.467.330.739	95,93

KODE			URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	ANGGARAN APBD 2019 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%)
04	01	191	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.100.000.000	893.578.250	816.984.266	91,43
04	01	192	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.200.000.000	4.332.709.864	4.028.448.871	92,98
			PENGAWASAN	**39.760.200.000**	**40.841.910.092**	**39.001.530.216**	**95,49**
05	**05**		**Inspektorat**	**39.760.200.000**	**40.841.910.092**	**39.001.530.216**	**95,49**
05	05	205	Program Pembinaan dan Pengawasan	32.050.000.000	32.573.493.170	31.283.434.874	96,04
05	05	206	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi	1.412.200.000	1.285.868.582	1.020.630.949	79,37
05	05	207	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi	742.014.000	645.143.405	615.613.181	95,42
05	05	208	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Provinsi	5.555.986.000	6.337.404.935	6.081.851.212	95,97
			PEMERINTAHAN UMUM	**15.920.200.000**	**16.604.809.719**	**15.044.126.405**	**90,60**
05	**03**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**15.920.200.000**	**16.604.809.719**	**15.044.126.405**	**90,60**
05	03	048	Program Kesatuan Bangsa dan Politik	9.000.000.000	9.548.824.243	8.941.759.645	93,64
05	03	049	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.150.000.000	1.148.475.130	915.918.450	79,75
05	03	050	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	550.000.000	721.876.500	595.840.814	82,54
05	03	051	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.220.200.000	5.185.633.846	4.590.607.496	88,53
			JUMLAH	**8.907.080.394.817**	**9.176.401.774.827**	**7.799.527.384.134**	**85,00**

Sumber: BPKAD, 2020, diolah